

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN
DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN
DI MADRASAH DINIYAH TARBIYATUL ATHFAL GONTOR**

TESIS



Oleh:

Nurwaini Sholeh

NIM: 502210069

**IAIN
PONOROGO
PONOROGO**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO PASCASARJANA

2023

ABSTRAK

NURWAINI SHOLEH. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor.* Tesis, Pascasarjana, Manajemen Pendidikan Islam, IAIN Ponorogo, Pembimbing : Dr Hj Shinta Maharani S.E, M.Ak

Key word: *manajemen pembiayaan, mutu pendidikan*

Penelitian ini bermaksud melihat secara nyata fenomena pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendapatkan diskripsi tentang kegiatan perencanaan pembiayaan pendidikan (*budgeting*), (2) pelaksanaan pembiayaan pendidikan (*actuating*), (3) pengawasan pembiayaan pendidikan (*controlling*) di madrasah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi.

Pengujian keabsahan data didasarkan pada keterpercayaan, transferebilitas dependabilitas/ reliabilitas, dan konfirmabilitas/ objektifitas. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/ penarikan kesimpulan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor.

Dari hasil analisis data diperoleh temuan-temuan penelitian sebagai berikut: Pertama, perencanaan pembiayaan pendidikan (*budgeting*) merupakan proses mempersiapkan rangkaian keputusan untuk mengambil tindakan yang dijabarkan dalam konsep real untuk menjalankan kehidupan madrasah mendatang dengan pembiayaan yang terprogramkan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan desain ideal, hasil perencanaan berupa efisiensi anggaran, pemaksimalan fungsi manajemen dan kebutuhan siswa terakomodir.

Kedua, pelaksanaan pembiayaan pendidikan (*actuating*) sebagai proses implementasi pembiayaan pendidikan melibatkan pelaksana bertindak sesuai perencanaan, pentingnya orientasi dan menggerakkan operator agar visi tercapai, dengan prosedur mengedepankan prinsip *actuating* dan kehati-hatian. *Actuating* membutuhkan pengorganisasian yang memperhatikan ketersediaan sumber daya dan memanfaatkan segala sesuatu yang telah ada sebagai bahan pertimbangan untuk mengorganisasikan program.

Ketiga, pengawasan pembiayaan pendidikan (*controlling*) berfungsi memonitoring seluruh aktifitas penggunaan pembiayaan anggaran pendidikan, mencegah terjadinya kesalahan, dan mencegah penyimpangan, kenyataannya masih terdapat pembiayaan yang tidak tercantum dalam APBM, sehingga diperlukan tambahan biaya dari sumber lain.

Keempat, mutu pendidikan menjadi sasaran pertama dan utama masyarakat atau pihak pelanggan karena pemenuhan sarana penunjang pendidikan serta pembelajaran yanguntutannya semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam yang akhirnya menjadi perhatian bagi setiap lembaga pendidikan.

Abstract

This study intends to see in real terms the phenomenon of the implementation of education financing management at Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor. The aims of this study were to: (1) obtain a description of education financing planning activities (budgeting), (2) implementation of education financing (actuating), (3) monitoring of education financing (controlling) in the madrasah.

This research is a field research with a qualitative approach. Data collection was carried out using interviews, observation, documentation and triangulation methods.

Testing the validity of the data is based on trustworthiness, transferability dependability/reliability, and confirmability/objectivity. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and verification/conclusion. The location of this research was conducted at the Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor.

From the results of data analysis, the following research findings were obtained: First, education financing planning (budgeting) is a process of preparing a series of decisions to take actions that are described in real concepts to carry out the life of future madrasahs with programmed financing to achieve goals and produce an ideal design, planning results in the form of budget efficiency, maximization of management functions and accommodated student needs.

Second, the implementation of education financing (actuating) as the process of implementing education financing involves implementers acting according to planning, the importance of orientation and mobilizing operators so that the vision is achieved, with procedures prioritizing actuating and prudential principles. Actuating requires an organization that pays attention to the availability of resources and utilizes everything that already exists as a material for consideration in organizing the program.

Third, supervision of education financing (controlling) functions to monitor all activities in the use of education budget funding, prevent errors from occurring, and prevent irregularities, in fact there are still financing that are not listed in the APBM, so additional costs are needed from other sources.

Fourth, the quality of education is the first and main target of the community or the customer because of the fulfillment of educational and learning support facilities whose demands are increasing day by day and are varied which ultimately becomes the concern of every educational institution.

Keyword: financing management, education quality



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-URV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan Intensif terhadap tesis yang di tulis oleh **Nurwaini Sholeh** dengan Nomor Induk Mahasiswa **502210069**, Program **Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam** dengan judul : **Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor “** MAKA TESIS INI SUDAH DIPANDANG LAYAK DIAJUKAN DALAM AGENDA UJIAN TESIS PADA SIDANG Majelis *Munaqosah* Tesis.

Ponorogo 07 Mei 2023

Pembimbing I,

Dr Hj Shinta Maharani S.E, M.Ak
NIP 197905252003122002

Pembimbing II,

Dr Tintin Susilowati, M.Pd
NIP 197711162008012017





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-URV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Nurwaini Soleh, NIM 502210069, Program Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan judul: "Menajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor", telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Rabu 07 Juni 2023 dan dinyatakan LULUS

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	Dr. Zahrul Fata Ph.D NIP 19750416200090110009 Ketua Sidang		08-06-2023
2	Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd. NIP. 19800404200911012 Penguji Utama		08-06-2023
3	Dr. Hj Shinta Maharani S.E, M.Ak NIP 197905252003122002 Pembimbing/Penguji 2		08-06-2023
4	Dr. Tintin Susilowati, M.Pd NIP 197711162008012017 Sekretaris		08-06-2023

Ponorogo, 06 Juni 2023
Direktur Pascasarjana,

Dr. Muh. Tasrif, M. Ag.
NIP. 197401081999031001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-URV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nurwaini Sholeh**
Nomor Induk Mahasiswa : **502210069,**
Program : Magister
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Manajemen pembiayaan dalam
meningkatkan mutu pendidikan di madrasah diniyah Tarbiyatul Athfal
Gontor “

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isinya dari keseluruhan tesis tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo 07 Mei 2023
Pembuat Pernyataan



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya Nurwaini Sholeh NIM 502210069, Program Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul ‘ Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah didiyah Tarbiyatul Athfal Gontor ‘ merupakan hasil karya mandiri yang di usahakan dari kerja kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya, apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo 07 Mei 2023
Pembuat Pernyataan



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
Bab II Kajian Teori	
A. Kajian terdahulu	11
B. Sistematika pembahasan	14
1. Menejemen Pembiayaan Pendidikan	15
a. Definisi menejemen pembiayaan	15
b. Prinsip dan fungsi menejemen pendidikan	15
c. Ruang lingkup pembiayaan pendidikan	16
d. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan	18
e. Standar pembiayaan pendidikan	19
f. Sistem pembiayaan pendidikan di madrasah	20
2. Bentuk bentuk desain anggaran pembiayaan	23
3. Implementasi pembiayaan pendidikan	
4. Unsur – unsur model Pengelola pembiayaan pendidikan di Madrasah	25
5. Model-model pembiayaan pendidikan menurut Thomas H Jones	27
6. Strategi pembiayaan pendidikan dalam penyusunan RAPBM	29
7. Penghitungan pembiayaan pendidikan	31
8. Menejemen Mutu layanan	31
Bab III Metode penelitian	
A. Metode penelitian	33
a. Pendekatan dan jenis Penelitian	34
b. Kehadiran peneliti	35
c. Lokasi penelitian	36
d. Subjek dan objek penelitian	37
e. Sumber data penelitian	37
f. Prosedur pengumpulan data	38
g. Tehnik analisis data	44
h. Pengecekan keabsahan temuan	52
Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan	
A. Gambaran objek penelitian	59

B.	Metode perencanaan pembiayaan	73
Bab V Analisis		
A.	Analisis data penelitian	112
B.	Analisis data pelaksanaan	126
C.	Analisis data pengawasan	132
D.	Analisis mutu data layanan pendidikan	137
E.	Temuan	141
Bab VI Kesimpulan dan Saran		
A.	Kesimpulan	145
B.	Saran	146
DAFTAR PUSTAKA		147
DAFTAR RIWAYAT		156



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Indonesia yang memiliki karakteristik dan cirikan dalam penyelenggaraannya. Disamping memiliki kurikulum dan metode mengajar yang bercirikan agama Islam serta bernuansa keagamaan kental yang berbeda dengan pendidikan sekolah. Madrasah juga mensyaratkan guru yang beragama Islam dan berakhlak mulia. Dengan kekhasan yang dimilikinya madrasah mampu mempertahankan dan menjunjung tinggi karakteristiknya dengan menanamkan nilai-nilai agama Islam dan membina akhlak mulia pada anak didiknya. Kekhasan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat bagi yang menginginkan anaknya memiliki kemampuan di bidang agama dan ilmu pengetahuan secara bersama, kenyataan ini menyebabkan banyak orang tua menyekolahkan putra-putrinya di madrasah.

Semenjak di berlakukannya 8 Standar Nasional Pendidikan yang meliputi, standar pengelolaan, standar isi, standar sarana prasarana, standar tenaga pendidikan dan kependidikan, standar biaya, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian yang diberlakukan pemerintah maka setiap madrasah harus berbenah dalam memenuhi delapan standar tersebut agar dapat eksis dan diakui keberadaanya.¹

Perlu diakui bahwa pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang akan memberikan sumbangan terhadap pembangunan social ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kecakapan, sikap dan produktifitas jika pendidikan di tempatkan pada posisi upaya untuk mencerdaskan bangsa dalam kontek madani, maka diperlukan keberanian investasi yang besar untuk system pendidikan nasional. Sementara itu pendidikan nasional di hadapkan pada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran, yang tersedia dan belum terpenuhinya sumber daya dari masyarakat secara propesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung

¹ E Mulyasa, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 34.

jawab bersama antara pemerintah masyarakat dan orangtua.² pendidikan sebagai instrument fundamental bagi peradaban manusia memiliki system yang kompleks dan terencana serta terprogram dengan pembiayaan dan penyelenggaraannya. pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara rakyat dan pemerintah serta masyarakat untuk mencetak sumberdaya manusia yang terdidik guna tercapainya kemajuan pada pemerintah.

Pemerintah dalam menjalankan perannya dengan masyarakat dan swasta tidak boleh melepas tanggung jawabnya dalam pemerataan dan mutu pendidikan. Pembangunan pendidikan di arahkan untuk tercapainya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan agar kelak bangsa ini menjadi bangsa yang kokoh dan berjaya.

Hakikat sebuah pendidikan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas peradaban manusia oleh karena itu setiap proses pendidikan akan berusaha mengembangkan seluas luasnya potensi individu sebagai sebuah elemen penting untuk mengembangkan dan mengubah pola pikir peserta didik sehingga kelak mereka generasi tangguh dan berbudi untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut tentunya harus diatur dengan manajemen pengelolaan yang baik teratur serta terencana.

Pembiayaan pendidikan memang sangat mahal dengan asumsi jika di inginkan sebuah madrasah yang berkualitas maka harus didukung dengan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan profesionalisme dana operasional yang cukup dan kenyamanan bagi kegiatan pembelajaran peserta didik dan fasilitas yang lengkap, hal ini akan terwujud apabila di tunjang dengan anggaran yang memadai, sehingga dapat menopang proses pembelajaran yang maksimal dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas..

Namun pengaturan itu atau manajemen pembiayaan pendidikan yang tepat tidak akan terjadi apabila pengelola pendidikan tidak memiliki dasar pengetahuan tentang hal tersebut, UU Sisdiknas no 20 tahun 2003 pasal 06 ayat 06 mengamanatkan bahwa pendidikan di selenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan

² Nanang Fatah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 78.

pengendalian untuk layanan pendidikan.³ Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, demikian juga pasal 49 ayat 1 bahwa alokasi dana pendidikan minimal 20 % dari APBN dan 20 % dari APBD di luar gaji.

Untuk melaksanakannya di perlukan ketegasan dan komitmen yang tinggi dari elit politik dan pemangku kebijakan pendidikan agar mampu menjadi pengelola bagi kemajuan pendidikan di daerahnya dengan mengembangkan berbagai potensi yang ada. Kebijakan pendidikan Indonesia di hitung dari hasil yang akan tercapai secara sistematis dalam jangka waktu yang panjang yaitu tatanan masyarakat yang di dukung oleh mekanisme untuk mendorong kemandirian daerah. Prioritas program pendidikan dilakukan bagaimana daerah memperlihatkan prioritas pembangunan sesuai aspirasi masyarakat.

Pembangunan pendidikan dibiayai dengan pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orangtua siswa dan masyarakat, dengan estimasi jumlah pendapatan penerimaan negara yang diperlukan pemerintah untuk membiayai rencana belanja pengeluaran pemerintah untuk satu periode tertentu. Semakin berkembangnya strategi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan cukup memberikan pengaruh positif terhadap mutu dan keselarasan pendidikan.

Dengan adanya anggaran pendidikan yang memadai sebuah lembaga pendidikan dapat menyusun alokasi dana yang di butuhkan untuk menopang seluruh kegiatan sehingga sesuai dengan target yang di harapkan.

Pada era sekarang ini mengelola sebuah madrasah memerlukan inovasi dan pemikiran yang berwawasan jauh ke depan agar dapat berkembang dengan mempertimbangkan standar pengelolaan pendidikan untuk meraih kemajuan dan peningkatan di berbagai aspek, baik akademis prestasi non akademis dan kemajuan menejerial dalam menyusun perencanaan pembiayaan, pengorganisasian, aktualisasi pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya sebuah lembaga akan mempunyai daya saing tinggi dan di cintai masyarakat oleh karenanya diperlukan pengelola lembaga pendidikan yang visioner yang mampu menjawab tantangan zaman.

Salah satu pembahasan permasalahan yang mendasar pada manajemen

³ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, (Aneka Ilmu, 2003)

pembiayaan pendidikan adalah bagaimana sebuah lembaga mampu merencanakan mengorganisasikan mengaktualisasikan dan mengawasi pembiayaan pendidikan agar madrasah dapat berjalan sesuai sistem dan menghasilkan lulusan yang mempunyai daya saing dan cakap.⁴ Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam menyiapkan sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh madrasah diniyah dalam pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan antara lain: (1). Sumber Pembiayaan yang Terbatas: Madrasah diniyah seringkali memiliki sumber pembiayaan yang terbatas. Sebagian besar dana berasal dari sumbangan masyarakat atau zakat. Keterbatasan sumber daya ini seringkali menjadi kendala dalam pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan. (2). Tidak Adanya Dana Cadangan: Madrasah diniyah tidak memiliki dana cadangan yang memadai. Hal ini membuat madrasah diniyah tidak dapat mengatasi masalah keuangan yang muncul tiba-tiba seperti perbaikan gedung atau penggantian peralatan yang rusak. (3.) Kurangnya Keterampilan Manajerial: Keterampilan manajerial yang rendah dari pengurus madrasah diniyah seringkali menjadi hambatan dalam pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan. Keterampilan manajerial yang kurang membuat pengurus madrasah diniyah kesulitan dalam mengelola keuangan, membuat anggaran, dan melakukan audit keuangan. (4). Pembiayaan yang Kurang Transparan: Pembiayaan pada madrasah diniyah seringkali tidak transparan. Hal ini seringkali terjadi karena kurangnya pengetahuan atau kesadaran pengurus madrasah diniyah mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. (5). Tidak Adanya Sistem Akuntansi yang Baik: Madrasah diniyah seringkali tidak memiliki sistem akuntansi yang baik. Hal ini membuat pengurus madrasah diniyah kesulitan dalam mencatat transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan yang akurat

Selain daripada itu Undang –undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan orang tua siswa. Semua setuju bahwa pendidikan adalah penting bagi terciptanya kemakmuran dan kemajuan suatu

⁴ Akdon and et.al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 50.

bangsa, karena pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang pemerintah republik Indonesia semenjak tahun 2009 memiliki kebijakan yang tegas dan berani untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, berpengetahuan, bermartabat dan mempunyai daya saing tinggi dalam bidang pendidikan hasilnya adalah hamper setiap tahun Indonesia langganan juara olimpiade sains, penelitian ilmiah remaja dan matematika di ajang internasional.

Disadari bahwa anggaran pembiayaan bukan satu satunya factor penentu agar pendidikan lebih berkualitas, namun tanpa pembiayaan yang cukup akan sulit mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.⁵

Kesadaran yang dibangun pemerintah akan pentingnya pendidikan yang berkualitas pada era global modern yang serba canggih teknologinya telah di wujudkan pemerintah melalui biaya peningkatan biaya operasional siswa, pemberian kartu Indonesia pintar dan beasiswa agar pemerataan pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, hal ini untuk memperjelas tentang pendidikan gratis di jenjang pendidikan dasar yang bermutu yang dicanangkan pemerintah agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahpahaman. Biaya pendidikan merupakan salahsatu factor terpenting yang mempengaruhi berhasilnya penyelenggaraan pendidikan, pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan biaya yang memadai.

Ditinjau dari segi ekonomi tidak ada kegiatan pendidikan yang tidak memerlukan biaya, terlebih jika di kaitkan dengan kualitas proses dan hasil pendidikan. Semakin tinggi tuntutan kualitas semakin tinggi pula pembiayaan yang dibutuhkan , biaya diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang dikaitkan dengan proses pendidikan.⁶

Proses pendidikan memerlukan pembiayaan oleh karena itu diperlukan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang tepat dalam penganggaran pembiayaan pendidikan agar proses kegiatan madrasah berjalan sesuai yang di programkan, guna meningkatkan mutu layanan pendidikan madrasah maka di

⁵ Ibid.

⁶ Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 10.

perlu upaya perbaikan manajemen. Merespon keinginan masyarakat akan pentingnya pendidikan madrasah diniyah tarbiyatul athfal Gontor berlomba membangun institusi pendidikan dengan berbagai macam branding dan tawaran program dengan biaya paling kecil dan minim.

Beberapa keistimewaan pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah antara lain:⁷ 1. Kemandirian: Madrasah diniyah berada di bawah naungan masyarakat dan umat Islam. Oleh karena itu, madrasah diniyah lebih mandiri dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan dan tidak tergantung pada pemerintah. 2. Transparansi: Madrasah diniyah cenderung lebih transparan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Hal ini dikarenakan pengurus madrasah diniyah adalah masyarakat atau orang tua siswa, sehingga mereka lebih memperhatikan transparansi dalam pengelolaan keuangan. 3. Efisiensi: Madrasah diniyah biasanya memiliki biaya yang lebih murah dibandingkan dengan sekolah formal lainnya. Hal ini dikarenakan madrasah diniyah cenderung memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. 4. Partisipasi Masyarakat: Madrasah diniyah lebih dekat dengan masyarakat dan umat Islam. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah formal lainnya. 5. Pendidikan Agama: Madrasah diniyah memberikan pendidikan agama yang lebih kuat dibandingkan dengan sekolah formal lainnya. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mengirimkan anak mereka ke madrasah diniyah untuk mendapatkan pendidikan agama yang lebih baik. Namun demikian, pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya standar pendidikan yang jelas, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, dan kurangnya dukungan dari pemerintah.⁸ Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut agar pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah dapat lebih baik lagi.

Dari delapan standar tersebut bagi Madrasah Diniyah Tarbiyatul Atfal Gontor standar pembiayaanlah yang merupakan tantangan terbesar dalam

⁷ Sumardi, *Madrasah Unggul Berkarakter Berbasis Budaya Kerja* (Artikel: Pendidikan Berkarakter, 2016), 1.

⁸ Luneto Buhari, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah," *Jurnal Tadbir, IAIN Sultan Amai Gorontalo* Vol 3, No 2 (2015): 13.

penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dikarenakan komunitas peserta didik di dominasi dari keluarga kurang mampu yang harus memperoleh pendidikan yang layak dengan pelayanan terbaik. Belum lagi banyak program Madrasah yang memerlukan pembiayaan yang besar dan memerlukan pengelolaan yang serius dan benar. Program tersebut untuk menunjang keberlangsungan dan ketertarikan siswa dalam belajar agar kelak mereka mempunyai bekal dan ketrampilan hidup yang cakap dan cukup. Beberapa program tersebut diantaranya adalah tahfidul Qur'an, pidato tiga bahasa perkemahan kepramukaan dan yang lainnya, yang kesemuanya itu memerlukan manajemen yang baik yang dapat di implementasikan di madrasah, tidak jarang sekolah lain memungut biaya yang cukup besar dari peserta didiknya untuk menunjang pelaksanaan program madrasah sehingga terkadang peserta didik merasa tidak nyaman yang akhirnya terganggu dalam proses pembelajaran sedang di madrasah kita sangat minim pembiayaan padahal prestasi dan kemampuan mereka tidak jauh berbeda . Dari iuran bulanan siswa yang jumlahnya sangat minim sehingga pemasukan yang hanya sedikit untuk melangsungkan proses kegiatan belajar mengajar yang masih sangat perlu biaya sumbangan lainnya. Bahkan sekitar 40% anggaran pembiayaan hanya untuk gaji guru dan karyawan meskipun demikian madrasah tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik. Dari sebuah kenyataan itu madrasah bertekad untuk melahirkan calon –calon pemimpin masa yang akan datang yang sholeh dan sholehah serta mewujudkan misi madrasah membina Al Qur'an serta terwujudnya peserta didik yang sholeh dan sholehah berdasarkan ilmu, iman, dan taqwa yang di imbangi dengan penganggaran (*budgeting*) pelaksanaan (*actuating*) dan evaluasi (*controlling*) pembiayaan pendidikan yang optimal. Madrasah ini mempunyai keinginan yang kuat bahwa dengan manajemen pembiayaan yang benar akan dapat memberikan pelayanan mutu pendidikan dengan sebaik baiknya meskipun dengan biaya yang terbatas agar misi madrasah dapat terealisasi dengan baik dan maksimal.⁹

Atas dasar hal-hal yang disebutkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan dengan factor kegiatan

⁹ Ibid.

penganggaran (*budgeting*) pelaksanaan (*actuating*) dan evaluasi (*controlling*) pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor dengan asumsi bahwa desain pengelolaan pembiayaan yang benar akan mengeluarkan *output* yang berkualitas bermutu berprestasi dan menjadikan kebanggaan orangtuanya dan tentu bagi masyarakatnya.

Disinilah perlunya solusi untuk menganggarkan melaksanakan dan mengevaluasi pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor agar semua program madrasah dapat dijalankan dengan baik dan benar serta berkelanjutan sehingga kelak mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kecakapan hidup dan menjadi generasi gemilang menjadikan muslim yang sesungguhnya dan berdedikasi untuk bangsa dan agama dengan menjadi pemimpin yang mempunyai sifat jujur alim alimah, sholeh dan sholihah . berangkat dari kegelisahan ini di perlukan penelitian menejemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor.

Berbagai upaya yang dilakukan Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor untuk merebut hati siswanya sebagai pelanggan diantaranya dengan menawarkan berbagai program unggulan dan berbagai program keunikan antara lain program hafalan juz amma menambah materi umum dan kegiatan kepramukaan, qiroah, kaligrafi, pidato tiga bahasan dan yang lainnya yang sudah tentu semua program tersebut memerlukan operasional dan pembiayaan yang memadai agar dapat mendukung pelaksanaannya, sementara dana iuran madrasah seringkali tidak mencukupi maka pengelolaan lembaga tersebut di tuntut mampu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut sehingga madrasah ini tetap mampu menjalankan program-program unggulan madrasah dengan biaya anggaran sendiri.

Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor bisa menjalankan visi dan misinya dengan biaya yang minimal yang berasal dari iuran siswa sebesar lima belas ribu rupiah per bulannya untuk kepentingan pembiayaan madrasah sebagai penunjang pembelajaran, agar mampu bersaing dengan madrasah lainnya yang lebih unggul. Oleh karena itu madrasah ini melakukan penganggaran pelaksanaan dan evaluasi yang terpadu agar semua kegiatan berjalan lancar dan terprogram lebih baik dan rinci, keterlibatan dan dukungan komite madrasah diniyah tarbiyatul

athfal Gontor serta kepercayaan masyarakat. Sumbangan dana pendidikan baik dari iuran bulanan menuntut pengelolaan yang professional dan dapat dipertanggungjawabkan ke bagian mana dana tersebut di tempatkan agar berdaya manfaat pada siswa, dan dapat membantu pembiayaan pendidikan yang belum keanggarkan di rencana kerja dan rencana madrasah (RKAM)

Efisiensi dan efektifitas manajemen pembiayaan pendidikan Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor akan di ukur tingkat keberhasilan penggunaan dana dalam membiayai semua program yang menjadi prioritas pengembangan madrasah. Indikator keberhasilan tersebut dapat di ukur dari proses penganggaran pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan, penyerapan anggaran serta kelancaran proses pembelajaran, prestasi siswa di berbagai bidang prestasi sekolah baik akademis ataupun non akademis dan dukungan dari berbagai pihak.¹⁰ Oleh karenanya perlu penelitian manajemen pembiayaan pendidikan yang dimaksudkan untuk memotret madrasah tersebut, bahwa dengan desain penganggaran pelaksanaan dan evaluasi pembiayaan pendidikan yang baik dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan harapan.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan agar lebih terarah, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penganggaran pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor?
3. Bagaimana evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor?

¹⁰ Akdon and et.al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 33.

4. Bagaimana dampak manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini beberapa tujuannya adalah :

1. Menjelaskan penganggaran pembiayaan pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor
2. Menjelaskan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor
3. Menjelaskan evaluasi pembiayaan pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor
4. Menjelaskan mutu layanan pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor

D. Manfaat penelitian

Diantara manfaat yang bisa di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Setidaknya penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan Islam dan manajemen pendidikan Islam atau bisa menambah teori baru nantinya dalam manajemen pendidikan Islam.

2. Manfaat secara praktis

Diantara manfaat praktis diantaranya adalah:

- a. Bagi peneliti yaitu dapat menambah wawasan tentang permasalahan manajemen pembiayaan pendidikan Islam.
- b. Bagi peneliti lainnya yaitu sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian manajemen pembiayaan pendidikan Islam.

- c. Bagi Institusi yaitu memberikan gambaran kepada madrasah dalam hal pengembangan manajemen khususnya dan dapat menjadi sumbangsih bagi lembaga yang di teliti untuk dapat menjadi madrasah unggulan khususnya dalam hal pengelolaan dana pendidikan.

E. Kajian teori terdahulu

Pertama, Kisbiyanto (2018) dalam penelitian yang berjudul *Pengefektifan manajemen pembiayaan pendidikan* pembiayaan pendidikan sangat penting untuk perencanaan pendidikan dan para pembuat kebijakan pendidikan.¹¹ Ketersediaan biaya yang memadai dengan manajemen pembiayaan yang lebih baik dapat menyumbangkan peningkatan hasil pendidikan baik dilihat dari jumlah maupun mutunya. Pembiayaan pendidikan sebagai salah satu faktor penting penyelenggaraan pendidikan memerlukan analisis yang cermat dan tepat sehingga pengelolaan pendidikan bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Efisiensi anggaran terletak pada ketepatan analisis dan penggunaannya semaksimal mungkin bagi kepentingan pendidikan. Efektifitas anggaran terletak pada besarnya capaian tujuan pendidikan yang didukung oleh pengguna anggaran pendidikan.

Kedua, M Jupri, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *Model Manajemen pembiayaan pendidikan menuju SBI* Rintisan sekolah bertaraf Internasional banyak diminati masyarakat tetapi untuk mendapatkan pendidikan tersebut diperlukan biaya yang tinggi.¹² Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus penelitian ini untuk menganalisis pembiayaan SMP N 2 RSBI Rembang dengan fokus penganggaran akuntansi dan auditing hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembiayaan pendidikan melibatkan banyak pihak pencatatan penerimaan penyimpanan dan penggunaan telah sesuai dengan data. Pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan melalui audit internal dan external sekolah. Disarankan sekolah dapat melibatkan pengurus OSIS dalam tim sekolah untuk mendapatkan usulan yang berkenaan dengan kebutuhan peserta didik dalam anggaran sekolah. Sekolah

¹¹ Kisbiyanto, *Pengefektifan Manajemen Pendidikan, Elementary*, vol. Vol 2, No 1, 2014, 160.

¹² M Jupri, "Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Menuju SBI Di SMP N 2 Rembang," *Journal of Economic Education* Vol 1 (2012): 21.

memiliki ahli IT untuk membantu mengelola sistem informasi dan keuangan sekolah, pemerintah kabupaten dapat membuat standar iuran masyarakat untuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) sekolah bertaraf internasional (SBI) agar pembiayaan bisa transparan. Dalam alternatif model manajemen pembiayaan pendidikan tim penyusun anggaran sekolah dibentuk sebelum tahun pelajaran berjalan. Rencana anggaran dikonsultasikan ke dinas kabupaten Rembang selanjutnya di mintakan persetujuan komite sekolah sebagai perwakilan orangtua dinas pendidikan dan pengesahannya dari dinas pendidikan agra RAPBS menjadi APBS.

Ketiga, Armida (2008) dalam penelitiannya yang berjudul *Model pembiayaan di Indonesia* pembiayaan dalam dunia pendidikan bukanlah hal yang sederhana, di negara maju pembiayaan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara.¹³ Dalam sejarah Indonesia setidaknya ada dua model pembiayaan pendidikan. Pertama model sentralisasi yang dilaksanakan pada masa orde baru dan model desentralisasi yang dilaksanakan pada masa orde reformasi, dalam hal pembiayaan ada tiga komponen yang bertanggung jawab, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kesimpulannya adalah dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang, agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka ekonomi daerah

Keempat, Nanang, Fattah, (2008) dalam penelitian yang berjudul *pendanaan pendidikan landasan teori dan studi empiris*, pembiayaan di hampir semua negara di sediakan baik oleh sektor swasta maupun pemerintah. Terdapat beragam komponen dalam pembiayaan pendidikan, umumnya di hitung dari biaya nyata dan biaya operasional.¹⁴ penghitungan biaya pendidikan meliputi *total cost* per peserta didik, *average cost*, dan *marginal cost*, kesimpulannya adalah bahwa pendidikan lebih menguntungkan sebagai bentuk investasi untuk individu dari pada untuk masyarakat secara keseluruhan.

Kelima Buhari Luneto, (2018) dalam penelitiannya yang berjudul

¹³ Armida, "Model Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Media Akademika, Fakultas Adab IAIN Sulthan Thaha* Vol 26, No 1 (2011): 11.

¹⁴ Nanang Fattah, "Pembiayaan Pendidikan Landasan Teori Dan Studi Empiris," *Jurnal Pendidikan Dasar, UPI*, 2008, 20.

Manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah. Biaya adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan baik dalam bentuk uang atau barang dan tenaga. Masalah dalam pembiayaan pendidikan adalah bagaimana biaya yang diperoleh itu direncanakan dan dialokasikan. Biaya yang dikeluarkan dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung, biaya langsung dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar mengajar, sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang yang dikorbankan peserta didik selama belajar.¹⁵ Kesimpulannya adalah bahwa hal terpenting pada penyusunan RAPBM adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien serta mengalikasikan dana secara tepat sesuai kebutuhan agar keberhasilan program dapat dicapai.

Berdasarkan kajian dari kelima hasil penelitian tersebut adalah dapat kita sarikan bahwa kelimanya lebih menekankan pada tataran keefektifan pembiayaan pengawasan akuntansi pertanggungjawaban perumusan sistem pembiayaan dan kebermanfaatan manajemen pembiayaan, sehingga penulis perlu memaksimalkan fungsi manajemen yang lain dalam pembiayaan pendidikan yaitu perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan dengan penelitian baru yang berjudul manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor, yang sifatnya adalah melengkapi penelitian sebelumnya serta menambah pembaharuan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi atas beberapa bagian. Pada Bab Pertama isinya adalah latar belakang dan permasalahan yang tercakup dalam penelitian, rumusan masalah yang mendasari dilakukannya penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian.

Pada Bab Kedua berisi kajian teori yang akan digunakan untuk membaca data. pada bagian ini akan dijelaskan teori-teori serta pustaka yang dipakai saat penelitian. Teori-teori ini diambil dari buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang dipadukan menjadi sebuah acuan dalam membaca data.

Pada Bab Ketiga berisi profil lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor Mlarak Ponorogo.

¹⁵ Buhari, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah," 15.

Pada Bab Keempat berisi data tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran objek penelitian

Pada Bab Kelima berisi analisis data penelitian, analisis data pelaksanaan, analisis data pengawasan dan analisis mutu data layanan pendidikan

Pada Bab Keenam berisi kesimpulan dan saran



BAB II KAJIAN TEORI

A. Manajemen pembiayaan pendidikan

1. Definisi manajemen pembiayaan

Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien.¹⁶ Oleh karena itu fokus manajemen pembiayaan pendidikan pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

2. Prinsip dan fungsi pembiayaan pendidikan

Dalam definisi ini, ada tiga kata kunci dalam manajemen pembiayaan pendidikan yaitu optimalisasi sumber-sumber dana, alokasi dan distribusi. Tiga kata kunci inilah yang pada akhirnya menjadi fungsi dari pembiayaan pendidikan ini sendiri.

a. Optimalisasi sumber dana

Fungsi manajemen pembiayaan adalah bagaimana lembaga pendidikan mampu mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang di peroleh.

b. Alokasi

Alokasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses *financial decision*. Disinilah kebijakan alokasi pembiayaan pendidikan ditentukan. Kebijakan dalam menentukan alokasi ini harus mengedepankan program prioritas dalam sebuah proses pendidikan.

c. Distribusi

¹⁶ Jaja Jahari and Amirullah Syarbini, *Manajemen Madrasah Teori, Strategi Dan Implementasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 73–74.

Distribusi merupakan proses penyaluran dana sesuai dengan alokasi yang telah di tentukan.¹⁷

Terkait dengan fungsi manajemen pembiayaan pendidikan dikatakan bahwa dana atau biaya memainkan peran penting dalam pendidikan pada tiga area ; *pertama* ekonomi pendidikan dalam kaitannya dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan, *kedua*; keuangan sekolah kaitannya dengan kebijakan sekolah untuk menerjemahkan uang terhadap layanan kepada peserta didik, dan *ketiga*; pajak administrasi bisnis sekolah yang harus di organisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan. Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam dan mungkin tak terhingga.¹⁸

Untuk menjalankan fungsi manajemen pembiayaan secara efektif maka harus memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengelolaannya. Diantara prinsip manajemen pembiayaan pendidikan adalah : akuntabilitas, transparan, integritas, konsistensi, efektif dan efisien

3. Ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan

a. Penganggaran

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu dalam menentukan biaya satuan pendidikan yang mana terdapat dua macam pendekatan yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro.

Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan

¹⁷ Ibid., 74.

¹⁸ Mulyasa, *Manajemen Pendidikan*, 195.

mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran biaya pendidikan adalah;¹⁹

- 1) Anggaran belanja sekolah harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
- 2) Merevisi peraturan dan input lainnya yang relevan dengan mengembangkan perencanaan system yang efektif.
- 3) Memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya.

Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pengembangan administratif. Dalam hubungan ini adalah penyusunan rencana kerja anggaran madrasah (RKAM) memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan eksem yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

b. Pelaksanaan

Accounting adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaan keuangan sekolah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan kedalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

c. Evaluasi

¹⁹ Akdon and et.al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 23.

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat di ukur mengenai suatu kuantitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam evaluasi keuangan sekolah, pengawasan merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan berbasis sekolah.

4. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan

Pada prinsipnya sumber pembiayaan pendidikan bisa di peroleh dari berbagai sumber selama sumber itu diperoleh secara halal dan bisa dipertanggungjawabkan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tak langsung.²⁰ Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orangtua maupun peserta didik itu sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung adalah berupa keuntungan yang hilang yang dikorbankan peserta didik selama belajar.

Alokasi dana ini dapat dibedakan secara garis besar meliputi pengeluaran operasional atau pendapatan dan pengeluaran modal.²¹ Pengeluaran operasional merupakan semua pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan yang mendukung proses kegiatan mengajar seperti gaji kepala sekolah, gaji guru tetap ataupun tidak tetap, penyusunan aktiva tetap, biaya listrik, dan biaya-biaya lainnya, sedang pengeluaran modal merupakan semua pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai barang modal seperti membeli tanah, membangun gedung dan membeli peralatan sekolah.

5. Standar pembiayaan pendidikan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan

²⁰ Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, 35.

²¹ *Ibid.*, 36.

besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya pendidikan terdiri atas biaya operasional dan biaya personal.²²

a. Biaya operasional

Biaya operasional dalam standar pembiayaan pendidikan terdiri dari :

- 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
- 3) Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, konsumsi, pajak, asuransi, sarana dan prasarana transportasi dan sebagainya.

b. Biaya personal

Biaya personal merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, antara lain meliputi pakaian, transport, buku, konsumsi, dan akomodasi.

Dalam peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. PP ini diperkuat dengan PP No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, dimana biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.

Biaya satuan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan, dan biaya peserta didik. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan terdiri biaya investasi dan biaya operasional. PP No 48 tahun 2008 ini sifatnya melengkapi dan mengukuhkan PP No 19 tahun 2005, tidak ada

²² Ibid., 37.

pemberlakuan standar ganda pada penggunaan kedua PP tersebut, karena PP No 48 tahun 2008 memberikan penafsiran yang lebih jelas terhadap PP No 19 tahun 2005 tentang pendanaan pendidikan.²³

6. Sistem pembiayaan pendidikan

a. Konsep pembiayaan pendidikan di Madrasah

Biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya. biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik yang berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah orang tua maupun peserta didik sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan peserta didik selama belajar.

Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut di gunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. System pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumberdana tersedia dapat digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan dalam kurun waktu tertentu.

Anggaran pembiayaan pendidikan disusun untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada manajemen pembiayaan pendidikan untuk mengarahkan madrasah dalam melaksanakan

²³ PP No 19 Tahun 2005

kegiatan pendidikan. Dalam arti yang lebih makro anggaran mempunyai fungsi;²⁴

- 1) Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat dilihat kebutuhan data yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan di madrasah atau lembaga.
- 2) Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk mengeluarkan dana sehingga melalui anggaran tersebut dapat diketahui besarnya dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya.
- 3) Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya, realisasinya sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau penghematan anggaran. Menurut John Morphet dan Alexanders, dalam akdon ada beberapa kebijakan umum yang biasa dianjurkan oleh ahli pembiayaan pendidikan antara lain;
 - a) Jika masukan biaya tambahan akan menambah lebih banyaknya keuntungan secara individu dan social sistim pendidikan dibandingkan dengan jumlah investasi, maka masukan pembiayaan harus ditingkatkan.
 - b) Jika keuntungan secara individu dan social dari system organisasi dapat menghasilkan dengan masukan biaya yang lebih kecil maka masukan pembiayaan seharusnya dikurangi.
 - c) Jika unit administrasi sekolah merupakan unit yang sangat kecil dapat mencapai keuntungan dalam skala ekonomi penting untuk memaksimalkan keuntungan pendidikan, per rupiah masukannya maka system sekolah harus di tinjau organisasinya secara tepat.

²⁴ Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, 96.

- d) Jika struktur organisasi tidak berfungsi secara efisien dan efektif untuk memaksimalkan keuntungan pendidikan maka struktur organisasi itu harus di modifikasi.
- e) Jika setiap kebijakan pendidikan, program atau cara kerja tidak berfungsi, tidak efektif dan efisien maka kebijakan pendidikan harus di ubah. Pendidikan dalam operasionalnya tidak lepas dari pembiayaan atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relative singkat, oleh karena itu uang yang dikeluarkan pemerintah, masyarakat, maupun orangtua untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya dipandang sebagai investasi dimasa yang akan datang yang akan menghasilkan keuntungan atau manfaat dalam bentuk finansial dan non finansial.

Dukungan finansial yang cukup akan mempermudah proses manajerial suatu lembaga pendidikan untuk berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpin. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan.²⁵

Kedua hal tersebut merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di madrasah beserta komponen-komponen lainnya pembiayaan pendidikan sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat untuk turut andil dan merasa memiliki lembaga tersebut, oleh karenanya jika madrasah atau lembaga harus memiliki program yang bagus.

Kepercayaan memang dapat membangunkan kesadaran seseorang untuk memberikan bantuan dana. Dengan demikian

²⁵ Ibid.

kepercayaan masyarakat terutama para donatur dan calon donatur harus diperkuat dan di jaga.

Bentuk-bentuk desain anggaran pembiayaan, sedikitnya ada empat bentuk desain anggaran pembiayaan pendidikan yang dianut madrasah. Menurut Nanang Fatah bentuk-bentuk desain anggaran pembiayaan anggaran adalah:²⁶

1) Anggaran butir per butir

Merupakan anggaran yang paling simple dan banyak digunakan . setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan katagori-katagori, misalkan gaji, upah, honor, menjadi satu katagori.

2) Anggaran program

Adalah bentuk anggaran yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Perhitungan anggaran pembiayaan berdasarkan pada perhitungan masing-masing jenis program.

3) Anggaran berdasarkan hasil adalah bentuk anggaran yang menekankan hasil, bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran.

4) System perencanaan penyusunan program dan penganggaran adalah sebuah kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisa secara sistematis. Setiap program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek, maupun jangka panjang. Semua tentang biaya keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan.

b. Implementasi pembiayaan pendidikan.

²⁶ Nanang Fatah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, 56.

Penerapan konsep model penentuan biaya satuan pendidikan konsep model penentuan biaya madrasah dapat digambarkan dalam model *fishbone* atau model tulang ikan.²⁷

Penentuan biaya madrasah dikelompokkan menjadi delapan komponen, sesuai standar komponen pendidikan nasional. Berikut adalah gambar model pengalokasian pembiayaan di madrasah :

Standar Pengelolaan Berkaitan dengan manajemen sekolah (permendiknas No 19 th 2007)	Standar Isi Berkaitan dengan kurikulum (permendik nas No 22 tahun 2006)	Standar sarana dan Prasarana Berkaitan dengan fasilitas sekolah(per mendiknas No 24 th 2007)	Standar sarana dan Prasarana Berkaitan dengan fasilitas sekolah(per mendiknas No 24 th 2007)
Standar Pembiayaan Berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah (permendiknas No 69 th 2009 Standar	Standar Proses Berkaitan dengan PBM (Permendik nas No 41 th 2007)	Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas No 23 Tahun 2006)	Standart Penilaian Berkaitan Dengan Penetapan Ulangan, Ujian Serta Penilaian nya

Tabel 2.1

c. Unsur-unsur model pengelolaan pendidikan di madrasah

Struktur pengembangan model pengelolaan pembiayaan madrasah berdasarkan kebutuhan belajar di bangun berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh madrasah.²⁸ Dalam mengalokasikan dana, madrasah hanya mengalokasikan dana berdasarkan pengalaman yang sudah dilaksanakan sebelumnya, kurang memfokuskan pada program yang sebenarnya perlu dibiayai sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

²⁷ Buhari, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah," 43.

²⁸ Akdon and et.al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 66.

Struktur model pengelolaan pembiayaan madrasah yang di bangun terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dalam pengelolaan pembiayaan di madrasah agar pendistribusian dana mampu dialokasikan berdasarkan program dalam melaksanakan PMB dan sesuai kebutuhan peserta didik.

Unsur-unsur tersebut adalah :

1) Kebutuhan belajar peserta didik

Pendidikan yang dibutuhkan peserta didik adalah ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kecakapan dasar untuk tumbuh dan berkembang ke jenjang yang lebih tinggi yang didukung nilai-nilai agama

2) Program atau kegiatan prioritas.

Unsur ini merupakan dasar dalam mencapai tujuan dan sasaran PMB, serta untuk menentukan pendistribusian dan pengalokasian dana sehingga penggunaannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Contoh pengembangan kurikulum, ekstra kurikuler, penentuan SKL, peningkatan kompetensi guru, penyediaan buku referensi, PSB, bantuan peserta didik miskin, kegiatan ulangan harian, dan penyediaan alat peraga edukatif.

3) Tujuan atau sasaran unsur ini merupakan arah yang akan dicapai oleh madrasah dalam melaksanakan PBM.

4) Peserta didik. Unsur ini memberikan gambaran jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan di madrasah sehingga diketahui bobot besaran biaya yang dibutuhkan untuk setiap madrasah.

5) Distribusi dan alokasi dana. Unsur ini merupakan pedoman bagi madrasah dalam endistribusikan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk dipergunakan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan PBM.

6) Sumber dana. Unsur ini memberikan gambaran tentang darimana madrasah mendapatkan sumber-sumber pembiayaan

untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di madrasah, unsur ini merupakan landasan dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik.²⁹

d. Model-model pembiayaan pendidikan menurut Thomas H Jones dalam armada adalah ada enam model model pembiayaan pendidikan, yaitu:

1) Model *Flat Grant*

Model ini merupakan tipe perencanaan bantuan pembiayaan pendidikan yang tertua dengan konsep setiap madrasah memiliki sejumlah dana yang sama yang dihitung per peserta didik atau per unit pendanaan lainnya.

Madrasah dengan jumlah peserta didik terbanyak akan mendapat dana lebih besar. Semua sekolah akan mendapatkan bantuan yang sama terlepas dari seberapa besar kekayaan yang dipunyai sekolah atau seberapa rendah tariff pajak yang mereka berlakukan. Model ini diadopsi pemerintah pusat dalam mendistribusikan dana bantuan operasional peserta didik (BOS).³⁰

2) Model *Power Equalizing*

Model *power equalizing* membebankan kepada kabupaten yang sangat kaya untuk membayarkan pajak sekolah yang dipungut kembali ke kas Negara. Negara menggunakan dari kabupaten yang miskin. Setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tergantung pada kemampuan penghasilan daerah. Daerah miskin akan menerima 5 permil ditambah 7 permil dana dasar daerah, sehingga terdapat keseimbangan dana dasar daerah-daerah yang sumber alamnya kaya.

3) Model *Complete State*

Model complete state, merancang pembiayaan pendidikan unruk menghapus semua perbedaan lokal, baik

²⁹ Ibid., 44–45.

³⁰ Ibid., 147.

dalam pembelanjaan maupun dalam dalam perolehan pajak. Tidak ada pajak property sekolah lokal dengan berbagai tarif. Pengawasan keuangan lokal tidak efisien untuk masyarakat secara keseluruhan. *Model complete state* menempatkan tanggung jawab yang lebih besar untuk akuntabilitas pendidikan secara merata di berbagai propinsi dan kabupaten atau kota madya.

4) Model *Foundation Plan*

Model ini dirancang untuk menggali masalah-masalah besar dalam pendidikan dan keuangan, yaitu kesetaraan pembelanjaan, penetapan standar pajak dan pembelanjaan sekolah minimum. Pemisahan wewenang politik antar propinsi adalah kebijakan untuk proses perbaikan yang berkesinambungan atas proses pendidikan.

Prinsip pembiayaan pendidikan *model foundation plan*, Negara menentukan biaya pendidikan per peserta didik per tahun bagi program pendidikan yang memuaskan, Negara menentukan tariff pajak minimum yang harus dilakukan oleh semua propinsi dan kabupaten dengan jumlah yang sama, Negara memberikan hibah kepada tiap kabupaten atau kota dengan jumlah yang sama, sedangkan nominal bantuan besarnya situasional terhadap kekayaan lokal tetapi tidak pada upaya pajak. Pembagian pembiayaan pendidikan dibagi dengan porsi yang sama dengan mengutamakan kabupaten yang miskin.

5) Model *Guaranteed Percent equalizing*

Model ini dimaksudkan bahwa Negara membayar persentasi tertentu dari total pembiayaan pendidikan yang diinginkan oleh kabupaten sekolah lokal.³¹ Penyertaan persentasi Negara diberlakukan tinggi pada distrik-distrik sekolah miskin, dan persentasi sekolah tendah pada distrik

³¹ Buhari, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah," 42.

kaya. Model ini memaksimalkan pengawasan lokal, kesetaraan wajib pajak dan efisiensi sekolah lokal, guaranteed percent equalizing menjamin tiap tiap distrik sekolah lokal dengan dana jumlah tertentu.

6) Model *complete local Support*.

Pembiayaan pendidikan bersumber pada dana pemerintah, dan diharapkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.³² System ini akan memberikan dampak pada system pendidikan yang ada di daerah. Apabila dilihat dari konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia prinsip pembiayaan tersebut akan memiliki kesamaan seperti yang dikemukakan Jones. Daerah-daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat unik antara satu daerah dengan daerah lainnya sehingga tidak mungkin menyamakan pembiayaan pendidikan untuk setiap daerah.

e. Strategi pembiayaan pendidikan dalam menyusun RAPBM.

Strategi adalah keputusan atau tindakan untuk mencapai sasaran organisasi.³³ Strategi dipengaruhi oleh misi organisasi atau lembaga madrasah dan lingkungannya. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM) memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstrim yang mencakup kekuatan kelemahan peluang dan ancaman (analisis SWOT)

Dunia pendidikan sangat terpengaruh oleh berbagai perubahan baik politik, sosial budaya, ekonomi, teknologi, industri maupun informasi. Pembaharuan dalam aspek-aspek tersebut menuntut para pengambil keputusan kebijakan pendidikan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Strategi pembiayaan pendidikan dalam penyusunan RAPBM dimulai dengan mengkaji perubahan peraturan perundangan dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Pada dasarnya konsep strategi ada 6 yaitu:

³² Armida, "Model Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia," 45–48.

³³ Nanang Fatah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, 54.

- 1) Suatu pola keputusan yang *integrity, coherent*, dan menyatu diantara setiap komponen
- 2) Menentukan dan mengembangkan tujuan lembaga yang dinyatakan dalam sasaran jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, program dan prioritas dari alokasi sumber dana pendidikan.
- 3) Memilih jenis kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, apa saja yang mungkin akan diperlukan oleh masyarakat dimasa yang akan datang.
- 4) Merespon dengan cepat semua peluang dan ancaman, kelemahan, dan keunggulan yang ada dibidang lembaga pendidikan.
- 5) Membangun komitmen dari semua pihak, peserta didik, orangtua, masyarakat, pemerintah unut-unit depdiknas, sampai pada internal sekolah untuk bersama-sama meningkatkan mutu sekolah.
- 6) Menentukan tingkat kontribusi dari setiap input pendidikan yang bermuatan biaya terhadap mutu pendidikan atau prestasi belajar peserta didik dan angka terhadap lulusan sekolah.³⁴

Strategi RAPBM sangat dipengaruhi oleh misi dan faktor lingkungan pendidikan (madrasah). Lingkungan pendidikan dapat digolongkan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal dan lingkungan External, lingkungan sekolah mencakup tenaga kependidikan, sarpras, kelengkapan fasilitas, dan biaya yang tersedia disetiap sekolah. Sedangkan lingkungan eksternal sekolah mencakup kondisi social, ekonomi dan aspirasi masyarakat, keadaan social ekonomi orangtua, globalisasi informasi dan teknologi dan industry yang berkembang sangat cepat akan memberikan pengaruh terhadap hasil-hasil pendidikan. Sebagai pilihan pola pengelolaan strategi pembiayaan berikut disajikan strategi pembiayaan berdasarkan sumber pendanaan.

³⁴ Ibid., 55.

f. Penghitungan biaya pendidikan anggaran

Terdiri dari anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran, anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh madrasah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur yang terdiri dari pemerintah pusat, pemda, masyarakat dan orangtua peserta didik. Sedangkan anggaran pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di madrasah.³⁵ Pengeluaran madrasah dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran yaitu pengeluaran untuk pelaksanaan.

g. Manajemen mutu layanan

Ia merupakan topik yang hangat didunia bisnis dan akademik namun demikian istilah tersebut memerlukan tanggapan secara hati hati dan perlu mendapat penafsiran secara cermat. Faktor utama yang menentukan kinerja suatu organisasi atau lembaga adalah mutu barang dan jasa yang dihasilkan. Produk dan jasa yang bermutu adalah produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen atau pelanggannya, oleh karena itu organisasi atau lembaga perlu mengenal pelanggan atau konsumen dan mengetahui kebutuhan pelanggan atau konsumen dan mengetahui kebutuhan pelanggan atau konsumen tersebut. Ada banyak sekali pengertian mutu yang sebenarnya pengertian tersebut masih mengalami kontradiksi. Disatu sisi bisa diartikan sebagai sebuah konsep yang absolut dan disisi lain juga diartikan sebagai sebuah konsep yang relatif. Dalam konsep absolut suatu disebut bermutu bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya sesuatu tersebut sudah tidak ada lagi yang melebihinya. Dalam konsep ini mutu mirip dengan suatu kebaikan, kecantikan,

³⁵ Ibid., 24.

kepercayaan yang idial tanpa ada kompromi. Mutu dalam makna absolut adalah yang terbaik, tercantk terpercaya.³⁶

Sedangkan dalam konsep relatif, mutu bukan merupakan atribut dari produk jasa. Sesuatu disebut bermutu jika barang atau jasa memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Oleh karena itu mutu bukanlah tujuan akhir melainkan sebagai alat ukur atas produk akhir dari standar yang ditentukan. Mutu atau jasa dalam konsep relative tidak harus mahal eksklusif atau special karena barang bermutu bisa biasa biasa saja, bersifat umum, dikenal banyak orang tetapi bisa berkonotasi cantik atau indah walaupun tidak penting sekali.

Dalam konsep relatif produk atau jasa yang bermutu adalah sesuai dengan tujuannya. Definisi mutu dalam konsep relative memiliki dua aspek, yaitu dilihat dari sudut pandang produsen atau penyelenggara maka mutu adalah mengukur berdasarkan spesifikasi yang ditetapka , dan dari sudut pandang konsumen atau pelanggan maka mutu untuk memenuhi tuntutan konsumen atau pelanggan.

Untuk mengupayakan agar layanan yang diberikan itu memberikan kepuasan kepada pelanggannya maka berbagai jenis pelayanan dan pelanggannya masing-masing harus harus dipilah-pilih. Sebagaimana dijelaskan diatas pelanggan lembaga pendidikan dikatagorikan dalam dua macam yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Ini berarti lembaga harus memberikan pelayanan kepada fihak-fihak yang ada didalam system penyelenggaraan pendidikan yaitu : guru dan karyawan dan fihak-fihak yang bukan menjadi bagian dari sestem penyelenggaraan pendidikan. Pelanggan eksternal yaitu siswa orangtua pemerintah penyandang dana pemekai lulusan. Jadi lembaga pendidikan bermutu adalah lembaga yang mampu memberikan layanan yang sesuai atau melebihi harapan guru

³⁶ Edward Salis, *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2008), 67.

karyawan peserta didik penyandang dana orangtua atau pemerintah dan pemakai lulusan.³⁷



³⁷ Thorik Guna and Utus Hardiono Sudibyo, *Marketing Muhammad* (Bandung: Madani Prima, 2007), 78.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ada beberapa jenis pendekatan dalam penelitian, yaitu:³⁸

1. Pendekatan Kuantitatif: Pendekatan ini didasarkan pada pengumpulan dan analisis data numerik, dan lebih memfokuskan pada generalisasi atau inferensi yang dapat diukur secara statistik. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian eksperimen atau survei.
2. Pendekatan Kualitatif: Pendekatan ini lebih fokus pada pengumpulan dan analisis data deskriptif yang mendalam, dan sering digunakan untuk memahami pengalaman dan persepsi individu atau kelompok tertentu. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan grounded theory.
3. Pendekatan Gabungan (*Mixed Methods*): Pendekatan ini menggabungkan penggunaan data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang suatu fenomena. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian sosial atau ilmu kesehatan.
4. Pendekatan Interpretatif: Pendekatan ini fokus pada pemahaman dan interpretasi makna dari data yang dikumpulkan dalam penelitian, dan sering digunakan dalam penelitian yang lebih bersifat kualitatif.
5. Pendekatan Fenomenologis: Pendekatan ini mengutamakan pada penelitian tentang pengalaman individu dan bagaimana individu memberikan makna pada pengalaman tersebut.
6. Pendekatan Konstruktivis: Pendekatan ini fokus pada peran konstruksi sosial dalam membangun pengetahuan, makna, dan realitas, dan sering digunakan dalam penelitian di bidang sosiologi dan antropologi.
7. Pendekatan Feminis: Pendekatan ini memperhatikan peran gender dan interaksi sosial yang terjadi di antara individu dan kelompok, serta dampaknya pada pembentukan pengetahuan dan praktek-praktek sosial.

³⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 67.

Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian di bidang studi gender atau feminis.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif lapangan dengan karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih penting daripada hasil.³⁹ Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif.

Lima macam metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu:⁴⁰

1. Studi Kasus (*Case Study*) - Metode penelitian yang mendalam terhadap satu kasus atau objek tertentu, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan rinci tentang fenomena atau permasalahan yang diteliti.
2. Etnografi - Metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan mendalam kehidupan sehari-hari dari kelompok sosial tertentu, dengan tujuan memahami dan mendeskripsikan budaya, norma, dan nilai dari kelompok tersebut.
3. Fenomenologi - Metode penelitian yang fokus pada pengalaman individu atau kelompok dalam memahami suatu fenomena atau permasalahan, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang makna subjektif yang diberikan oleh partisipan penelitian.
4. *Grounded Theory* - Metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengembangkan teori yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dari partisipan penelitian, dengan tujuan untuk memahami proses atau pola dalam suatu fenomena atau permasalahan.
5. Studi Kasus Eksploratif (*Exploratory Case Study*) - Metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi secara mendalam dari beberapa partisipan atau kasus dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman awal tentang suatu fenomena atau permasalahan.

Dan data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini

³⁹ Eko Susilo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Airlangga, 2010), 51.

⁴⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 68–69.

adalah bersifat studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan salah satu jenis metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan rinci tentang fenomena atau permasalahan tertentu yang sedang diteliti. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan analisis yang mendalam terhadap kasus atau objek tertentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan, seperti sejarah, konteks, lingkungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian studi kasus dapat dilakukan pada berbagai bidang, seperti ilmu sosial, psikologi, bisnis, teknik, dan sebagainya. Studi kasus biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.⁴¹ Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan rinci tentang fenomena atau permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan teori atau model yang dapat membantu memecahkan masalah atau menyelesaikan permasalahan yang serupa di masa depan. Yang mana penelitian dilaksanakan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor Mlarak Ponorogo.

B. Kehadiran peneliti

Peneliti hadir instrumen penelitian di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor Mlarak Ponorogo.

C. Lokasi penelitian

Penelitian mengambil lokasi di di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor Mlarak Ponorogo. Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan lokasi penelitian adalah madrasah tersebut adalah sebuah madrasah yang berhikmah melayani semua lapisan masyarakat dengan keunikan yang tidak dimiliki madrasah atau sekolah lain. Dan dalam pengelolaannya berpotensi dikembangkan menjadi sekolah unggulan dalam hal pembiayaan keuangan, tata kelola keuangan dan implementasi pembiayaan pendidikan yang jujur, sehingga belum pernah terjadi defisit anggaran dan mampu mensejahterakan semua *stake holder* madrasah.

⁴¹ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2010), 37.

Masyarakat mempercayakan putra-putrinya menimba ilmu di madrasah tersebut sebagai bukti wujud kepercayaan masyarakat pada madrasah tersebut. Sehubungan dengan pendekatan dan rancangan penelitian ini maka penulis menjajaki tempat dan orang-orang yang dapat dijadikan sumber data atau subyek penelitian, mencari lokasi yang dipandang sesuai dengan maksud pengkajian yang selanjutnya mengembangkan jaringan yang lebih luas untuk menemukan sumber data.

D. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud pada penelitian ini adalah manajemen pengelolaan pembiayaan pendidikan dengan pelaku utama adalah orang-orang yang mengetahui persoalan manajemen madrasah, senioritas dan menguasai teknik-tehnik pembelajaran dan administrasi pendidikan.⁴² Subjek penelitian diambil berdasarkan sampling purposive dari sumber primer yaitu orang yang langsung memberikan data kepada peneliti. Beberapa informan yang bersesuaian dengan kriteria tersebut diatas adalah Kepala Sekolah, waka Kurikulum humas sarpras kesiswaan guru senior bendahara sekolah kepala tata usaha dan sumber sekunder yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti se[r]ti lewat dokumentasi.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor Mlarak Ponorogo. Data yang dikumpulkan ialah data yang berhubungan dengan focus penelitian yaitu perencanaan pembiayaan, pengorganisasian pembiayaan, pengaktualisasikan pembiayaan dan pengawasan dalam pembiayaan pendidikan.

E. Sumber data Penelitian

Sumber penelitian ini terfokus pada masalah manajemen pembiayaan pendidikan yaitu mengenai pendeskripsian dan penjelasan mengenai

⁴² Ibid., 28.

bagaimana manajemen pembiayaan di di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor Mlarak Ponorogo. Sasaran penelitian adalah kepala madrasah, guru, bendahara, komite madrasah, yayasan dan saiwa-siswi di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor Mlarak Ponorogo. Adapun objek penelitian adalah manajemen pembiayaan pendidikan di di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor Mlarak Ponorogo. Termasuk penganggaran pelaksanaan dan pengevaluasian khususnya di bidang manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah sebagai sumber pendanaan, pengelolaan di bidang pembiayaan dan laporan pertanggungjawaban baik interb di madrasah sendiri yayasan dan komite madrasah maupun ektern di tingkat kementrian agama Ponorogo.

Adapun sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya pertama kali dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang spesifik untuk suatu tujuan penelitian atau studi.⁴³ Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, survei, pengamatan, atau eksperimen.

Sementara itu, data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau sumber lain untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan penelitian atau studi Anda. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber seperti jurnal, buku, database, laporan, dan sumber lainnya.

Perbedaan utama antara data primer dan data sekunder adalah cara data tersebut diperoleh. Data primer dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau pengamat, sedangkan data sekunder dikumpulkan oleh orang lain atau sumber lain. Data primer cenderung lebih spesifik dan relevan untuk tujuan penelitian atau studi tertentu, sementara data sekunder cenderung lebih umum dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan.

Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan pengamatan terhadap dokumen pendukung pelaksanaan pembiayaan seperti EDM, RKM, RKTm, DAN RAKM serta wawancara terhadap pihak terkait dengan manajemen pembiayaan dan kemudian melakukan pengamatan secara lebih mendalam terhadap bukti fisik dan menyimpulkan mengenai hasil

⁴³ John W Creswell, *Reseach Dessign Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 79.

penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi manajemen pembiayaan pendidikan. Data sekunder diperoleh dari data tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa-siswi khususnya pada unit manajemen dokumen pendukung, pendidik siswa-siswi terutama mengenai manajemen pembiayaan pendidikan madrasah yang termasuk kedalam komponen-komponen yang ada dalam teori dan kemudian di implementasikan pada kegiatan penelitian di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor.

F. Prosedur pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁴ Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penjelasan tentang peran peneliti akan turut menentukan penjelasan tentang masalah-masalah yang mungkin muncul dalam proses pengumpulan data. Langkah langkah pengumpulan data meliputi mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur dokumentasi.⁴⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara atau interview dokumentasi dan observasi yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode wawancara

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau responden.⁴⁶ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 308.

⁴⁵ Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, 266.

⁴⁶ Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 82.

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam wawancara akan terjadi Tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berpijak pada tujuan peneliti.

Jadi wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, wawancara harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh dari data sebanyak-banyaknya, bahasa harus jelas terarah dan suasana yang rileks agar data yang diperoleh objektif dan dapat dipercaya.⁴⁷

Percakapan dilakukan oleh dua pihak pewawancara dan yang diwawancarai. Dalam wawancara kualitatif peneliti dapat melakukan face to face interview (wawancara berhadap-hadapan)

Dengan partisipan mewawancarai mereka langsung atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam kelompok tertentu).⁴⁸ Wawancara ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara tidak terstruktur, pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan sikap keyakinan subjek atau tentang keterangan-keterangan lainnya yang dapat diajukan secara bebas kepada informan..⁴⁹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit.

Dalam wawancara ini para subjek penelitian memahami bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud wawancara itu. Wawancara ini dimaksud untuk mendapatkan data umum tentang perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian dan pengawasan pada pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan pada madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor sedangkan wawancara terstruktur

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 271.

⁴⁸ Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, 267.

⁴⁹ Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 85.

adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Semua subjek mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum mengadakan wawancara dengan subjek penelitian, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan dijadikan pedoman bagi peneliti dalam mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian.

Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi sekaligus konfirmasi terhadap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan serta pengawasan pembiayaan pendidikan di Madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor Mlarak Ponorogo. Wawancara dilakukan dengan Kepala Madrasah, waka humas, waka kurikulum, guru senior, Bendahara madrasah dan kepala tata usaha. Kemudian hasil data wawancara dianalisis untuk mendiskripsikan proses manajemen pembiayaan pendidikan madrasah tersebut.⁵⁰

2. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian, observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.⁵¹

Observasi langsung dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus di adakan. Sedang observasi tidak langsung dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat. Pelaksanaannya dapat berlangsung didalam situasi yang sebenarnya maupun didalam situasi buatan. Observasi sebagai metode pengumpulan data dapat mencapai hasil yang baik apabila observasi dilaksanakan berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sudah ada, antara lain :

- a. Terlebih dahulu menetapkan bahwa metode observasi adalah metode yang tepat untuk penelitian ini.

⁵⁰ Ibid., 87.

⁵¹ Ibid., 96.

- b. Mulai merinci semua unsur data, misalnya sifat dan banyaknya dan unsur-unsur lain yang mungkin penting untuk digunakan dalam penelitian.
- c. Bila jumlah data dan jenisnya telah jelas mana yang harus digunakan dan dikumpulkan maka perlu difikirkan bagaimana cara mencatat dan menyusun data tersebut.
- d. Mengadakan observasi untuk pengumpulan data.⁵²

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi, sehingga akan diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian keadaan suatu kala bertingkat.⁵³ Sanafiah faisal dalam sugiono mengklarifikasi observasi menjadi : observasi partisipatif, observasi terang-terangan dan tersamar, dan observasi tak berstruktur. Dan masing-masing pengertian dari masing –masing observasi diatas adalah:⁵⁴

- a. Observasi partisipatif: Jenis observasi di mana peneliti secara aktif terlibat dalam situasi yang diamati. Peneliti menjadi bagian dari kelompok yang diamati, dan mencatat pengalaman yang dialami oleh anggota kelompok tersebut. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman yang dialami oleh anggota kelompok, namun bisa mempengaruhi dinamika kelompok karena kehadiran peneliti.
- b. Observasi terang-terangan dan tersamarkan: Observasi terang-terangan (*overt observation*) adalah jenis observasi di mana peneliti memperkenalkan diri sebagai peneliti dan menjelaskan tujuan observasi kepada peserta yang diamati. Sedangkan observasi

⁵² Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 2015), 97.

⁵³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 272.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 322.

tersamarkan (*covert observation*) adalah jenis observasi di mana peneliti menyamar dan tidak memperkenalkan diri sebagai peneliti kepada peserta yang diamati. Observasi terang-terangan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan persetujuan dari peserta, namun dapat mempengaruhi perilaku peserta. Sementara observasi tersamarkan dapat memberikan gambaran yang lebih natural dari kegiatan yang diamati, namun melibatkan masalah etis karena peneliti tidak memberikan informasi yang cukup kepada peserta.

- c. Observasi tak berstruktur: Jenis observasi di mana peneliti tidak memiliki daftar pertanyaan atau topik tertentu yang akan diamati. Peneliti hanya mencatat informasi yang menurutnya penting, termasuk interaksi antar anggota kelompok, aktivitas fisik, bahasa tubuh, dan detail lainnya yang mungkin relevan dengan topik penelitian. Observasi tak berstruktur memungkinkan peneliti untuk menangkap informasi yang mungkin tidak terlihat dalam observasi struktur, namun membutuhkan keterampilan interpretasi yang lebih besar untuk menganalisis hasil observasi tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terstruktur kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti. Tetapi suatu saat peneliti juga tidak terstruktur atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mencatat dan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ingin diketahui peneliti.⁵⁵

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor untuk melihat lebih

⁵⁵ Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, 267.

dekat kegiatan yang dilakukan. Teknik ini digunakan untuk menggali data dari objek penelitian. Subjeknya adalah Kepala Madrasah, waka kurikulum, waka humas, waka kesiswaan bagian Tata usaha, Bendahara madrasah dan guru senior yang terlibat penyusunan RAPBM.

Objek dalam penelitian kualitatif adalah tempat dimana interaksi dalam situasi social sedang berlangsung, actor atau pelaku yang sedang memainkan peran tertentu dan kegiatan yang dilakukan oleh actor dalam situasi social yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi perencanaan, pengorganisasian, pengactualisasian dan pengawasan pada system manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah Diniyah Tarbiyatul Athfal Gontor, tujuannya untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengactualisasian dan pengawasan system manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dokumen merupakan sumber yang stabil, berguna sebagai bukti untuk pengujian seususai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi, dan hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap suatu yang diselidiki.⁵⁶

Peneliti membuat instrument dokumentasi yang berisi instansi variable-variabel yang akan didokumentasikan dengan menggunakan check list untuk mencatat variable yang sudah ditentukan dan tinggal membubuhkan tanda cek ditempat yang swsuai. Telaah dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber material.

Untuk memperoleh data tentang perencanaan pengorganisaian pengactualisasian dan pengawasan pembiayaan pendidikan di madrasah

⁵⁶ Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 163.

diniyah, peneliti menelaah dokumen yang dijadikan pedoman pelaksanaan pendidikan, sekala kebutuhan pendidikan madrasah data guru dan karyawan visi misi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah, mendokumentasikan buku-buku harian selama penelitian, meminta buku harian partisipan selama penelitian, menganalisis dokumen public, meminta foto partisipan, audit-audit dan rekaman.⁵⁷

G. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada oranglain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit melakukan sintesa menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada oranglain.⁵⁸

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilih-milih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada oranglain. Teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam proposal, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

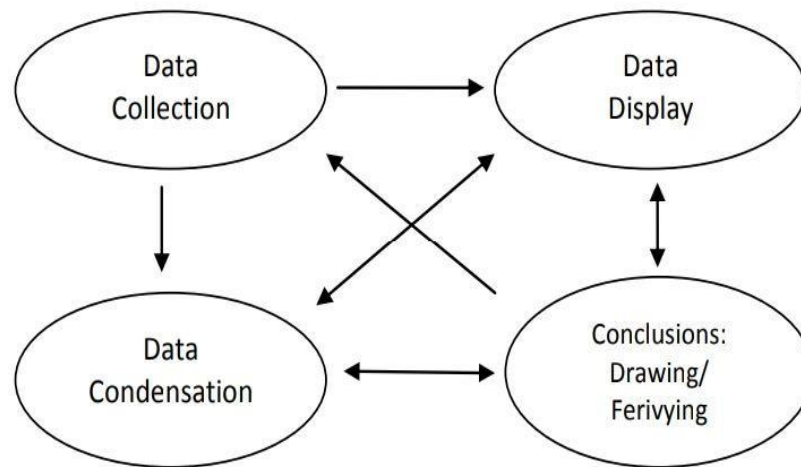
Dari hasil perolehan data maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh juga tepat. Dengan pengamatan terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali serta analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung dengan proses pengumpulan data.

Gambar 3.1

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 330.

⁵⁸ *Ibid.*, 334.

GAMBAR TEKNIK ANALISIS DATA



Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana

Adapun Langkah-langkah pengumpulan data menurut Saldaña adalah :

1. Menentukan pertanyaan penelitian

Menentukan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik yang dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun caranya adalah:⁵⁹

- a. Tentukan tujuan wawancara: Pertanyaan wawancara harus didasarkan pada tujuan wawancara. Jadi, pastikan tujuan wawancara telah ditetapkan dengan jelas sebelum membuat pertanyaan.
- b. Tentukan topik: Tentukan topik yang ingin dibahas dalam wawancara, kemudian buat pertanyaan yang relevan dengan topik tersebut.
- c. Buat pertanyaan terbuka: Buat pertanyaan terbuka yang memberikan kesempatan pada responden untuk menjelaskan pandangan mereka secara rinci dan detail. Pertanyaan terbuka juga memungkinkan responden untuk memberikan jawaban yang lebih personal.

⁵⁹ Ibid.

- d. Hindari pertanyaan ganda: Hindari pertanyaan yang terlalu rumit atau ganda, karena bisa membingungkan responden dan membuat jawaban mereka tidak jelas.
 - e. Hindari pertanyaan suggestif: Hindari pertanyaan yang terlalu suggestif, karena dapat mempengaruhi jawaban responden dan menghasilkan data yang bias.
 - f. Pastikan pertanyaan relevan: Pastikan pertanyaan yang dibuat relevan dengan tujuan penelitian dan topik yang dibahas dalam wawancara.
 - g. Uji coba pertanyaan: Sebelum melakukan wawancara, uji coba pertanyaan dengan beberapa responden terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pertanyaan tersebut jelas dan mudah dipahami.
 - h. Periksa kembali pertanyaan: Periksa kembali pertanyaan untuk memastikan bahwa pertanyaan tersebut tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan pada responden.
2. Memilih jenis data: Memilih jenis data yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Memilih data yang sesuai dengan pertanyaan peneliti adalah hal yang penting dalam penelitian karena hal tersebut dapat memastikan bahwa data yang diperoleh dapat memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.⁶⁰ Berikut adalah beberapa cara untuk memilih data yang sesuai dengan pertanyaan peneliti:

- a. Tentukan pertanyaan penelitian yang spesifik dan jelas: Pertanyaan penelitian yang spesifik dan jelas dapat membantu dalam menentukan jenis data yang diperlukan.
- b. Tentukan kriteria inklusi dan eksklusi data: Kriteria inklusi dan eksklusi data dapat membantu dalam membatasi jenis data yang dibutuhkan dan memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan pertanyaan penelitian.

⁶⁰ Ibid., 335.

- c. Lakukan pencarian data yang sistematis: Pencarian data yang sistematis dapat membantu dalam menemukan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Carilah data dari sumber-sumber yang terpercaya dan relevan dengan topik penelitian.
 - d. Identifikasi dan evaluasi data: Identifikasi dan evaluasi data adalah proses mengidentifikasi data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan mengevaluasi kualitas data tersebut. Pastikan data yang diperoleh memiliki kualitas yang baik dan dapat dipercaya.
 - e. Analisis data: Analisis data adalah proses mengorganisasi dan memeriksa data untuk menentukan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Lakukan analisis data dengan hati-hati untuk memastikan bahwa jawaban yang diperoleh relevan dengan pertanyaan penelitian.
 - f. Interpretasi data: Interpretasi data adalah proses memahami dan menjelaskan hasil analisis data. Pastikan interpretasi data yang dilakukan terkait dengan pertanyaan penelitian dan jawaban yang telah ditemukan
3. Memilih teknik pengumpulan data: Memilih teknik pengumpulan data yang sesuai untuk jenis data yang akan dikumpulkan.⁶¹
 4. Mengumpulkan data: Melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik yang telah dipilih.
 5. Mereduksi data: Mereduksi data dengan menyaring data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan menghilangkan data yang tidak relevan.
 6. Menampilkan data: Menampilkan data yang telah direduksi dengan menggunakan teknik tertentu, seperti membuat tabel atau diagram.
 7. Menganalisis data: Menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis yang sesuai dengan jenis data yang diperoleh.
 8. Menarik kesimpulan: Menarik kesimpulan dari hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Adapun caranya adalah:⁶²

⁶¹ Ibid., 336.

- a. Interpretasikan hasil analisis data: Langkah pertama dalam menarik kesimpulan adalah memahami hasil analisis data dengan baik. Identifikasi pola dan temuan utama dari data dan kaitkan dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.
 - b. Evaluasi kualitas data: Sebelum menarik kesimpulan, pastikan bahwa data yang digunakan berkualitas baik dan dapat dipercaya. Pertimbangkan faktor-faktor seperti keandalan, validitas, dan keabsahan data.
 - c. Analisis data tambahan: Selain analisis data utama, lakukan analisis data tambahan seperti analisis sub-grup atau analisis perbedaan untuk memperoleh wawasan tambahan.
 - d. Membandingkan hasil dengan literatur: Bandingkan hasil penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya atau literatur terkait untuk memahami implikasi temuan Anda dalam konteks yang lebih luas.
 - e. Pertimbangkan batasan penelitian: Pertimbangkan batasan penelitian dan kemungkinan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dan kesimpulan.
 - f. Hindari kesimpulan yang berlebihan: Hindari menarik kesimpulan yang berlebihan atau tidak didukung oleh data. Pastikan bahwa kesimpulan yang diambil didukung oleh analisis data yang valid dan dapat dipercaya.
 - g. Sajikan kesimpulan secara jelas: Sajikan kesimpulan secara jelas dan singkat dengan mengacu pada pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Jelaskan implikasi temuan Anda dalam konteks yang lebih luas dan saran untuk penelitian selanjutnya.
9. Periksa kredibilitas: Periksa kredibilitas hasil penelitian dengan menggunakan teknik tertentu, seperti triangulasi data. Data disebut kredibel apabila:⁶³
- a. Konsistensi: Analisis data yang kredibel harus konsisten dengan tujuan penelitian dan metode yang digunakan. Hasil analisis harus

⁶² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 237.

⁶³ *Ibid.*, 238.

- sesuai dengan pertanyaan penelitian dan metode pengumpulan data.
- b. Keandalan: Data yang digunakan harus diambil dari sumber yang dapat dipercaya dan diuji keandalannya. Perlu ada kontrol yang memadai terhadap kesalahan dalam pengumpulan data, seperti dengan menguji kembali data atau membandingkannya dengan sumber data lain.
 - c. Validitas: Analisis data yang kredibel harus valid atau benar-benar merepresentasikan apa yang ingin diukur atau dijelaskan. Perlu ada uji validitas dalam metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan hasil analisis yang dilakukan.
 - d. Objektivitas: Analisis data yang kredibel harus objektif dan tidak terpengaruh oleh opini atau bias peneliti. Peneliti harus berusaha untuk menghindari bias dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dalam interpretasi data.
 - e. Reprodusibilitas: Hasil analisis data harus dapat direproduksi oleh orang lain yang menggunakan metode dan data yang sama. Dengan kata lain, analisis data harus dijelaskan dengan jelas dan detail sehingga orang lain dapat melakukan analisis yang sama dan mendapatkan hasil yang sama.
 - f. Keterbukaan: Analisis data yang kredibel harus transparan dan terbuka untuk pengawasan dan kritik dari orang lain. Semua sumber data, metode, dan analisis harus dijelaskan secara detail dan dapat diakses oleh orang lain.
10. Melaporkan hasil penelitian: Melaporkan hasil penelitian dengan menggunakan format yang sesuai dan menarik bagi pembaca. Adapun langkah-langkah umumnya dalam melaporkan penelitian adalah:⁶⁴
- a. Pendahuluan: Tuliskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual penelitian.

⁶⁴ Ibid.

- b. Metode penelitian: Jelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sampel yang digunakan, dan analisis data yang dilakukan.
- c. Hasil penelitian: Deskripsikan hasil penelitian secara sistematis sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Sajikan temuan dengan menggunakan grafik, tabel atau diagram untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian.
- d. Pembahasan: Analisis temuan dan hubungannya dengan penelitian yang telah dilakukan. Jelaskan temuan yang menarik dan signifikan, bandingkan dengan penelitian sebelumnya, dan jelaskan bagaimana temuan ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang topik yang diteliti.
- e. Kesimpulan: Ringkas temuan dan jawab pertanyaan penelitian yang telah dijawab dalam penelitian ini. Jelaskan implikasi temuan bagi bidang yang diteliti dan saran untuk penelitian selanjutnya.
- f. Daftar pustaka: Cantumkan semua sumber yang digunakan dalam penelitian dalam format yang sesuai dengan gaya penulisan yang digunakan.
- g. Lampiran: Sertakan lampiran yang diperlukan, seperti kuesioner, daftar pertanyaan, dan informasi tambahan lainnya yang mendukung hasil penelitian.

Penting untuk memastikan bahwa laporan hasil penelitian disusun secara sistematis dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, pastikan bahwa laporan tersebut memenuhi standar akademik dan etika penelitian yang berlaku.

Dengan demikian gambaran tentang pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan madrasah diniyah dapat dijelaskan sehingga dapat mengetahui sejauh mana penerapan dan pemenuhan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian dan pengawasan dalam manajemen pembiayaan pendidikan dan implementasi pelaksanaannya dapat diketahui secara efektif dan efisien dan produktifitasnya dapat dikontrol serta

diharapkan mampu memberikan sumbangsih solusi terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi lembaga dalam pelaksanaan mengelola madrasah khususnya di bidang manajemen pembiayaan pendidikan agar seterusnya dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan manajemen madrasah sehingga dapat bersaing dengan lembaga lain.

H. Pengecekan keabsahan data.

Pengecekan keabsahan temuan kemudian dilakukan pada saat data telah diperoleh dan diselesaikan ketika membuat laporan dalam bentuk tesis. Dalam penelitian kualitatif kegiatan pengujian keabsahan data merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Pelaksanaan pengujian keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu:⁶⁵

1. Keterpercayaan

Penelitian yang kredibel adalah penelitian yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk memperkaya pemahaman kita tentang topik yang diteliti. Penting untuk memastikan bahwa penelitian memenuhi kriteria-kriteria agar hasilnya dapat dianggap valid dan dapat diandalkan diantara kriteria itu adalah:

- a. Validitas: Penelitian tersebut menggunakan instrumen yang valid atau akurat untuk mengukur variabel yang diteliti.
- b. Reliabilitas: Penelitian tersebut memperlihatkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan.
- c. Objektivitas: Penelitian tersebut tidak terpengaruh oleh pandangan atau kepentingan subjektif peneliti dan tidak mengandung bias.
- d. Relevansi: Penelitian tersebut memiliki relevansi yang tinggi dengan topik yang diteliti dan memberikan kontribusi bagi bidang ilmu pengetahuan.
- e. Transparansi: Penelitian tersebut mempublikasikan semua informasi penting tentang metode, sampel, dan analisis data yang digunakan.
- f. Reprodusibilitas: Penelitian tersebut dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan menggunakan metode yang sama atau serupa.

⁶⁵ Susilo, *Metodologi Penelitian*, 58.

Peneliti merupakan instrument penelitian dalam penelitian kualitatif sehingga sangat mungkin dalam pelaksanaan penelitian di lapangan terjadi kecondongan. Agar data yang diperoleh dapat terhindar dari hal tersebut maka perlu di uji derajat keterpercayaan. Uji kredibilitas data terhadap hasil penelitian antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan member cek.

2. Transferabilitas

Transferabilitas atau keteralihan dalam penelitian kualitatif dapat dicapai karena adanya kesamaan antara konteks pemberi informasi dengan penerima.⁶⁶ Nilai transfer ini berkenaan dengan pertayaan hingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk mengalihkan tersebut peneliti menyediakan data deskriptif secukupnya dalam membuat kesimpulan suatu penemuan. Oleh karena itu supaya oranglain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci jelas dan sistematis dan dapat dipercaya. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelas semacam apa suatu penelitian dapat diberlakukan maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas

Standar transferabilitas dalam penelitian mengacu pada kemampuan suatu penelitian untuk ditransfer atau diterapkan pada situasi atau konteks yang berbeda. Sebuah penelitian dapat dikatakan memiliki standar transferabilitas yang tinggi jika temuan dan hasil penelitiannya dapat diterapkan pada populasi atau situasi yang berbeda dengan hasil yang sama atau serupa.

Beberapa ciri-ciri sebuah penelitian yang memiliki standar transferabilitas yang tinggi antara lain:⁶⁷

⁶⁶ Ibid., 74.

⁶⁷ Ibid., 75.

- a. Relevansi Kontekstual: Penelitian tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan konteks atau situasi yang spesifik, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke situasi lain.
- b. Deskripsi yang Detail: Penelitian tersebut memberikan deskripsi yang detail mengenai konteks dan karakteristik partisipan atau responden, sehingga memudahkan penerapan hasil penelitian pada situasi lain.
- c. Kredibilitas yang Tinggi: Penelitian tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga hasil penelitiannya dapat dipercaya dan diandalkan pada situasi atau konteks yang berbeda.
- d. Kualitas Interpretasi: Penelitian tersebut memberikan interpretasi yang berkualitas dari temuan atau hasil penelitian, sehingga memudahkan pemahaman dan penerapan hasil penelitian pada situasi lain.
- e. Fleksibilitas: Penelitian tersebut memperlihatkan fleksibilitas dalam mengadaptasi metodologi atau strategi penelitian pada situasi yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat diaplikasikan pada situasi lain.

Dengan memperhatikan ciri-ciri di atas, seorang peneliti dapat menentukan apakah hasil penelitiannya dapat diterapkan pada situasi atau konteks yang berbeda atau tidak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik di luar konteks atau situasi yang diteliti.

3. Dependabilitas

Dependabilitas dalam penelitian mengacu pada konsistensi atau keandalan hasil penelitian yang dihasilkan. Penelitian yang dependabel harus dapat dipercaya dan diandalkan, sehingga hasilnya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkontrol dan dapat diulang dengan metode yang sama atau serupa. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh peneliti agar tidak terjadi dependabilitas adalah.⁶⁸

⁶⁸ Ibid.

- a. Konsistensi Pengumpulan Data: Peneliti harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan selalu konsisten dan diambil dengan metode yang sama atau serupa.
- b. Menggunakan Teknik dan Instrumen yang Konsisten: Peneliti harus menggunakan teknik dan instrumen yang sama atau serupa dalam pengumpulan dan pengolahan data, sehingga hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkontrol.
- c. Rekam Jejak Peneliti: Peneliti harus mencatat setiap langkah yang diambil dalam penelitian dan membuat catatan tentang setiap pengambilan data atau keputusan penting yang diambil dalam penelitian. Hal ini dapat membantu untuk meminimalkan bias atau kesalahan yang mungkin terjadi selama penelitian.
- d. Melakukan Cek Ganda: Peneliti harus melakukan cek ganda atau verifikasi data dan hasil penelitian untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil penelitian.
- e. Melibatkan Responden: Peneliti harus melibatkan responden dalam setiap tahap penelitian dan memastikan bahwa mereka memahami tujuan penelitian dan cara kerja penelitian. Hal ini dapat membantu untuk meminimalkan bias atau kesalahan yang mungkin terjadi selama pengumpulan data.
- f. Refleksi Diri: Peneliti harus melakukan refleksi diri terhadap setiap keputusan atau tindakan yang diambil selama penelitian, dan mempertimbangkan implikasi dan konsekuensi dari setiap keputusan atau tindakan yang diambil.

Dengan melakukan tindakan-tindakan di atas, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitiannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkontrol dan dapat dipercaya dan diandalkan.

Dependabilitas atau ketergantungan dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi penemuan dan pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Suatu penelitian yang reliable apabila oranglain dapat mengulangi penelitian tersebut. Uji dependabilitas

dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada maka penelitian tersebut tidak reliable

4. Objektivitas

Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang.⁶⁹ Konfirmabilitas atau kepastian diperlukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh objektif atau tidak, kesalihan data yang diperoleh secara objektif tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan temuan seseorang. Jika data tersebut telah disepakati oleh beberapa atau banyak orang maka dapat dikatakan objektif namun penekanannya pada datanya. Dalam penelitian kualitatif uji confirmability mirip dengan uji dependability sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila peneliti merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Dalam penelitian jangan sampai ada proses tidak ada tetapi hasilnya ada.

Selanjutnya pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain dari luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi juga bisa diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lain. Pelaksanaannya dengan melakukan pengecekan data hasil wawancara kepada madrasah, dari kepala madrasah, komite, guru senior, kepala tata usaha bendahara madrasah dan yang lainnya. Lebih lanjut menurut Creswell triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat

⁶⁹ Trianto, *Pengantar Penelitian Bagi Pengembangan Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan* (Jakarta: Kencana, 2016), 294.

yang berbeda dalam metode kualitatif. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan triangulasi:⁷⁰

- a. Menentukan Tujuan Penelitian: Peneliti harus menentukan tujuan penelitian dan alasan mengapa triangulasi diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Memilih Sumber Data: Peneliti harus memilih sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Sumber data dapat berupa dokumen, wawancara, observasi, atau kombinasi dari beberapa teknik pengumpulan data.
- c. Mengumpulkan Data: Peneliti harus mengumpulkan data dari setiap sumber yang telah dipilih. Data yang diperoleh harus sesuai dengan tujuan penelitian dan dipilih dengan hati-hati.
- d. Analisis Data: Setelah data dikumpulkan, peneliti harus menganalisis data dari setiap sumber dengan menggunakan teknik analisis data yang sesuai. Peneliti harus memperhatikan perbedaan dan persamaan dalam data yang diperoleh dari setiap sumber.
- e. Menentukan Konsistensi Data: Peneliti harus menentukan konsistensi data yang diperoleh dari setiap sumber. Jika data tidak konsisten, maka peneliti harus mencari tahu penyebabnya dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki konsistensi data.
- f. Integrasi Data: Setelah data dianalisis dan konsistensi data ditentukan, peneliti harus mengintegrasikan data dari setiap sumber untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan valid. Proses ini melibatkan membandingkan dan memvalidasi data dari setiap sumber dan membuat interpretasi yang tepat dari data yang diperoleh.
- g. Melakukan Kesimpulan: Setelah data diintegrasikan, peneliti harus membuat kesimpulan yang didasarkan pada data dari setiap sumber. Kesimpulan harus mencerminkan temuan yang paling konsisten dari setiap sumber.⁷¹

Dengan melakukan triangulasi, peneliti dapat memastikan

⁷⁰ Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*, 330.

⁷¹ *Ibid.*, 331.

bahwa hasil penelitiannya lebih akurat dan valid karena didukung oleh data dari beberapa sumber atau teknik pengumpulan data yang berbeda. Selanjutnya data yang diperoleh dapat dideskripsikan, dikelompokkan, berdasarkan pandangan yang sama, berbeda dan spesifik dari beberapa sumber tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran objek penelitian

Menurut penuturan Ust. Muslih S.Pd sebagai guru senior dan sepuh, Madrasah ini didirikan pada tahun 1957 (sesuai piagam DEPAG) oleh masyarakat desa Gontor yang kebanyakan adalah guru-guru dan tokoh masyarakat. Desa Gontor yang sangat peduli akan perkembangan keagamaan, yang mana pelajaran agama disekolah umum sangat kurang. Yang pada awal mula berdirinya terletak di Gedung Satelit yaitu gedung yang paling jauh tempatnya dari pusat pendidikan pondok Modern Gontor.⁷² Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) adalah merupakan lembaga pendidikan Islam.; diawali dengan program pendidikan anak-anak untuk masyarakat Gontor dan terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat. Wali Murid dari madrasah tersebut mayoritas bekerja sebagai petani, pedagang buruh tani, tukang bangunan, ojek dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan anak terabaikan pendidikannya dikarenakan orang tuanya sibuk dalam bekerja maka disaat sore hari mereka sangat perlu menambah ilmu terutama ilmu agama dengan harapan kelak menjadi anak yang baik dan berguna dan berakhlak Qur'anul karim.

Dalam usianya yang ke 58 ini Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) telah mempunyai murid/santri yang berjumlah 225 sebelum covid 19 dan setelah covid 19 berjumlah menjadi 148 dan yang aktif sampai sekarang ini berjumlah 94 orang siswa dan siswi. Untuk menampung jumlah santri yang sedemikian banyaknya maka Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) melaksanakan pembangunan gedung untuk kelas, pembangunan pergedungan ini sendiri merupakan salah satu dari Program Panca Jangka Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA). Karena semakin banyaknya santri yang belajar di Madrasah tersebut, maka kelas yang tersedia untuk belajar menjadi tidak mencukupi, Sebagai aktualisasi dari cita-cita pendirinya yaitu menjadikan Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) ini sebagai lembaga

⁷² Wawancara, Muslih, Manajemen Pembiayaan Madin, February 3, 2023.

pendidikan Islam yang melahirkan generasi Islam *rahmatan lil'alam*, maka dibekalilah santri-santrinya dengan keilmuan, keIslaman dan kemasyarakatan, serta prinsip-prinsip hidup agar menjadi kader Umat yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas dengan berkhidmat kepada masyarakat dalam aplikasi pendidikannya, Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) menyelenggarakan jenjang pendidikan formal setingkat sekolah dasar, sedangkan diluar formalitas jenjang tersebut, lembaga ini juga membina masyarakat, baik langsung oleh Guru dan siswa maupun oleh para alumninya.⁷³

1. VISI

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang melahirkan kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah, serta menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam, bahasa Al-Qur'an, dan ilmu pengetahuan umum untuk kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat.

2. MISI

- a. Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat.
- b. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek.
- c. Mempersiapkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT.

3. TUJUAN

- a. Terwujudnya generasi mukmin muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengerahuan luas, dan berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat.⁷⁴
- b. Melahirkan ulama yang intelek yang memiliki keseimbangan zikir dan pikir.
- c. Mewujudkan warga Negara yang berkepribadian Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Dokumen Kurikulum, Diakses pada tanggal 3, bulan Februari, Tahun 2023

4. PENYELENGGARA

Pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan ini sepenuhnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) Gontor yang berpusat di desa Gontor, Ponorogo, Jawa Timur; Seluruh pimpinan dan pengajarnya dari Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) Gontor.

5. SISTEM

Lembaga pendidikan ini menggunakan sistem klasikal; dimana siswa belajar dalam kelas-kelas. Dengan cara demikian pendidikan dapat dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh komponen tripusat pendidikan, serta lebih komprehensif karena meliputi bidang keilmuan (*intellectual quotion*), keislaman (*spiritual quotion*), dan kemasyarakatan (*emotional quotion*).

6. JENJANG

Jenjang pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan oleh Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) Pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun (program regular) untuk Sekolah Dasar dan yang sederajat

7. KURIKULUM

Kurikulum ini dibagi menjadi dua bidang, yaitu pengajaran (intrakurikuler) dan pengasuhan (ekstrakurikuler).⁷⁵

a. Intrakurikuler

Dalam bidang pengajaran atau intrakurikuler, kurikulum di lembaga ini di terapkan secara seimbang antara ilmu agama dan umum, sebagaimana terlihat pada bidang-bidang berikut: Bahasa Arab, Dirasah Islamiyah dan Ilmu Pasti.

b. Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler dalam lembaga ini antara lain meliputi:

- 1) Kegiatan berorganisasi

⁷⁵ Dokumen Kurikulum, Ibid.

- 2) Kegiatan kepramukaan
- 3) Kegiatan olahraga
- 4) Kegiatan ketrampilan
- 5) Kegiatan kesenian
- 6) Kegiatan koperasi

8. PANCA JANGKA

Perencanaan program pendidikan dan pengajaran di lembaga ini mengacu kepada Panca Jangka Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) Gontor yang meliputi bidang-bidang;

a. Pendidikan dan Pengajaran

- 1) Pembinaan mental dan moral
- 2) Pembinaan pemahaman, keyakinan, dan pengamalan keagamaan.
- 3) Pembinaan ketrampilan hidup
- 4) Pembinaan keseimbangan kualitas pikir dan zikir
- 5) Penyelenggaraan proses pembelajaran secara klasikal pada sore hari
- 6) Penyelenggaraan belajar terstruktur di luar kelas pada waktu-waktu tertentu
- 7) Penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam masalah-masalah akademik dan non akademik.⁷⁶

b. Kaderisasi

- 1) Pengiriman tenaga akademik mengikuti pelatihan, penataran, dan kegiatan-kegiatan sejenis untuk meningkatkan kualitas.
- 2) Perekrutan calon-calon pelajar secara selektif berdasarkan kriteria tertentu.
- 3) Pengiriman pelajar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) Gontor

c. Pergedungan

Program pada bidang ini adalah pengadaan prasarana dan

⁷⁶ Ibid

sarana untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran

d. Chizanatullah/Pendanaan

Dana untuk Lembaga pendidikan ini dihimpun dari berbagai sumber, baik pemerintah maupun swasta, institusi maupun pribadi yang halal dan tidak mengikat. Di samping itu diupayakan pengadaan dana mandiri dengan mengelola koperasi dan usaha-usaha produktif lainnya.

e. Kesejahteraan keluarga

Keluarga, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran ini, perlu dipikirkan dan diperhatikan kesejahteraannya dengan berbagai cara agar mereka bisa mandiri dan tidak semata-mata bergantung kepada Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA).⁷⁷

9. KEGIATAN

a. Kegiatan Pengajaran (Intrakurikuler)

Kegiatan pengajaran ini terdiri dari kegiatan harian, mingguan, dan tengah tahunan, ditangani oleh kepala Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) Gontor

1. Kegiatan Harian meliputi:

- a. Supervisi proses pengajaran.
- b. Pengecekan persiapan belajar mengajar.
- c. Pengawasan disiplin masuk.
- d. Pengontrolan kelas saat pelajaran berlangsung.
- e. Belajar dan mengajar di kelas dari jam 14.00 s/d 16.30 WIB
- f. Pengontrolan sholat ashar berjamaah.
- g. Pengontrolan baca Al-Qur'an setelah sholat Ashar

2. Kegiatan Mingguan

- a. Latihan kepramukaan
- b. Latihan pidato

3. Kegiatan Tengah Tahunan

⁷⁷ Wawancara, Kepala Madrasah, February 2023

- a. Program tengah tahunan di Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) Gontor adalah ujian semester I dan II
- b. Perkemahan Tahunan Madrasah Tarbiyatu-l-Athfal (MTA) Gontor
- c. Peringatan hari-hari besar Islam

b. Kegiatan Harian

Kegiatan ini ditangani oleh dewan guru Madrasah Tarbiyatul Athfal, meliputi kegiatan harian dan mingguan.

Kegiatan Harian

NO	JAM	KEGIATAN
1	13.30-14.00	1. Persiapan belajar mengajar di MTA 2. Pembersihan kelas dan sekitar
2	14.30-15.00	Masuk kelas
3	15.00-15.45	1. Sholat Ashar berjamaah 2. Membaca Al-Qur'an 3. Istirahat
4	15.45-16.30	Masuk kelas
5	16.30	Pulang Sekolah

Tabel 4.1

Mingguan

NO	HARI	KEGIATAN
1	Sabtu	Belajar efektif
2	Ahad	Belajar efektif
3	Senin	Belajar efektif

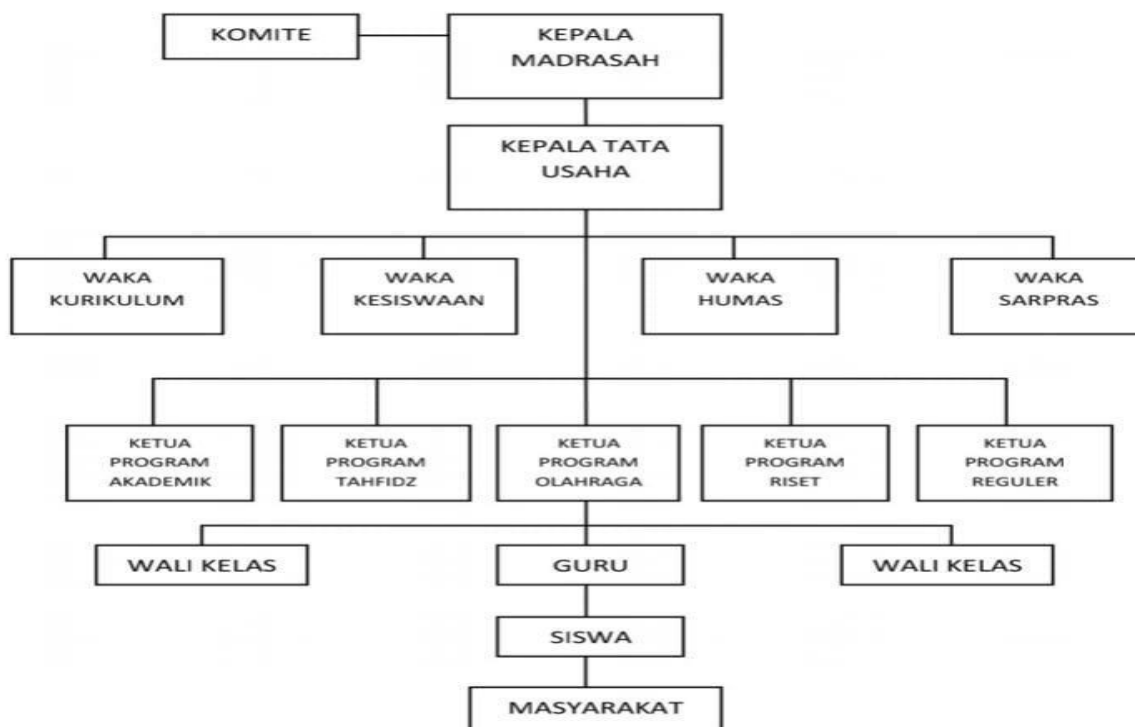
4	Selasa	Belajar efektif
5	Rabu	Belajar efektif
6	Kamis	Dua jam terakhir pelajaran digunakan untuk latihan pramuka atau muhadhoroh.
7	Jum'at	libur.

Tabel 4.2

Struktur organisasi Madrasah Diniyah⁷⁸

- Guru senior : Muslih S.Pd
- Kepala Madrasah : Heru Prasetyo S.Pd.
- Waka Kurikulum : Andi Ahmad Romdhoni S.Pd.
- Waka kesiswaan : Amin Fuadi
- Humas : Angga Hakam Al Jihad S.H
- Tata usaha : Sayidatul Lutfiah S.Kom
- Waka sarpras : Nurhadi S.H.
- : Sugeng Hariyadi

Struktur Organisasi



⁷⁸ Dokumentasi, Dokumen kurikulum, Februari 2023

Gambar 4.3

Tabel. Data murid tahun 2019-2020

KELAS	L	P	JUMLAH
I	20	25	45
II	20	22	42
III	18	20	38
IV	20	17	37
V	17	18	35
VI	13	15	28
JUMLAH	108	117	225

Tabel 4.4

Tabel data siswa tahun 2022-2023

KELAS	L	P	JUMLAH
I	15	20	35
II	13	15	28
III	12	13	25
IV	11	11	22
V	8	12	20
VI	8	10	18

JUMLAH	67	81	148
---------------	-----------	-----------	------------

Tabel 4.5

Daftar nama-nama guru

1. Heru Prasetyo S.Pd.I	Bahasa Arab
2. Andi Ahmad Romdhoni S.Pd.I	Mahfudhot
3. H. Amiruddin S.Ag	Aqoid
4. Muslih S.Pd	Al Qur'an dan Tajwid
5. Amin Fuadi	Fikih
6. Heru Prasetiawan S.Pd.I	Hadist
7. Angga Hakam Al Jihad S.H	Bahasa Arab
8. Siti Qomariyah S.Pd	Berhitung
9. Nurhayati S.Ag	Hijaiyah
10. Siti Rubiyah S.Ag	Imla'
11. Nanik Setianingsih	Al Qur'an
12. Wahyuni	Amaliyah
13. Sayidatul Lutfiah S.Kom	Bahasa Indonesia
14. Heni Puspitasari S.Pd	Aqoid
15. Syamsiyati	Amaliyah
16. Anik Andriyani S.Pd	Imla'

c. Deskripsi Data Penelitian

1. Penganggaran pembiayaan pendidikan di Madin MTA Gontor

Persepsi mengenai persiapan perencanaan pembiayaan sebagai acuan untuk melaksanakan program pembiayaan pendidikan, dan langkah awal untuk merencanakan anggaran demi tercapainya tujuan yang dirancang di masa sekarang dan akan datang di Madin MTA Gontor yang sudah menjadi agenda yang tidak bisa untuk tidak dilakukan bahkan ini adalah tahapan yang sangat paling penting tentang perencanaan pembiayaan pendidikan.

Dari hasil wawancara dengan kepala MADIN Heru Prasetyo S.Pd.I mengatakan bahwa:⁷⁹

“Sebagai kepala madrasah diniyah, perencanaan pembiayaan pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah antara lain:

- 1) Biaya operasional: Merupakan biaya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan harian madrasah diniyah, seperti pembayaran gaji guru dan staf, pemeliharaan gedung dan fasilitas, serta pembelian perlengkapan dan bahan ajar.
- 2) Biaya pembangunan: Merupakan biaya yang diperlukan untuk membangun atau memperbaiki gedung dan fasilitas madrasah diniyah, seperti ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, dan tempat ibadah.
- 3) Biaya sosial: Merupakan biaya yang diperlukan untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu secara finansial, seperti beasiswa atau bantuan dana untuk keperluan pendidikan.
- 4) Sumber pembiayaan: Sumber pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti iuran siswa, sumbangan dari masyarakat atau yayasan, bantuan pemerintah, atau dana hasil pengelolaan aset madrasah.”

Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah, penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia agar dapat memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi siswa. Kepala madrasah diniyah juga perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran terkait dengan pendidikan memiliki manfaat yang seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, kepala madrasah diniyah perlu memantau dan mengevaluasi penggunaan dana secara teratur untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Waka kurikulum Andi Ahmad Romdhoni S.Pd.I mengatakan:⁸⁰

“Sebagai wakil kurikulum di madrasah diniyah, perencanaan pembiayaan pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan pada siswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah adalah:

⁷⁹ Wawancara, Heru Prasetyo, Manajemen Pembiayaan Madin, February 1, 2023.

⁸⁰ Wawancara, Andi Ahmad Romdhoni, Manajemen Pembiayaan Madin, February 8, 2023.

- a. Anggaran pengadaan bahan ajar: Madrasah diniyah perlu menyiapkan anggaran untuk membeli atau membuat bahan ajar yang dibutuhkan oleh siswa dan guru. Anggaran ini mencakup pengadaan buku, alat tulis, komputer, perangkat lunak, serta fasilitas dan perlengkapan pembelajaran lainnya.
- b. Anggaran pelatihan dan pengembangan guru: Madrasah diniyah perlu menyiapkan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan guru dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka dalam mengajar dan memperbarui pengetahuan mereka. Anggaran ini dapat mencakup biaya untuk pelatihan dan sertifikasi, serta untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.
- c. Biaya operasional: Madrasah diniyah perlu menyiapkan anggaran untuk biaya operasional, seperti biaya listrik, air, gas, dan bahan bakar. Biaya operasional juga mencakup biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas, serta biaya kebersihan.
- d. Biaya pengembangan infrastruktur: Madrasah diniyah perlu menyiapkan anggaran untuk pengembangan infrastruktur, seperti gedung baru, perluasan gedung, pengadaan peralatan, atau perbaikan fasilitas yang sudah ada. Anggaran ini harus direncanakan dengan cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan madrasah diniyah.
- e. Sumber pembiayaan: Madrasah diniyah dapat mengumpulkan sumber pembiayaan dari berbagai sumber, seperti iuran siswa, donasi dari masyarakat atau yayasan, bantuan pemerintah, atau dana hasil pengelolaan aset madrasah.”

Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah, wakil kurikulum perlu bekerja sama dengan kepala madrasah dan tim manajemen lainnya untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan tujuan strategis madrasah. Perencanaan pembiayaan pendidikan yang matang akan membantu madrasah diniyah mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Waka kesiswaan Amin Fuadi mengatakan:⁸¹

“Sebagai Wakil Kepala Bidang Kesiswaan di sekolah, perencanaan pembiayaan pendidikan berarti menyiapkan anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya di sekolah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan

⁸¹ Wawancara, Amin Fuadi, Manajemen Pembiayaan Madin, February 8, 2023.

pembiayaan pendidikan di sekolah antara lain:

- a. Biaya Pendidikan: Biaya pendidikan mencakup biaya yang diperlukan untuk membayar guru dan staf pendukung, membeli buku pelajaran dan bahan ajar, serta membiayai berbagai aktivitas belajar mengajar yang melibatkan siswa seperti laboratorium, pengadaan software, dan lain sebagainya.
- b. Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler: Biaya kegiatan ekstrakurikuler mencakup biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di luar kurikulum, seperti kegiatan olahraga, seni, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Biaya ini termasuk biaya transportasi, konsumsi, dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan.
- c. Biaya Kesehatan: Biaya kesehatan mencakup biaya yang diperlukan untuk memastikan kesehatan siswa, seperti biaya konsultasi medis, pembelian obat-obatan, dan pembayaran premi asuransi kesehatan.
- d. Biaya Keamanan: Biaya keamanan mencakup biaya untuk memastikan keselamatan siswa di sekolah, seperti biaya pemeliharaan dan perbaikan fasilitas, biaya pengadaan peralatan keamanan, dan biaya operasional satuan pengamanan.
- e. Sumber pembiayaan: Sumber pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dana sekolah, donasi dari masyarakat atau yayasan, bantuan pemerintah, atau dana hasil pengelolaan aset sekolah.”

Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah, wakil kepala bidang kesiswaan perlu bekerja sama dengan kepala sekolah dan tim manajemen lainnya untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan strategis sekolah. Perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik akan membantu sekolah mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Waka Humas Angga Hakam Al Jihad S.H mengatakan:⁸²

“Sebagai wakil kepala humas di madrasah diniyah, perencanaan pembiayaan pendidikan menjadi salah satu tugas penting dalam memastikan bahwa kegiatan pendidikan di madrasah dapat berjalan lancar dan berkualitas. Perencanaan pembiayaan pendidikan mencakup berbagai hal, di antaranya:

- a. Anggaran operasional: Anggaran operasional mencakup biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan harian di

⁸² Wawancara, Angga Hakam Al Jihad, Manajemen Pembiayaan Madin, February 10, 2023.

madrasah, seperti biaya gaji guru dan staf, biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas, serta biaya untuk pembelian perlengkapan sekolah dan bahan-bahan ajar.

- b. Kegiatan ekstrakurikuler: Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian penting dari pengembangan karakter dan potensi siswa di madrasah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler, termasuk biaya untuk pelatihan dan perlengkapan yang dibutuhkan.
- c. Biaya pelatihan dan pengembangan guru dan staf: Guru dan staf merupakan kunci keberhasilan pendidikan di madrasah. Perlu dipertimbangkan biaya untuk pelatihan dan pengembangan guru dan staf agar mereka dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pelayanan kepada siswa.
- d. Biaya promosi dan publikasi: Promosi dan publikasi merupakan bagian penting dalam mempromosikan madrasah dan menarik minat calon siswa baru. Perlu dipertimbangkan biaya untuk media promosi dan publikasi seperti brosur, website, dan media sosial.
- e. Sumber pembiayaan: Sumber pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti iuran siswa, sumbangan dari masyarakat atau yayasan, bantuan pemerintah, atau dana hasil pengelolaan aset sekolah.”

Perencanaan pembiayaan pendidikan yang matang akan membantu madrasah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan citra madrasah di masyarakat. Sebagai wakil kepala humas, perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran tepat sasaran dan transparan. Tata usaha Sayidatul Lutfiah S.Kom mengatakan.⁸³

“Sebagai kepala tata usaha di madrasah diniyah, perencanaan pembiayaan madrasah merupakan suatu proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya keuangan madrasah dengan tujuan untuk memastikan tersedianya dana yang cukup dan tepat guna dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pengembangan madrasah. Perencanaan pembiayaan madrasah mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. Anggaran operasional: Anggaran operasional meliputi pengeluaran rutin yang dibutuhkan oleh madrasah, seperti gaji dan tunjangan pegawai, biaya listrik, air, telepon, serta biaya pemeliharaan gedung dan fasilitas lainnya.

⁸³ Wawancara, Sayidatul Lutfiah, Manajemen Pembiayaan Madin, February 15, 2023.

- b. Pengadaan barang dan jasa: Madrasah perlu melakukan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, seperti buku-buku pelajaran, alat tulis, komputer, perlengkapan laboratorium, jasa perawatan taman dan kebersihan lingkungan sekolah, dan sebagainya.
- c. Pengembangan sumber daya manusia: Madrasah perlu melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia agar kualitas pendidikan dan pelayanan semakin baik. Pengeluaran dalam hal ini meliputi biaya pelatihan, seminar, dan workshop bagi guru dan staf.
- d. Kegiatan ekstrakurikuler: Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian penting dalam pengembangan karakter siswa. Madrasah perlu menyiapkan anggaran untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler, seperti kegiatan olahraga, seni, dan lain-lain.
- e. Investasi: Madrasah perlu melakukan investasi untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, seperti pembangunan gedung baru, renovasi ruang kelas, dan penambahan fasilitas lainnya.
- f. Sumber pembiayaan: Madrasah perlu mencari sumber pembiayaan yang memadai, seperti dana dari pemerintah, iuran siswa, sumbangan dari masyarakat atau yayasan, dan lain-lain.”

Perencanaan pembiayaan madrasah yang baik akan membantu madrasah dalam mengelola keuangan dengan efektif dan efisien serta memastikan tersedianya dana yang cukup untuk mendukung kegiatan pendidikan. Sebagai kepala tata usaha, saya perlu memastikan bahwa perencanaan pembiayaan madrasah dijalankan secara transparan dan akuntabel agar anggaran dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat guna.

2. Metode perencanaan pembiayaan pendidikan

Metode perencanaan pembiayaan pendidikan dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan dan lingkup perencanaan yang diinginkan. Namun, secara umum, terdapat beberapa metode yang sering digunakan dalam perencanaan pembiayaan pendidikan, antara lain:⁸⁴

- a. Metode *Top-Down*: Metode perencanaan dari atas ke bawah, yang umumnya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pusat yang

⁸⁴ Fatah, Nanang. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012. H. 87

mengatur pendidikan. Dalam metode ini, keputusan perencanaan dibuat oleh pihak yang berwenang di tingkat nasional atau regional, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan.

- b. Metode *Bottom-Up*: Metode perencanaan dari bawah ke atas, yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di tingkat sekolah atau madrasah, seperti kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, dan kepala tata usaha. Dalam metode ini, kebutuhan dan prioritas perencanaan ditentukan oleh pihak-pihak terkait di tingkat bawah, kemudian disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan di tingkat nasional atau regional.
- c. Metode Partisipatif: Metode perencanaan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, baik di tingkat nasional, regional, atau sekolah/madrasah. Dalam metode ini, keputusan perencanaan dibuat secara partisipatif dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari semua pihak terkait, termasuk guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar.
- d. Metode *Cost-Benefit Analysis*: Metode perencanaan yang menghitung manfaat dan biaya dari kegiatan atau program pendidikan yang akan dilaksanakan. Dalam metode ini, manfaat dari kegiatan pendidikan (seperti peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan nilai akademik, dan peningkatan keterampilan) dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam perencanaan pembiayaan pendidikan, biasanya digunakan kombinasi dari beberapa metode di atas, tergantung pada kebutuhan dan tujuan perencanaan yang ingin dicapai. Kepala Madrasah : Heru Prasetyo S.Pd. mengatakan:⁸⁵

“Sebagai kepala madrasah diniyah, saya harus menyusun metode pembiayaan pendidikan yang tepat agar dana yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan pendidikan. Berikut ini beberapa metode

⁸⁵ Wawancara, Heru Prasetyo, Manajemen Pembiayaan Madin.

pembiayaan pendidikan yang dapat saya terapkan:

- a. Biaya Operasional: Metode ini merupakan penggunaan dana untuk membiayai kegiatan operasional madrasah diniyah, seperti membayar gaji guru dan karyawan, membeli buku-buku pelajaran, memperbaiki fasilitas, dan sebagainya.
- b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Metode ini adalah penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada madrasah diniyah dalam rangka membantu biaya operasional. Dana ini biasanya bersifat reguler dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
- c. Dana Hibah: Metode ini adalah pemberian dana oleh pemerintah atau lembaga lain yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu, seperti perbaikan gedung sekolah atau pengadaan peralatan laboratorium.
- d. Dana Sumbangan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak-pihak lain untuk mendukung kegiatan pendidikan, seperti membangun gedung baru, memberikan beasiswa, atau memperbaiki fasilitas.
- e. Pembiayaan Lembaga Keuangan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari lembaga keuangan, seperti bank atau koperasi, untuk membiayai kegiatan pendidikan, misalnya dalam bentuk pinjaman atau kredit.”

Dalam memilih metode pembiayaan pendidikan yang tepat, saya harus mempertimbangkan kondisi keuangan madrasah diniyah, kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi, serta ketersediaan dan jenis sumber dana yang tersedia. Waka Kurikulum : Andi Ahmad Romdhoni S.Pd.I Mengatakan:⁸⁶

“Sebagai Waka Kurikulum, tugas saya adalah menyusun kurikulum dan menentukan kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk mendukung program pendidikan. Namun, terkait dengan metode pembiayaan pendidikan, tugas tersebut lebih menjadi tanggung jawab Kepala Tata Usaha atau Bagian Keuangan di dalam madrasah diniyah. Meskipun begitu, sebagai bagian dari tim manajemen madrasah diniyah, saya tetap harus memahami beberapa metode pembiayaan pendidikan yang dapat diterapkan, seperti:

- a. Biaya Operasional: Metode ini adalah penggunaan dana untuk membiayai kegiatan operasional madrasah diniyah, seperti membayar gaji guru dan karyawan, membeli buku pelajaran, memperbaiki fasilitas, dan sebagainya.

⁸⁶ Wawancara, Andi Ahmad Romdhoni, Manajemen Pembiayaan Madin.

- b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Metode ini adalah pemberian dana oleh pemerintah pusat atau daerah kepada madrasah diniyah dalam rangka membantu biaya operasional. Dana ini biasanya bersifat reguler dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
- c. Dana Hibah: Metode ini adalah pemberian dana oleh pemerintah atau lembaga lain yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu, seperti perbaikan gedung sekolah atau pengadaan peralatan laboratorium.
- d. Dana Sumbangan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak-pihak lain untuk mendukung kegiatan pendidikan, seperti membangun gedung baru, memberikan beasiswa, atau memperbaiki fasilitas.
- e. Pembiayaan Lembaga Keuangan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari lembaga keuangan, seperti bank atau koperasi, untuk membiayai kegiatan pendidikan, misalnya dalam bentuk pinjaman atau kredit.”

Dalam memilih metode pembiayaan pendidikan yang tepat, perlu dilakukan evaluasi kebutuhan dana dan sumber daya yang tersedia, serta pertimbangan terhadap kemampuan madrasah diniyah dalam mengelola keuangan. Waka kesiswaan : Amin Fuadi mengatakan:⁸⁷

“Sebagai Waka Kesiswaan, saya bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan siswa terpenuhi dan mengelola program-program ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya di madrasah diniyah. Berikut ini adalah beberapa metode pembiayaan pendidikan yang dapat diterapkan di madrasah diniyah:

- a. Biaya Pendidikan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari orang tua atau wali murid untuk membiayai pendidikan di madrasah diniyah. Biaya ini biasanya meliputi biaya registrasi, biaya pembelian buku pelajaran, biaya ujian, dan sebagainya.
- b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Metode ini adalah pemberian dana oleh pemerintah pusat atau daerah kepada madrasah diniyah dalam rangka membantu biaya operasional. Dana ini biasanya bersifat reguler dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan.
- c. Dana Hibah: Metode ini adalah pemberian dana oleh pemerintah atau lembaga lain yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang berkaitan dengan

⁸⁷ Wawancara, Amin Fuadi, Manajemen Pembiayaan Madin.

kesiswaan, seperti kegiatan ekstrakurikuler atau pembelian peralatan olahraga.

- d. Dana Sumbangan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak-pihak lain untuk mendukung kegiatan pendidikan, termasuk untuk kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan, seperti perbaikan fasilitas atau program beasiswa.
- e. Pembiayaan Lembaga Keuangan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari lembaga keuangan, seperti bank atau koperasi, untuk membiayai kegiatan pendidikan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan.”

Dalam memilih metode pembiayaan pendidikan yang tepat, perlu dilakukan evaluasi kebutuhan dana dan sumber daya yang tersedia, serta pertimbangan terhadap kemampuan madrasah diniyah dalam mengelola keuangan dan memastikan keberlangsungan program-program yang telah direncanakan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kebutuhan siswa dan program-program kesiswaan yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensi diri dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Humas Angga Hakam Al Jihad S.H mengatakan:⁸⁸

“Sebagai Humas Madrasah Diniyah, tugas saya adalah untuk mempromosikan dan memperkenalkan madrasah diniyah kepada masyarakat serta mengelola hubungan dengan media dan pihak-pihak terkait lainnya. Namun, saya juga perlu memahami metode pembiayaan pendidikan yang dapat diaplikasikan di madrasah diniyah. Berikut ini adalah beberapa metode pembiayaan pendidikan yang dapat diterapkan di madrasah diniyah:

- a. Biaya Pendidikan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari orang tua atau wali murid untuk membiayai pendidikan di madrasah diniyah. Biaya ini biasanya meliputi biaya registrasi, biaya pembelian buku pelajaran, biaya ujian, dan sebagainya.
- b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Metode ini adalah pemberian dana oleh pemerintah pusat atau daerah kepada madrasah diniyah dalam rangka membantu biaya operasional. Dana ini biasanya bersifat reguler dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi dan publikasi madrasah diniyah.

⁸⁸ Wawancara, Angga Hakam Al Jihad, Manajemen Pembiayaan Madin.

- c. Dana Hibah: Metode ini adalah pemberian dana oleh pemerintah atau lembaga lain yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang berkaitan dengan promosi dan publikasi madrasah diniyah, seperti pembelian peralatan promosi atau penyelenggaraan acara pembukaan atau pameran.
- d. Dana Sumbangan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak-pihak lain untuk mendukung kegiatan pendidikan, termasuk untuk kegiatan yang berkaitan dengan promosi dan publikasi madrasah diniyah, seperti pembelian bahan promosi atau penyelenggaraan kegiatan promosi.
- e. Pembiayaan Lembaga Keuangan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari lembaga keuangan, seperti bank atau koperasi, untuk membiayai kegiatan pendidikan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan promosi dan publikasi madrasah diniyah.”

Dalam memilih metode pembiayaan pendidikan yang tepat, perlu dilakukan evaluasi kebutuhan dana dan sumber daya yang tersedia, serta pertimbangan terhadap kemampuan madrasah diniyah dalam mengelola keuangan dan memastikan keberlangsungan program-program yang telah direncanakan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan strategi promosi dan publikasi yang efektif untuk memperkenalkan madrasah diniyah kepada masyarakat dan memperluas jaringan dukungan. Tata usaha Sayidatul Lutfiah S.Kom mengatakan:⁸⁹

“Sebagai Kepala Tata Usaha, metode pembiayaan pendidikan adalah cara atau strategi yang digunakan untuk memperoleh dana atau sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan pendidikan di madrasah diniyah. Metode ini mencakup berbagai cara untuk mengumpulkan dan mengalokasikan dana, baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal madrasah diniyah. Beberapa contoh metode pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah antara lain:

- a. Biaya Pendidikan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari orang tua atau wali murid untuk membiayai pendidikan di madrasah diniyah. Biaya ini biasanya meliputi biaya registrasi, biaya pembelian buku pelajaran, biaya ujian, dan sebagainya.
- b. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Metode ini adalah pemberian dana oleh pemerintah pusat atau daerah kepada madrasah diniyah dalam rangka membantu biaya

⁸⁹ Wawancara, Sayidatul Lutfiah, Manajemen Pembiayaan Madin.

operasional. Dana ini biasanya bersifat reguler dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk membiayai kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan.

- c. Dana Hibah: Metode ini adalah pemberian dana oleh pemerintah atau lembaga lain yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang berkaitan dengan pengembangan madrasah diniyah, seperti pembelian peralatan atau renovasi gedung.
- d. Dana Sumbangan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari sumbangan masyarakat atau pihak-pihak lain untuk mendukung kegiatan pendidikan, termasuk untuk membiayai kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan.
- e. Pembiayaan Lembaga Keuangan: Metode ini adalah penggunaan dana yang berasal dari lembaga keuangan, seperti bank atau koperasi, untuk membiayai kegiatan pendidikan, termasuk kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan.”

Dalam memilih metode pembiayaan pendidikan yang tepat, perlu dilakukan evaluasi kebutuhan dana dan sumber daya yang tersedia, serta pertimbangan terhadap kemampuan madrasah diniyah dalam mengelola keuangan dan memastikan keberlangsungan program-program yang telah direncanakan. Selain itu, perlu juga memperhatikan regulasi dan ketentuan yang berlaku untuk penggunaan dana publik atau sumbangan masyarakat. Sebagai Kepala Tata Usaha, saya akan bekerja sama dengan Kepala Madrasah dan pihak terkait lainnya untuk memilih metode pembiayaan yang tepat dan memastikan penggunaan dana yang efektif dan transparan.⁹⁰

Hasil yang di dapat dari perencanaan pembiayaan pendidikan adalah Perencanaan pembiayaan madrasah diniyah yang baik dapat memberikan berbagai hasil yang positif, antara lain:

- a. Efektivitas penggunaan dana: Dengan adanya perencanaan yang baik, dana yang tersedia dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.

⁹⁰ Ibid.

- b. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan: Dengan perencanaan yang matang, madrasah diniyah dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih lengkap dan berkualitas. Hal ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi siswa dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.
- c. Transparansi dan akuntabilitas: Perencanaan pembiayaan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap madrasah diniyah, serta memudahkan proses pengawasan dan evaluasi dari pihak yang berwenang.
- d. Kelangsungan pendidikan: Perencanaan yang matang juga dapat membantu madrasah diniyah dalam mengatasi masalah keuangan dan memastikan kelangsungan pendidikan yang berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kualitas lulusan: Dengan memastikan tersedianya dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, madrasah diniyah dapat meningkatkan kualitas lulusan dan membantu siswa meraih prestasi yang lebih baik dalam berbagai bidang.⁹¹

Model pembiayaan madrasah diniyah adalah Ada beberapa model yang dapat digunakan dalam perencanaan pembiayaan madrasah, di antaranya:

- a. Model *Planning Programming Budgeting System* (PPBS) Model PPBS merupakan salah satu metode perencanaan yang digunakan dalam sektor publik, termasuk dalam perencanaan pembiayaan madrasah. Model ini melibatkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program secara terintegrasi, sehingga memungkinkan adanya penggunaan dana yang lebih efektif dan efisien.
- b. Model *Zero-Based Budgeting* (ZBB) Model ZBB merupakan metode perencanaan pembiayaan yang melibatkan proses analisis dan evaluasi ulang terhadap setiap program dan kegiatan, dan menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kepentingan masing-

⁹¹ Ibid

masing kegiatan. Dalam model ini, setiap program dan kegiatan harus dibenarkan secara logis dan harus memperoleh dukungan yang memadai untuk memperoleh anggaran.

- c. Model *Activity-Based Budgeting* (ABB) Model ABB juga melibatkan analisis dan evaluasi terhadap setiap kegiatan, namun berfokus pada pengalokasian anggaran berdasarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam suatu program. Model ini memungkinkan madrasah diniyah untuk lebih fokus pada kegiatan yang memberikan nilai tambah bagi siswa dan mencapai tujuan pendidikan.
- d. Model *Performance-Based Budgeting* (PBB) Model PBB merupakan metode perencanaan yang fokus pada pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan. Dalam model ini, penganggaran didasarkan pada target kinerja yang ditetapkan, sehingga memungkinkan madrasah diniyah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan.
- e. Model *Responsibility Center Management* (RCM) Model RCM melibatkan pengalokasian tanggung jawab dan otoritas keuangan pada unit-unit atau pusat-pusat tanggung jawab yang berbeda dalam madrasah diniyah. Setiap unit atau pusat tanggung jawab memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran dan harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang mereka terima.⁹²

3. Pengorganisasian perencanaan pembiayaan Madrasah Diniyah

Persepsinya adalah bahwa kepala madrasah diniyah Heru Prasetyo S.Pd.I mengatakan Pengorganisasian pembiayaan madrasah diniyah adalah suatu proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh madrasah diniyah agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan pendidikan dan

⁹² Fatah, Nanang. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012. H. 96

pengajaran.⁹³ Hal ini meliputi penyusunan rencana penggunaan dana, pengelolaan keuangan, pengawasan, dan evaluasi untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan dana.

Dalam pengorganisasian pembiayaan madrasah diniyah, kepala madrasah perlu memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan madrasah diniyah telah disusun dengan baik dan memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan dan aturan yang berlaku. Selain itu, kepala madrasah perlu memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana telah dilakukan secara ketat dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, pengorganisasian pembiayaan madrasah diniyah dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana serta mendorong terciptanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan madrasah diniyah.

Senada dengan kepala tata usaha Sayidatul Lutfiah S.Kom mengatakan:⁹⁴

“Sebagai kepala tata usaha madrasah diniyah, pengorganisasian pembiayaan madrasah diniyah merupakan salah satu tanggung jawab penting. Hal ini meliputi pengelolaan dana yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pemerintah, lembaga atau organisasi lainnya, maupun sumbangan dari masyarakat. Menyiapkan laporan keuangan yang lengkap dan akurat untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam penggunaan dana. Dengan melakukan pengorganisasian pembiayaan madrasah diniyah dengan baik, kepala tata usaha dapat membantu memastikan bahwa sumber daya keuangan madrasah diniyah digunakan dengan efektif dan efisien, serta meminimalkan risiko terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana.⁹⁵”

Tabel perencanaan anggaran Tahun 2022-2023

⁹³ Wawancara, Heru Prasetyo, Manajemen Pembiayaan Madin.

⁹⁴ Wawancara, Sayidatul Lutfiah, Manajemen Pembiayaan Madin.

⁹⁵ Ibid. Sayidatul

1.	a) Alat tulis kantor b) Alat kebersihan c) Alat listrik d) Foto copy e) Alat instalasi air sanitasi f) Pembelian buku	Rp 800.000 Rp 300.000 Rp 300.000 Rp 400.000 Rp 200.000 Rp1.500.000 Rp 3.500.000
2.	Langganan daya dan jasa a) Belanja internet b) Belanja langganan listrik c) Biaya Pemeliharaan computer	Rp1.200.000 Rp1.00.000 Rp 800.000 Rp 3. 000.000
3.	Akomodasi kerumah tanggaan a) Belanja peralatan rumah tangga b) Belanja minuman, kopi, teh, gula,air mineral	Rp 1.000.000 Rp1.400.000 Rp2.400.000
4.	Biaya kesejahteraan a) 16 guru b) 2 petugas kebersihan c) Dana insentif guru	Rp38.000.000 Rp 2 500.000 Rp 15 600 000 Rp 56 100 000

Tabel 4.6

Jumlah anggaran pengeluaran dalam satu tahun adalah Rp 65 000 000 (enam puluh lima juta rupiah)

Dari hasil wawancara dengan ust Nurhadi S.H.I:⁹⁶

“Sebagai waka sarpras sebaiknya melakukan hal-hal berikut untuk mengorganisasi pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah, antara lain:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan di madrasah diniyah, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, peralatan olahraga, dan lain sebagainya.
- b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- c. Mencari sumber dana tambahan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau perusahaan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.
- d. Mengelola dana yang telah diperoleh dengan baik, dengan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengeluaran yang dilakukan, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien.
- e. Menerapkan sistem pemeliharaan dan perawatan yang baik terhadap sarana dan prasarana yang telah ada, sehingga umur pakai sarana dan prasarana dapat diperpanjang dan pengeluaran untuk perbaikan dapat dihindari.
- f. Menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak terkait, seperti kontraktor, penyedia jasa perawatan, dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh harga dan layanan yang lebih baik dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Dengan melakukan pengorganisasian pembiayaan pendidikan dengan baik, diharapkan sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung kegiatan pendidikan yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh siswa dan tenaga pendidik di madrasah diniyah. Senada dengan hal itu Sugeng Hariyadi wakil waka sarpras mengatakan:⁹⁷

“Mekanisme pengaturan pos-pos pembiayaan madrasah diniyah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Penentuan kebutuhan biaya: Tahapan ini meliputi penentuan jumlah siswa, kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan tenaga pendidik, dan lain-lain. Semua kebutuhan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah biaya yang diperlukan.

⁹⁶ Wawancara, Nurhadi, Manajemen Pembiayaan Madin, February 17, 2023.

⁹⁷ Wawancara, Sugeng Hariyadi, Manajemen Pembiayaan Madin, February 17, 2023.

- b. Penyusunan rencana anggaran: Setelah kebutuhan biaya ditentukan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana anggaran. Rencana anggaran ini mencakup estimasi pengeluaran untuk setiap kebutuhan, baik untuk pengadaan barang, pembayaran gaji guru, operasional, dan sebagainya.
- c. Penetapan sumber pendanaan: Setelah rencana anggaran disusun, tahap selanjutnya adalah menentukan sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan di madrasah diniyah. Sumber pendanaan tersebut bisa berasal dari pemerintah, yayasan, dana siswa, hibah, atau sponsor.
- d. Pelaksanaan dan pengawasan: Setelah semua kebutuhan terpenuhi dan sumber pendanaan tersedia, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai rencana anggaran yang telah disusun. Selama pelaksanaan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pengeluaran agar sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun.
- e. Evaluasi: Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan pengeluaran yang telah dilakukan. Evaluasi ini akan menjadi bahan untuk memperbaiki rencana anggaran dan kegiatan di masa mendatang.

Dalam mekanisme pengaturan pos-pos pembiayaan madrasah diniyah, perlu diperhatikan juga adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar tercipta kepercayaan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait.

4. Biaya Rutin

Biaya rutin madrasah diniyah bisa bervariasi tergantung dari kebijakan dan kondisi masing-masing madrasah. Sayidatul Lutfiah S.Kom Mengatakan beberapa biaya rutin yang ada di madrasah diniyah antara lain:⁹⁸

- a. Biaya Listrik dan Air - Biaya untuk membayar tagihan listrik dan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Gaji Pegawai - Biaya untuk membayar gaji para pegawai yang bekerja di madrasah diniyah, seperti guru dan karyawan administrasi.
- c. Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas - Biaya untuk memelihara dan memperbaiki bangunan, fasilitas, dan peralatan yang ada di

⁹⁸ Wawancara, Sayidatul Lutfiah, Manajemen Pembiayaan Madin.

madrasah diniyah, seperti gedung, ruang kelas, toilet, dan peralatan elektronik.

- d. Biaya Operasional - Biaya operasional meliputi biaya untuk membeli alat tulis kantor, kebutuhan administrasi, kebutuhan perlengkapan dan lain sebagainya.
- e. Biaya Perbaikan Sarana dan Prasarana - Biaya untuk perbaikan dan penggantian sarana dan prasarana yang sudah rusak atau tidak berfungsi dengan baik.
- f. Biaya Transportasi - Biaya transportasi untuk kegiatan-kegiatan di luar madrasah, seperti perjalanan studi banding, kunjungan industri, dan lain sebagainya.
- g. Biaya Pembelian Buku dan Perlengkapan Sekolah - Biaya untuk membeli buku pelajaran dan perlengkapan sekolah yang diperlukan oleh siswa.
- h. Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler - Biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler, seperti latihan pramuka, kegiatan seni, dan lain sebagainya.

Kembali lagi, biaya rutin madrasah diniyah bisa bervariasi tergantung dari kebijakan dan kondisi masing-masing madrasah.

5. Biaya Kegiatan Reguler

Sayaidatul lutfiah Mengatakan mengatakan bahwa Biaya kegiatan reguler bagi madrasah diniyah dapat mencakup beberapa hal berikut.⁹⁹

- a. Biaya operasional: Biaya operasional meliputi biaya listrik, air, dan bahan bakar untuk kegiatan sehari-hari di madrasah diniyah. Biaya ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan ukuran madrasah.
- b. Biaya gaji: Biaya gaji adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji guru dan staf pendukung di madrasah diniyah. Besarannya dapat berbeda-beda tergantung pada pengalaman dan kualifikasi karyawan, serta standar gaji di daerah tersebut.

⁹⁹ Ibid.

- c. Biaya pemeliharaan: Biaya pemeliharaan meliputi perbaikan, perawatan, dan penggantian barang yang rusak atau habis pakai di madrasah diniyah seperti peralatan kantor, furniture, dan perlengkapan sekolah lainnya.
- d. Biaya kegiatan ekstrakurikuler: Biaya kegiatan ekstrakurikuler meliputi biaya untuk kegiatan seperti olahraga, seni, dan aktivitas lainnya yang diadakan di madrasah diniyah. Biaya ini dapat bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilakukan dan sumber pendanaan yang tersedia.
- e. Biaya keamanan: Biaya keamanan meliputi biaya untuk petugas keamanan dan peralatan keamanan seperti CCTV, gerbang, dan pagar.
- f. Biaya administrasi: Biaya administrasi meliputi biaya untuk pembelian kertas, tinta, printer, dan peralatan kantor lainnya yang diperlukan untuk menjalankan operasi administratif di madrasah diniyah.
- g. Biaya lain-lain: Biaya lain-lain mencakup biaya-biaya yang tidak terkategori dalam pos-pos di atas, seperti biaya pajak, asuransi, dan biaya untuk acara-acara khusus seperti peringatan hari besar Islam atau kegiatan sosial.¹⁰⁰

6. Pelaksanaan Pembiayaan di Madrasah Diniyah

a. Pengertian

Pembiayaan di Madrasah Diniyah merujuk pada sumber dana yang digunakan untuk mendukung operasional dan kegiatan pendidikan di madrasah diniyah. Pelaksanaan pembiayaan di Madrasah Diniyah meliputi proses pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dana dari berbagai sumber seperti pemerintah, yayasan, donatur, atau masyarakat.

Pembiayaan di Madrasah Diniyah dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran gaji guru dan staf, pengadaan buku dan peralatan, perbaikan fasilitas, dan kegiatan-

¹⁰⁰ Ibid

kegiatan lain yang mendukung proses belajar mengajar. Pelaksanaan pembiayaan di Madrasah Diniyah harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks Madrasah Diniyah, pembiayaan juga dapat merujuk pada dana yang diberikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan dan pengembangan keterampilan, seperti pengajian, tahfidz, dan kegiatan dakwah lainnya. Pembiayaan ini juga harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Kepala Madrasah : Heru Prasetyo S.Pd.I mengatakan:¹⁰¹ Sebagai kepala Madrasah Diniyah, saya meyakini bahwa pelaksanaan pembiayaan di Madrasah Diniyah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembiayaan di Madrasah Diniyah antara lain:

- 1) Penyusunan Anggaran: Saya akan melakukan penyusunan anggaran dengan hati-hati dan teliti, serta memperhitungkan semua kebutuhan dan prioritas yang ada di Madrasah Diniyah. Anggaran harus disusun dengan cermat dan memperhatikan kondisi keuangan Madrasah Diniyah.
- 2) Pengelolaan Keuangan: Saya akan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan profesional dan transparan, serta mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, semua transaksi keuangan harus tercatat dengan jelas dan akurat.
- 3) Pertanggungjawaban: Saya akan memastikan bahwa semua dana yang diterima dan digunakan tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan secara berkala dan menunjukkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

¹⁰¹ Wawancara, Heru Prasetyo, Manajemen Pembiayaan Madin.

- 4) Pemilihan Sumber Dana: Saya akan memilih sumber dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sumber dana tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.
- 5) Keterbukaan Informasi: Saya akan memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang sumber dana yang digunakan, pengelolaan keuangan, dan hasil yang dicapai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan di Madrasah Diniyah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dalam kesimpulannya, sebagai kepala Madrasah Diniyah, saya akan memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan di Madrasah Diniyah dilakukan dengan profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Madrasah Diniyah dapat beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik dan masyarakat sekitar. Humas Angga Hakam Al Jihad S.H mengatakan: Sebagai seorang Humas Madrasah Diniyah, saya meyakini bahwa pelaksanaan pembiayaan di Madrasah Diniyah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembiayaan di Madrasah Diniyah antara lain:¹⁰²

- 1) Pengelolaan Keuangan: Pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional dan transparan. Dalam hal ini, Madrasah Diniyah harus memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tercatat secara jelas dan akurat.
- 2) Pertanggungjawaban: Madrasah Diniyah harus memastikan bahwa semua dana yang diterima dan digunakan tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat

¹⁰² Wawancara, Angga Hakam Al Jihad, Manajemen Pembiayaan Madin.

dilakukan dengan membuat laporan keuangan secara berkala dan menunjukkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- 3) Pemilihan Sumber Dana: Madrasah Diniyah harus memilih sumber dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
- 4) Keterbukaan Informasi: Madrasah Diniyah harus memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada masyarakat tentang sumber dana yang digunakan, pengelolaan keuangan, dan hasil yang dicapai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan di Madrasah Diniyah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- 5) Pelaporan: Madrasah Diniyah harus melakukan pelaporan keuangan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pihak donor, pihak pengawas, dan masyarakat umum. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua dana yang diterima dan digunakan telah tercatat dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰³

Dalam kesimpulannya, sebagai seorang Humas Madrasah Diniyah, saya akan memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan di Madrasah Diniyah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Madrasah Diniyah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik dan masyarakat sekitar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Madrasah Diniyah. Tata usaha : Sayidatul Lutfiah S.Kom mengatakan : Sebagai Kepala Tata Usaha di Madrasah Diniyah, pelaksanaan pembiayaan merupakan tanggung jawab saya dalam hal pengelolaan keuangan dan administrasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembiayaan di Madrasah Diniyah

¹⁰³ Ibid

adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) Pembuatan Rencana Anggaran: Sebagai Kepala Tata Usaha, saya harus membuat rencana anggaran untuk kegiatan-kegiatan di Madrasah Diniyah. Rencana anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan dan prioritas kegiatan serta dengan memperhatikan sumber dana yang tersedia.
- 2) Pengumpulan Dana: Saya harus memastikan bahwa sumber dana yang digunakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Sumber dana dapat berasal dari donatur, dana Pemerintah, atau sumbangan dari masyarakat. Dalam hal ini, saya harus memastikan bahwa semua dana yang diterima tercatat dengan jelas dan dipergunakan untuk keperluan yang tepat.
- 3) Pembayaran Biaya Operasional: Saya harus memastikan bahwa biaya operasional Madrasah Diniyah seperti gaji guru, listrik, air, dan lain-lain terbayar secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 4) Pengelolaan Keuangan: Saya harus mengelola keuangan Madrasah Diniyah dengan baik dan transparan. Hal ini dilakukan dengan mencatat semua pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dengan jelas dan akurat serta membuat laporan keuangan secara berkala.
- 5) Pertanggungjawaban: Saya harus memastikan bahwa semua penggunaan dana dan kegiatan di Madrasah Diniyah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 6) Pemeliharaan Aset: Saya harus memastikan bahwa semua aset Madrasah Diniyah, seperti gedung, peralatan, dan lain-lain, terjaga dan terawat dengan baik. Hal ini dilakukan untuk

¹⁰⁴ Wawancara, Sayidatul Lutfiah, Manajemen Pembiayaan Madin.

memperpanjang umur aset dan meminimalisir biaya perawatan.

Dalam kesimpulannya, sebagai Kepala Tata Usaha, saya akan memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan di Madrasah Diniyah dilakukan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan operasional Madrasah Diniyah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik dan masyarakat sekitar.¹⁰⁵

Tabel pengeluaran anggaran dalam setahun

1.	a,.Pengembangan kompetensi lulusan	Rp 1 000 000
	b, Alat tulis kantor	Rp 915.000
	c,Alat kebersihan	Rp 430.000
	d, Alat listrik	Rp 450.000
	e, Foto copy	Rp 600.000
	f, Alat instalasi air sanitasi	Rp 900.000
	g, Pembelian buku	Rp1.200.000
		Rp 4.415.000

¹⁰⁵ Ibid

2.	Langganan daya dan jasa a, Belanja internet b, Belanja langganan listrik c, Biaya Pemeliharaan computer	Rp1.200.00 0 Rp1.00.000 Rp 800.000 Rp 3. 000.000
3.	Akomodasi kerumah tanggaan a, Belanja peralatan rumah tangga b, Belanja minuman, kopi, teh, gula, air mineral	Rp 1.250.000 Rp1.700.000 Rp2.950.000
4.	Biaya kesejahteraan a, 16 guru b, 2 petugas kebersihan c, Aqomodasi	Rp38.000.000 Rp 2 500.000 Rp 3.000 000 Rp 43 500 000 Rp 53.865 000

Tabel 4.7

Jumlah anggaran pengeluaran dalam satu tahu adalah **Rp 53.865 000**(limapuluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)¹⁰⁶

Jadi ada penganggarannya adalah Rp : 65 000 000 – Rp : 53 865 000 = Rp : **11 135 000.**

Beberapa dana dana tidak masuk catatan keuangan karena dana dana tersebut dari donatur dan langsung di bagi habis. Seperti dana tunjangan hari raya, tentu masing masing guru menerima THR yang berbeda tiap tahunnya tergantung besarnya dana yang di dapat dari donatur.

Dana yang tidak dimasukkan catatan keuangan adalah seperti dana hafiah

¹⁰⁶ Ibid

akhir sanah begitu ada uang masuk langsung habis di keluarkan.

Dana yang lain yang tidak masuk catatan keuangan madrasah adalah dana perkemahan, karena sama sama iuran dan sama sama di pakai dan kalau ada kekurangannya di tanggung bersama dan kalau ada lebihnya di manfaatkan bersama.

Dana yang lainnya yang langsung habis adalah dana kurban dapat langsung di bagikan habis.

d. Aktualisasi pembiayaan

NO	BEBAN	BIAYA
1	Standar Isi	2,21 %
2	Standar Proses	4,53 %
3	Standar Kompetensi Lulusan	3,07 %
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,84 %
5	Standar Sarana dan Prasarana	8,5%
6	Standar Pengelolaan	5,5%
7	Standar Pembiayaan	60,73 %
8	Standar Penilaian	14,62%
Jumlah		100 %

Tabel 4.8

Kepala Madrasah : Heru Prasetyo S.Pd.I mengatakan :
Sebagai Kepala Madrasah Diniyah, saya akan melakukan aktualisasi dari pelaksanaan pembiayaan dengan cara:¹⁰⁷

- 1) Membuat Rencana Anggaran yang Realistis: Saya akan membuat rencana anggaran yang realistis dan memperhatikan kebutuhan prioritas Madrasah Diniyah. Saya akan berkoordinasi dengan staf Tata Usaha untuk memastikan bahwa rencana anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan operasional dan kegiatan Madrasah Diniyah.

¹⁰⁷ Wawancara, Heru Prasetyo, Manajemen Pembiayaan Madin.

- 2) Menjalin Kerja Sama dengan Pihak-Pihak Terkait: Saya akan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pihak sponsor, pemerintah, dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan dana tambahan yang dibutuhkan Madrasah Diniyah.
- 3) Melakukan Pengelolaan Keuangan yang Transparan: Saya akan memastikan bahwa pengelolaan keuangan Madrasah Diniyah dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan mencatat semua pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dengan jelas dan akurat serta membuat laporan keuangan secara berkala.
- 4) Mengoptimalkan Sumber Daya yang Ada: Saya akan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Madrasah Diniyah, seperti gedung, peralatan, dan tenaga pengajar, untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia.
- 5) Menyusun Rencana Pengeluaran yang Terukur: Saya akan menyusun rencana pengeluaran yang terukur untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan-kegiatan yang lebih penting.
- 6) Menyusun Laporan Keuangan Secara Teratur: Saya akan menyusun laporan keuangan secara teratur dan akurat untuk memantau keuangan Madrasah Diniyah. Laporan keuangan ini dapat menjadi alat untuk evaluasi dan perbaikan pengelolaan keuangan yang dilakukan.

Dengan melakukan aktualisasi dari pelaksanaan pembiayaan dengan cara-cara di atas, saya yakin bahwa Madrasah Diniyah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik dan masyarakat sekitar. Tata usaha Sayidatul Lutfiah S.Kom mengatakan : Sebagai Kepala Tata Usaha di Madrasah Diniyah, aktualisasi dari pelaksanaan pembiayaan

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁰⁸

- 1) Menyusun rencana anggaran yang terperinci: Saya akan menyusun rencana anggaran yang terperinci berdasarkan kebutuhan Madrasah Diniyah, seperti biaya operasional, pengembangan kurikulum, pembelian buku, gaji karyawan, perbaikan fasilitas dan infrastruktur, dan lain-lain. Rencana anggaran harus sesuai dengan sumber dana yang tersedia dan harus disesuaikan dengan prioritas kegiatan dan program Madrasah Diniyah.
- 2) Mengoptimalkan sumber dana yang tersedia: Saya akan berupaya untuk mengoptimalkan sumber dana yang tersedia dengan mencari sumber dana dari pemerintah, sponsor, donatur, dan masyarakat. Saya juga akan memanfaatkan sumber daya manusia dan material yang ada di Madrasah Diniyah dengan baik sehingga dapat mengurangi biaya pengeluaran.
- 3) Menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang teratur dan transparan: Saya akan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang teratur dan transparan dengan mencatat semua pengeluaran dan pemasukan Madrasah Diniyah. Hal ini akan memudahkan dalam mengontrol pengeluaran dan melihat posisi keuangan Madrasah Diniyah secara real-time. Saya juga akan membuat laporan keuangan secara rutin agar pihak-pihak terkait dapat melihat dan memantau pengelolaan keuangan yang dilakukan.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan: Saya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan yang telah dilakukan secara rutin untuk melihat kelemahan dan kekurangan serta menentukan solusi yang tepat. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan Madrasah Diniyah.

¹⁰⁸ Wawancara, Sayidatul Lutfiah, Manajemen Pembiayaan Madin.

5) Menjalin kerja sama dengan pihak terkait. Saya akan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti bank, sponsor, pemerintah, dan masyarakat, untuk mencari sumber dana yang lebih besar dan membantu memperbaiki keuangan Madrasah Diniyah. Dalam menjalin kerja sama ini, saya akan menjaga hubungan yang baik dengan pihak terkait dan memastikan bahwa penggunaan dana yang diterima telah sesuai dengan peruntukannya.

Dengan melakukan aktualisasi dari pelaksanaan pembiayaan dengan cara-cara di atas, saya yakin bahwa Madrasah Diniyah dapat memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik dan masyarakat sekitar.

7. Korelasi Pembiayaan Pendidikan Dengan Peningkatan Mutu Madrasah

Mutu pendidikan dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu sistem pendidikan. Mutu pendidikan juga mencakup aspek-aspek seperti kualitas proses pembelajaran, kualitas guru dan tenaga pendidik, kualitas kurikulum, kualitas fasilitas, dan kualitas dukungan dari lingkungan sekitar. Namun, definisi mutu pendidikan dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif dan tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam pendidikan. Beberapa pihak mungkin memandang mutu pendidikan dari segi prestasi akademik, sedangkan yang lainnya mungkin memandang dari segi keterampilan sosial atau karakter yang terbentuk pada siswa. Dalam konteks global, mutu pendidikan juga sering diukur melalui indikator-indikator seperti tingkat literasi, angka partisipasi, tingkat kelulusan, dan kemampuan untuk bersaing di tingkat internasional.

Kepala Madrasah: Heru Prasetyo S.Pd.I mengatakan :¹⁰⁹
Sebagai kepala Madrasah Diniyah, saya percaya bahwa terdapat

¹⁰⁹ Wawancara, Heru Prasetyo, Manajemen Pembiayaan Madin.

korelasi yang erat antara mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Mutu pendidikan yang baik membutuhkan pembiayaan yang memadai dan efektif. Pembiayaan yang tidak memadai atau tidak efektif dapat mempengaruhi mutu pendidikan yang diberikan oleh Madrasah Diniyah. Beberapa faktor yang mempengaruhi korelasi antara mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan di Madrasah Diniyah meliputi:

- a. Kualitas guru dan tenaga pendidik: Pembiayaan yang cukup diperlukan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik yang berkualitas dan berpengalaman. Guru dan tenaga pendidik yang berkualitas akan mempengaruhi mutu pendidikan yang diberikan oleh Madrasah Diniyah.
- b. Fasilitas dan infrastruktur: Pembiayaan yang cukup diperlukan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur Madrasah Diniyah. Fasilitas dan infrastruktur yang memadai akan mempengaruhi mutu pendidikan yang diberikan oleh Madrasah Diniyah.
- c. Kurikulum: pembiayaan yang cukup diperlukan untuk mengembangkan dan memperbaharui kurikulum Madrasah Diniyah. Kurikulum yang sesuai dan mutakhir akan mempengaruhi mutu pendidikan yang diberikan oleh Madrasah Diniyah.
- d. Bantuan dan dukungan dari pihak terkait: Pembiayaan yang cukup diperlukan untuk memperoleh bantuan dan dukungan dari pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sekitar. Bantuan dan dukungan yang memadai akan mempengaruhi mutu pendidikan yang diberikan oleh Madrasah Diniyah.

Dengan demikian, sebagai kepala Madrasah Diniyah, saya akan berusaha untuk memperoleh pembiayaan yang cukup dan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan oleh Madrasah Diniyah. Saya juga akan berusaha untuk mengelola pembiayaan tersebut dengan baik agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Diniyah.

Waka Kurikulum : Andi Ahmad Romdhoni S.Pd.I mengatakan : Sebagai Waka Kurikulum, saya juga percaya bahwa terdapat korelasi yang erat antara mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan.¹¹⁰ Dalam hal ini, pembiayaan yang memadai dan efektif dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan yang dihasilkan oleh kurikulum yang diterapkan. Berikut ini beberapa contoh korelasi antara mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan dalam konteks kurikulum:

- a. Pengembangan kurikulum. Untuk memperbaharui atau mengembangkan kurikulum yang lebih baik, diperlukan pembiayaan yang memadai. Kurikulum yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan siswa akan meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Pelatihan guru: Guru-guru perlu mengikuti pelatihan yang berkualitas untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum yang baru. Pembiayaan yang memadai dapat membantu memberikan pelatihan yang berkualitas kepada guru, sehingga mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih baik dan meningkatkan mutu pendidikan.
- c. Fasilitas dan sumber daya. Untuk mengaplikasikan kurikulum yang baik, diperlukan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Pembiayaan yang cukup dapat membantu membangun, memperbaiki, dan meningkatkan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan agar kurikulum dapat diterapkan dengan baik.
- d. Pengukuran dan evaluasi. Untuk mengetahui seberapa baik kurikulum yang diterapkan, diperlukan pengukuran dan evaluasi yang tepat. Pembiayaan yang memadai dapat membantu membiayai kegiatan pengukuran dan evaluasi untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan berhasil mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam hal ini, sebagai Waka Kurikulum, saya akan berusaha untuk memastikan bahwa pembiayaan yang tersedia digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penerapan

¹¹⁰ Wawancara, Andi Ahmad Romdhoni, Manajemen Pembiayaan Madin.

kurikulum yang baik. Saya akan berupaya untuk memperoleh pembiayaan yang memadai dan mengalokasikan dengan baik agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Waka kesiswaan: Amin Fuadi mengatakan :¹¹¹ Sebagai Waka Kesiswaan, saya percaya bahwa terdapat korelasi erat antara mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan yang memadai dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam hal kesiswaan. Berikut adalah beberapa contoh korelasi antara mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan dalam konteks kesiswaan:

- a. Layanan kesehatan. Kesehatan siswa sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pembiayaan yang memadai dapat membantu memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang berkualitas untuk siswa, seperti fasilitas kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala.
- b. Kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu meningkatkan kemampuan sosial dan keterampilan siswa. Pembiayaan yang memadai dapat membantu mendukung berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, debat, atau kegiatan lainnya.
- c. Bantuan social. Siswa yang kurang mampu secara finansial mungkin memerlukan bantuan sosial untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses pendidikan dengan baik. Pembiayaan yang memadai dapat membantu menyediakan bantuan sosial yang diperlukan, seperti beasiswa atau bantuan biaya transportasi.
- d. Layanan konseling. Layanan konseling dapat membantu siswa mengatasi masalah sosial dan emosional, dan meningkatkan kemampuan belajar mereka. Pembiayaan yang memadai dapat membantu memastikan ketersediaan layanan konseling yang berkualitas untuk siswa.

Dalam hal ini, sebagai Waka Kesiswaan, saya akan berusaha untuk memastikan bahwa pembiayaan yang tersedia digunakan secara

¹¹¹ Wawancara, Amin Fuadi, Manajemen Pembiayaan Madin.

efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian layanan kesiswaan yang berkualitas. Saya akan berupaya untuk memperoleh pembiayaan yang memadai dan mengalokasikan dengan baik agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kesiswaan.

Humas: Angga Hakam Al Jihad S. H mengatakan, sebagai Humas Madrasah Diniyah, saya percaya bahwa korelasi antara mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan sangat erat. Pembiayaan yang cukup dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan oleh madrasah diniyah. Berikut adalah beberapa contoh korelasi antara mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan dalam konteks madrasah diniyah:¹¹²

- a. Sumber daya manusia (SDM): Madrasah diniyah memerlukan SDM yang berkualitas untuk memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas kepada siswa. Pembiayaan yang memadai dapat membantu mendukung pengembangan SDM, seperti pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, staf dan karyawan madrasah diniyah.
- b. Sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pembiayaan yang memadai dapat membantu memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan seperti peralatan pembelajaran, perbaikan gedung dan lingkungan, serta teknologi pendukung pembelajaran.
- c. Kurikulum dan metodologi pembelajaran. Pembiayaan yang memadai dapat membantu memastikan ketersediaan kurikulum dan metodologi pembelajaran yang berkualitas serta relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.
- d. Kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter. Kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter juga sangat penting dalam membentuk karakter siswa dan membantu mereka

¹¹² Wawancara, Angga Hakam Al Jihad, Manajemen Pembiayaan Madin.

berkembang secara holistik. Pembiayaan yang memadai dapat membantu mendukung berbagai kegiatan ekstrakurikuler serta pengembangan karakter yang sesuai dengan tujuan dan visi madrasah diniyah.

Dalam hal ini, sebagai Humas Madrasah Diniyah, ia akan berusaha untuk memperoleh pembiayaan yang memadai dan mengalokasikan dengan baik untuk memastikan bahwa ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kurikulum dan metodologi pembelajaran serta kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan karakter terpenuhi dengan baik. Dengan cara ini, kami dapat meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan oleh madrasah diniyah dan mencapai tujuan kami dalam membangun insan yang berakhlak mulia dan berdaya saing global.

Tata usaha: Sayidatul Lutfiah S.Kom mengatakan, sebagai Kepala Tata Usaha, saya percaya bahwa korelasi antara mutu pendidikan dengan pembiayaan pendidikan sangat penting dan saling terkait satu sama lain. Berikut beberapa korelasi antara mutu pendidikan dan pembiayaan pendidikan dalam konteks tata usaha madrasah:¹¹³

- a. Pembiayaan untuk sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai Kepala Tata Usaha, saya akan berusaha untuk memastikan bahwa alokasi pembiayaan dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh madrasah, seperti fasilitas ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, toilet, lapangan olahraga, dan sebagainya.
- b. Pembiayaan untuk kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah, seperti acara perpisahan, upacara bendera, perlombaan, dan kegiatan sosial lainnya, dapat membantu membangun semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam komunitas madrasah. Sebagai Kepala Tata Usaha, saya akan mengalokasikan pembiayaan untuk kegiatan

¹¹³ Wawancara, Sayidatul Lutfiah, Manajemen Pembiayaan Madin.

sekolah yang penting dan bermanfaat bagi siswa, guru, dan staf madrasah.

- c. Pembiayaan untuk pengembangan staf dan karyawan. Staf dan karyawan madrasah merupakan aset berharga yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan. Sebagai Kepala Tata Usaha, saya akan berusaha untuk mengalokasikan pembiayaan untuk pelatihan dan pengembangan staf dan karyawan madrasah agar mereka dapat terus meningkatkan kemampuan dan kinerjanya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik pada mutu pendidikan.
- d. Pembiayaan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Pembiayaan yang cukup dapat membantu madrasah melakukan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pelatihan guru, kegiatan pengembangan karakter, pembelian buku dan media pembelajaran, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Sebagai Kepala Tata Usaha, ia berusaha untuk mengelola pembiayaan madrasah dengan efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk mutu pendidikan. Dengan memastikan bahwa pembiayaan yang cukup dialokasikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana, kegiatan sekolah, pengembangan staf dan karyawan, serta peningkatan kualitas pendidikan, maka madrasah dapat meningkatkan mutu pendidikan yang diberikan dan mencapai tujuan dalam membangun insan yang berakhlak mulia dan berdaya saing global.

8. Mutu Layanan Pendidikan Madrasah Diniyah

Mutu layanan pendidikan adalah ukuran kualitas dari layanan pendidikan yang diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan. Mutu layanan pendidikan mencakup aspek-aspek seperti kualitas proses pembelajaran, kualitas fasilitas dan infrastruktur, kualitas tenaga pengajar, dan kualitas manajemen dan administrasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi mutu layanan pendidikan antara lain:

- a. Kualitas tenaga pengajar. Tenaga pengajar yang berkualitas, memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam bidangnya, dan mampu memberikan pembelajaran yang efektif dan inovatif akan berkontribusi terhadap mutu layanan pendidikan.
- b. Kualitas proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang efektif, inovatif, dan mengacu pada kurikulum yang berkualitas akan meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- c. Kualitas fasilitas dan infrastruktur. Fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman dan berstandar, peralatan belajar mengajar yang memadai, dan fasilitas olahraga dan laboratorium yang lengkap akan meningkatkan mutu layanan pendidikan.
- d. Kualitas manajemen dan administrasi. Manajemen dan administrasi yang baik, meliputi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan pengembangan program dan kurikulum, akan meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, penting untuk memperhatikan semua aspek yang mempengaruhi mutu tersebut, dan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar layanan pendidikan yang diberikan semakin baik dan berkualitas. Sebagai kepala Madrasah Diniyah, Heru Prasetyo S.Pd.I mengatakan berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan berkualitas:¹¹⁴

- a. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang berkualitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, saya akan melakukan berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga pendidik, seperti pelatihan metode pembelajaran yang inovatif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta penguatan kompetensi dalam bidang keagamaan.

¹¹⁴ Ibid.

- b. Menyusun program pembelajaran yang efektif. Saya akan berupaya menyusun program pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Program pembelajaran harus dapat memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dari segi akademik maupun non-akademik.
- c. Memperkuat kurikulum: memperkuat kurikulum dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik itu dalam bidang keagamaan, sosial, maupun keterampilan. Selain itu, saya juga akan memperluas dan memperkaya sumber pembelajaran, seperti buku-buku teks, literatur, dan multimedia yang relevan dengan kurikulum.
- d. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur: Fasilitas dan infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. upaya meningkatkan fasilitas dan infrastruktur, seperti memperbaiki gedung, menyediakan laboratorium, perpustakaan, dan akses internet.
- e. Meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat: dengan cara mengajak orang tua dan masyarakat untuk turut serta dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan memberikan dukungan dan partisipasi aktif, baik itu dalam bentuk sumbangan dana, tenaga, maupun saran dan masukan.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diyakini akan dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan di Madrasah Diniyah, sehingga dapat melahirkan peserta didik yang berkualitas dan berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Sebagai kepala Madrasah Diniyah, Heru Prasetyo S.Pd.I mengatakan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui mutu pelayanan berkualitas, di antaranya:¹¹⁵

- a. Menggunakan indikator kinerja: Indikator kinerja dapat menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi mutu pelayanan pendidikan. Beberapa indikator kinerja yang dapat digunakan, seperti tingkat

¹¹⁵ Ibid.

- kehadiran peserta didik, tingkat kelulusan, tingkat prestasi akademik, serta tingkat kepuasan peserta didik dan orang tua.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala: Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu kita dalam mengetahui kinerja dan hasil dari pelaksanaan program pendidikan. Dalam hal ini, bisa dilakukan melalui observasi langsung kegiatan pembelajaran, wawancara dengan siswa, guru dan orangtua, serta melakukan analisis data tentang capaian kinerja.
 - c. Melakukan penilaian internal dan eksternal: Penilaian internal dapat dilakukan oleh guru dan staf madrasah untuk mengevaluasi kualitas pelayanan secara mandiri dan objektif. Sedangkan penilaian eksternal dapat dilakukan oleh pihak yang independen, seperti tim akreditasi, untuk mengevaluasi kinerja madrasah berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
 - d. Menyediakan sarana dan mekanisme untuk umpan balik: Sarana dan mekanisme umpan balik seperti kotak saran, buku tamu, atau survey kepuasan, dapat memberikan informasi yang berguna dalam mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara teratur, maka kepala Madrasah Diniyah akan dapat mengetahui mutu pelayanan pendidikan yang diberikan serta melakukan perbaikan dan peningkatan sesuai dengan kebutuhan dan harapan siswa dan masyarakat. Sebagai kepala Madrasah Diniyah, Heru Prasetyo S.Pd.I mengatakan karakteristik mutu layanan pendidikan yang berkualitas dapat dijabarkan sebagai berikut:¹¹⁶

- a. Relevansi. Mutu layanan pendidikan yang berkualitas haruslah relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta dunia kerja. Oleh karena itu, program pembelajaran harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.
- b. Efektivitas. Mutu layanan pendidikan yang berkualitas harus mampu memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang

¹¹⁶ Ibid.

telah ditetapkan. Program pembelajaran harus dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan efektif.

- c. Efisiensi. Mutu layanan pendidikan yang berkualitas harus mampu memanfaatkan sumber daya secara efisien, seperti waktu, tenaga, dan anggaran. Oleh karena itu, program pembelajaran harus dirancang secara efisien untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada.
- d. Kesetaraan. Mutu layanan pendidikan yang berkualitas harus dapat memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik, tanpa terkecuali. Program pembelajaran harus menghindari diskriminasi dan memberikan kesetaraan dalam segala aspek.
- e. Keterjangkauan. Mutu layanan pendidikan yang berkualitas harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Program pembelajaran harus dapat diakses oleh seluruh peserta didik dengan biaya yang terjangkau.
- f. Partisipasi: Mutu layanan pendidikan yang berkualitas harus dapat melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, seperti peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, program pembelajaran harus dapat melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.
- g. Akuntabilitas. Mutu layanan pendidikan yang berkualitas harus dapat memberikan pertanggungjawaban secara jelas dan transparan terhadap hasil dan kinerja yang telah dicapai. Oleh karena itu, program pembelajaran harus dapat memberikan akuntabilitas yang jelas dan transparan terhadap hasil yang telah dicapai.

Dengan memperhatikan karakteristik mutu layanan pendidikan tersebut, maka kepala Madrasah Diniyah dapat memperbaiki dan meningkatkan layanan pendidikan agar lebih berkualitas dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai kepala Madrasah, Heru Prasetyo S.Pd.I mengatakan ada beberapa standar pelayanan mutu yang perlu diperhatikan, di

antaranya:¹¹⁷

- a. Standar Proses Pendidikan: Standar ini berisi tentang proses pembelajaran, metode pengajaran, dan interaksi antara peserta didik dengan guru. Standar ini juga mencakup kurikulum, penilaian, dan pengembangan kepribadian peserta didik.
- b. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Standar ini berisi tentang kualifikasi, kompetensi, dan etika yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini meliputi persyaratan pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan sertifikasi.
- c. Standar Sarana dan Prasarana: Standar ini berisi tentang fasilitas dan infrastruktur pendidikan, seperti gedung, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Standar ini juga mencakup keamanan dan kesehatan lingkungan.
- d. Standar Pengelolaan: Standar ini berisi tentang tata kelola pendidikan, seperti kebijakan, organisasi, manajemen, dan pengawasan. Hal ini meliputi pengelolaan keuangan, administrasi, dan sistem informasi.
- e. Standar Pelayanan: Standar ini berisi tentang layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Standar ini meliputi layanan akademik, psikologis, sosial, dan konseling.
- f. Standar Penilaian: Standar ini berisi tentang sistem penilaian dan evaluasi yang digunakan untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Hal ini meliputi penilaian formatif, sumatif, dan penilaian mandiri.
- g. Standar Pelaksanaan Penjaminan Mutu: Standar ini berisi tentang tata kelola dan pengawasan program penjaminan mutu, serta mekanisme pengukuran, evaluasi, dan perbaikan mutu layanan pendidikan.

Dengan memperhatikan standar pelayanan mutu di atas, kepala Madrasah dapat menjamin kualitas pelayanan pendidikan yang baik dan

¹¹⁷ Ibid.

memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai kepala Madrasah, Heru Prasetyo S.Pd.I mengatakan terkadang dana yang tersedia untuk pengembangan mutu layanan pendidikan terbatas. Namun, hal tersebut tidak menyebabkan mutu layanan pendidikan yang diberikan menjadi rendah. Berikut beberapa tips untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan dana yang minim:¹¹⁸

- a. Memanfaatkan sumber daya internal. Sumber daya internal seperti pendidik dan tenaga kependidikan, serta fasilitas dan peralatan yang sudah ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilatih untuk meningkatkan kompetensinya dan merancang strategi pembelajaran yang inovatif. Fasilitas dan peralatan dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
- b. Berkolaborasi dengan pihak luar. Madrasah dapat melakukan kolaborasi dengan pihak luar seperti lembaga donor, lembaga pemerintah, atau perusahaan untuk mendapatkan bantuan dana dan dukungan lainnya.
- c. Mengoptimalkan penggunaan teknologi. Madrasah dapat memanfaatkan teknologi seperti penggunaan internet dan media sosial untuk mengoptimalkan proses pembelajaran dan berkomunikasi dengan orang tua siswa.
- d. Menerapkan program hemat energy. Madrasah dapat menerapkan program hemat energi untuk menghemat biaya listrik dan air. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan lampu hemat energi, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, serta menggunakan air secara efisien.
- e. Melakukan evaluasi dan perbaikan mutu secara berkala. Madrasah harus melakukan evaluasi dan perbaikan mutu secara berkala untuk mengetahui kekurangan dan permasalahan yang ada dalam layanan pendidikan dan mencari solusi yang tepat.

Dengan menerapkan beberapa tips di atas, Madrasah dapat

¹¹⁸ Ibid.

meningkatkan mutu layanan pendidikannya dengan dana yang minim. Namun, penting bagi kepala Madrasah untuk tetap fokus pada tujuan dan visi misi madrasah serta mengoptimalkan sumber daya yang ada.



BAB V

ANALISIS

A. Analisis Data Penelitian

1. Analisis data perencanaan
 - a. Pengertian perencanaan

Perencanaan pembiayaan adalah proses merencanakan dan mengorganisir sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, perencanaan pembiayaan merujuk pada pengaturan dan pengelolaan dana untuk membiayai program-program pendidikan, seperti gaji guru, biaya operasional, pengembangan kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Perencanaan pembiayaan melibatkan identifikasi sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, mempertimbangkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, dan menentukan prioritas penggunaan dana. Dalam proses perencanaan pembiayaan, juga perlu dipertimbangkan faktor-faktor risiko dan manajemen keuangan yang baik, seperti pemisahan antara dana operasional dan dana investasi, pemantauan penggunaan dana secara berkala, dan audit keuangan yang teratur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Perencanaan pembiayaan yang baik akan membantu memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam konteks pendidikan, tujuan ini biasanya berfokus pada pengembangan kemampuan siswa dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Sebagai seorang kepala madrasah diniyah, melakukan beberapa langkah dalam menganalisis perencanaan pembiayaan pendidikan, di antaranya:

- 1) Mengevaluasi kebutuhan pembiayaan, dengan memeriksa anggaran dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program pendidikan di madrasah diniyah. Perlu juga

mempertimbangkan biaya operasional dan investasi jangka panjang seperti renovasi atau perluasan gedung sekolah.

- 2) Mengidentifikasi sumber pembiayaan yang tersedia, dengan mengevaluasi sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, seperti dana bantuan dari pemerintah atau lembaga filantropi, donasi dari masyarakat, serta pendapatan dari kegiatan ekstrakurikuler dan penyewaan gedung. Dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap sumber pembiayaan tersebut.
- 3) Merencanakan penggunaan dana, setelah mengevaluasi kebutuhan pembiayaan dan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia, lalu merencanakan penggunaan dana dengan matang. dengan memprioritaskan penggunaan dana untuk kebutuhan utama seperti gaji guru dan staf, pembelian buku dan perlengkapan, serta biaya operasional sehari-hari.
- 4) Menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang baik, untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan yang baik diterapkan di madrasah diniyah. Hal ini meliputi pembukuan yang akurat, pemisahan antara dana operasional dan dana investasi, serta audit keuangan yang berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, perencanaan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah dapat dijalankan dengan baik dan efektif, sehingga kebutuhan pendidikan siswa dapat terpenuhi dengan optimal.

b. Metode dan teori perencanaan

Terdapat beberapa metode dan teori pembiayaan pendidikan yang dapat dianalisis, di antaranya:

- 1) Metode Pendanaan Publik, metode pendanaan ini mencakup penggunaan dana publik, seperti dana bantuan dari pemerintah dan lembaga filantropi, untuk membiayai program-program pendidikan di madrasah diniyah. Metode ini umumnya

mengharuskan madrasah diniyah untuk memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu untuk mendapatkan dana, seperti menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai jumlah siswa, program pendidikan yang dijalankan, dan target pencapaian yang ingin dicapai.

- 2) Metode pembiayaan swasta, metode ini melibatkan penggunaan dana swasta, seperti sumbangan dari masyarakat, yayasan, dan lembaga keuangan untuk membiayai program pendidikan di madrasah diniyah. Metode ini umumnya memberikan fleksibilitas dan kebebasan dalam penggunaan dana, tetapi juga memerlukan upaya yang lebih besar dalam mengumpulkan dan mengelola dana yang diperoleh.
- 3) Teori investasi, teori ini menganggap pendidikan sebagai sebuah investasi yang dapat memberikan hasil jangka panjang yang besar bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks pembiayaan pendidikan, teori ini menyarankan bahwa investasi yang dilakukan pada pendidikan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan dan kemajuan masyarakat.
- 4) Teori keadilan pendidikan, teori ini menganggap bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan secara adil dan merata kepada semua individu, tanpa terkecuali. Dalam konteks pembiayaan pendidikan, teori ini menyarankan bahwa perlu ada upaya untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi hambatan bagi individu yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Dalam menganalisis metode dan teori pembiayaan pendidikan, akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan madrasah diniyah, sumber daya yang tersedia, dan dampak dari setiap metode atau teori yang dipilih. Saya akan memilih metode atau teori yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi madrasah diniyah, serta memberikan hasil yang optimal

dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dari hasil wawancara dengan : Sayidatul Lutfiah S.Kom, analisis tentang metode dan teori pembiayaan pendidikan sebagai berikut:¹¹⁹

- 1) Metode pendanaan public, metode pendanaan publik adalah metode pembiayaan yang melibatkan pemerintah dan lembaga publik lainnya. Metode ini umumnya memberikan dukungan keuangan yang stabil dan dapat membantu membiayai program pendidikan jangka panjang di madrasah diniyah. Namun, metode ini juga memerlukan proses administrasi yang ketat dan prosedur yang rumit dalam mengajukan permohonan dana publik.
- 2) Metode pembiayaan swasta, metode pembiayaan swasta adalah metode pembiayaan yang melibatkan swasta, seperti yayasan, perusahaan, dan individu untuk membiayai program pendidikan di madrasah diniyah. Metode ini umumnya lebih fleksibel dan dapat memberikan dukungan finansial yang lebih besar, tetapi memerlukan upaya yang lebih besar dalam mengumpulkan dana dan melakukan pengelolaan keuangan yang efektif.
- 3) Teori investasi, teori investasi menganggap bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan hasil yang besar bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks pembiayaan pendidikan, teori ini menyarankan bahwa investasi pada pendidikan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Teori keadilan pendidikan, teori keadilan pendidikan menganggap bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan secara adil dan merata. Dalam konteks pembiayaan pendidikan, teori ini menyarankan bahwa perlu ada upaya untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak

¹¹⁹ Wawancara, Sayidatul Lutfiah, Manajemen Pembiayaan Madin.

menjadi hambatan bagi individu yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Dalam menganalisis metode dan teori pembiayaan pendidikan maka akan dipertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan madrasah diniyah, sumber daya yang tersedia, dan dampak dari setiap metode atau teori yang dipilih. maka akan memilih metode atau teori yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi madrasah diniyah, serta memberikan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain itu, dan juga akan memperhatikan aspek keuangan, seperti pengelolaan dana, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana, serta pemenuhan aspek legalitas dan regulasi keuangan yang berlaku.

c. Cara merencanakan pembiayaan pendidikan

Heru Prasetyo S.Pd. Sebagai Kepala Madrasah Diniyah, mengemukakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk merencanakan pembiayaan pendidikan:¹²⁰

- 1) Menganalisis kebutuhan, pertama-tama, perlu untuk menganalisis kebutuhan pendidikan di madrasah diniyah. Hal ini mencakup jumlah siswa, kurikulum, fasilitas, kebutuhan sumber daya manusia, dan program pendidikan lainnya. Dari hasil analisis ini, dapat ditentukan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di madrasah diniyah.
- 2) Menentukan sumber dana, setelah menganalisis kebutuhan pendidikan, selanjutnya perlu menentukan sumber dana yang tersedia. Sumber dana dapat berasal dari pemerintah, swasta, atau sumber-sumber lainnya seperti dana zakat dan infak.
- 3) Menetapkan prioritas: selanjutnya, perlu menetapkan prioritas dalam penggunaan dana yang tersedia. Prioritas ini dapat didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang paling mendesak,

¹²⁰ Wawancara, Heru Prasetyo, Manajemen Pembiayaan Madin.

kepentingan jangka panjang, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

- 4) Menyusun rencana anggaran, setelah menentukan prioritas, selanjutnya perlu menyusun rencana anggaran yang detail dan realistis. Rencana anggaran ini mencakup daftar pengeluaran untuk setiap kebutuhan pendidikan yang telah ditetapkan, serta perencanaan untuk sumber dana yang akan digunakan.
- 5) Memantau dan evaluasi: terakhir, perlu memantau dan mengevaluasi penggunaan dana secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun, serta untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan kebutuhan yang masih perlu dipenuhi.

Dalam merencanakan pembiayaan pendidikan, penting untuk melibatkan seluruh pihak terkait seperti staf akademik, staf administratif, dan pengurus madrasah diniyah. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan pendidikan dipenuhi secara holistik dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan aspek keuangan yang bersifat jangka panjang, seperti investasi pada fasilitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Sebagai kepala tata usaha madrasah diniyah: Sayidatul Lutfiah S.Kom, mengemukakan beberapa analisis tentang cara merencanakan pembiayaan pendidikan:¹²¹

- 1) Menganalisis kebutuhan, salah satu langkah awal dalam merencanakan pembiayaan pendidikan adalah dengan melakukan analisis kebutuhan pendidikan di madrasah diniyah. Hal ini mencakup perhitungan biaya operasional, kebutuhan fasilitas dan peralatan, serta kebutuhan sumber daya manusia. Dari hasil analisis ini, dapat ditentukan besarnya anggaran

¹²¹ Wawancara, Sayidatul Lutfiah, Manajemen Pembiayaan Madin.

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di madrasah diniyah.

- 2) Menentukan sumber dana, setelah menganalisis kebutuhan pendidikan, langkah selanjutnya adalah menentukan sumber dana yang tersedia. Sumber dana dapat berasal dari pemerintah, swasta, atau sumber-sumber lain seperti dana zakat dan infak. Penting untuk mempertimbangkan sumber dana yang stabil dan dapat diandalkan dalam jangka panjang.
- 3) Menetapkan prioritas, selanjutnya, perlu menetapkan prioritas dalam penggunaan dana yang tersedia. Prioritas ini dapat didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang paling mendesak, kepentingan jangka panjang, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Prioritas yang ditetapkan harus sejalan dengan visi dan misi madrasah diniyah.
- 4) Menyusun rencana anggaran, setelah menentukan prioritas, selanjutnya perlu menyusun rencana anggaran yang detail dan realistis. Rencana anggaran ini mencakup daftar pengeluaran untuk setiap kebutuhan pendidikan yang telah ditetapkan, serta perencanaan untuk sumber dana yang akan digunakan. Rencana anggaran harus dapat mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan kebutuhan dan pengeluaran di masa depan.
- 5) Mengoptimalkan penggunaan dana, penting untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan seefektif mungkin. Salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan dana adalah dengan melakukan perencanaan dan pengendalian pengeluaran secara ketat dan tepat waktu.
- 6) Memantau dan evaluasi, terakhir, perlu memantau dan mengevaluasi penggunaan dana secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun, serta untuk

mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan kebutuhan yang masih perlu dipenuhi.

Dalam merencanakan pembiayaan pendidikan, penting untuk melibatkan seluruh pihak terkait seperti staf akademik, kepala madrasah, dan pengurus madrasah diniyah. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan pendidikan dipenuhi secara holistik dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan aspek keuangan yang bersifat jangka panjang, seperti investasi pada fasilitas

d. Hasil perencanaan pembiayaan pendidikan

Sebagai kepala madrasah diniyah Heru Prasetyo S.Pd.I, mengatakan beberapa analisis tentang hasil dari perencanaan pembiayaan pendidikan adalah:¹²²

- 1) Terpenuhinya kebutuhan pendidikan, hasil perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik akan memastikan terpenuhinya kebutuhan pendidikan di madrasah diniyah. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan fasilitas dan peralatan, sumber daya manusia, serta biaya operasional yang diperlukan. Dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan, diharapkan kualitas pendidikan di madrasah diniyah dapat meningkat.
- 2) Pengelolaan dana yang efektif, perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik juga dapat memastikan pengelolaan dana yang efektif. Hal ini mencakup perencanaan anggaran yang baik, pengendalian pengeluaran, serta pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus. Dengan pengelolaan dana yang efektif, diharapkan keuangan madrasah diniyah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
- 3) Penggunaan dana yang transparan, hasil perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik juga dapat memastikan penggunaan dana yang transparan. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dari masyarakat dan pihak-

¹²² Wawancara, Heru Prasetyo, Manajemen Pembiayaan Madin.

pihak terkait lainnya. Dengan penggunaan dana yang transparan, diharapkan madrasah diniyah dapat terus mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

- 4) Meningkatnya kualitas pendidikan, hasil perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah diniyah. Dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan, pengelolaan dana yang efektif, dan penggunaan dana yang transparan, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.
- 5) Terwujudnya Visi dan Misi Madrasah Diniyah, hasil perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik juga akan membantu terwujudnya visi dan misi madrasah diniyah. Hal ini karena perencanaan yang baik akan memastikan bahwa kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi dan pengelolaan dana berjalan dengan baik, sehingga tujuan-tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik.

Dalam analisis hasil perencanaan pembiayaan pendidikan, penting untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan adanya perubahan kebutuhan dan kondisi keuangan yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga perencanaan dapat disesuaikan dengan kondisi yang aktual. Sebagai kepala tata usaha : Sayidatul Lutfiah S.Kom, mengemukakan analisis tentang hasil perencanaan pembiayaan pendidikan:¹²³

- 1) Efisiensi pengelolaan dana, hasil perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik akan memastikan efisiensi pengelolaan dana. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran yang baik,

¹²³ Wawancara, Sayidatul Lutfiah, Manajemen Pembiayaan Madin.

pengendalian pengeluaran, serta pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus. Dengan pengelolaan dana yang efisien, diharapkan keuangan madrasah diniyah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

- 2) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya, hasil perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik akan memastikan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan fasilitas dan peralatan, sumber daya manusia, serta biaya operasional yang diperlukan. Dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, diharapkan kualitas pendidikan di madrasah diniyah dapat meningkat.
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan, hasil perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah diniyah. Dengan terpenuhinya kebutuhan pendidikan, pengelolaan dana yang efisien, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.
- 4) Transparansi penggunaan dana, hasil perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik juga akan membantu memastikan transparansi dalam penggunaan dana. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan penggunaan dana yang transparan, diharapkan madrasah diniyah dapat terus mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.
- 5) Terwujudnya Visi dan Misi Madrasah Diniyah, hasil perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik juga akan membantu terwujudnya visi dan misi madrasah diniyah. Hal ini karena perencanaan yang baik akan memastikan bahwa kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi dan pengelolaan dana

berjalan dengan baik, sehingga tujuan-tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik.

Dalam analisis hasil perencanaan pembiayaan pendidikan, penting untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan adanya perubahan kebutuhan dan kondisi keuangan yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga perencanaan dapat disesuaikan dengan kondisi yang aktual.

e. Analisis data pengorganisasian pembiayaan pendidikan

Sebagai kepala madrasah diniyah Heru Prasetyo S.Pd.I, mengatakan analisis saya tentang data pengorganisasian pendidikan mencakup beberapa hal berikut:¹²⁴

- 1) Identifikasi kebutuhan pendidikan, data pengorganisasian pendidikan harus memuat informasi tentang kebutuhan pendidikan yang dihadapi oleh madrasah diniyah. Hal ini mencakup jumlah siswa, program pendidikan, dan fasilitas yang dibutuhkan. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, maka pengelola madrasah diniyah dapat merencanakan dan mengorganisir kegiatan pendidikan secara efektif.
- 2) Pengorganisasian sistem pembelajaran, data pengorganisasian pendidikan juga harus memuat informasi tentang sistem pembelajaran yang digunakan di madrasah diniyah. Hal ini mencakup kurikulum yang digunakan, metode pembelajaran, dan penilaian siswa. Dengan informasi yang lengkap, maka pengelola madrasah diniyah dapat merencanakan dan melaksanakan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan.
- 3) Pengelolaan sumber daya manusia, data pengorganisasian pendidikan juga harus memuat informasi tentang sumber daya

¹²⁴ Wawancara, Heru Prasetyo, Manajemen Pembiayaan Madin.

manusia yang dimiliki oleh madrasah diniyah. Hal ini mencakup jumlah dan kualifikasi guru, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya. Dengan informasi yang lengkap, maka pengelola madrasah diniyah dapat mengelola sumber daya manusia dengan efektif dan memastikan bahwa kualitas pendidikan yang diberikan dapat meningkat.

- 4) Pengelolaan fasilitas dan Peralatan, data pengorganisasian pendidikan juga harus memuat informasi tentang fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh madrasah diniyah. Hal ini mencakup ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan peralatan pendukung lainnya. Dengan informasi yang lengkap, maka pengelola madrasah diniyah dapat mengelola fasilitas dan peralatan dengan efektif dan memastikan bahwa kegiatan pendidikan dapat berjalan dengan lancar.
- 5) Evaluasi dan perbaikan, data pengorganisasian pendidikan juga harus mencakup informasi tentang evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan yang dilaksanakan di madrasah diniyah. Hal ini mencakup hasil evaluasi pembelajaran, kepuasan siswa dan orang tua, serta rekomendasi untuk perbaikan kegiatan pendidikan di masa depan. Dengan informasi yang lengkap, maka pengelola madrasah diniyah dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kegiatan pendidikan secara terus-menerus.

Dalam pengorganisasian pendidikan, penting untuk mengumpulkan data secara lengkap dan akurat. Data ini kemudian dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat dan merencanakan kegiatan pendidikan yang efektif dan efisien. Dalam analisis data pengorganisasian pendidikan, penting untuk melakukan evaluasi secara berkala dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan.

2. Pengertian pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses merancang dan mengatur

struktur organisasi serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi atau institusi. Dalam pengorganisasian, sumber daya manusia, materi, dan proses diatur sedemikian rupa agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian merujuk pada pengaturan dan pengelolaan semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, seperti perencanaan kurikulum, perekrutan dan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan fasilitas, dan pengaturan proses belajar-mengajar.

Pengorganisasian yang baik dalam pendidikan akan membantu institusi pendidikan dalam mengelola sumber daya dan aktivitas untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengorganisasian pendidikan sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

3. Proses pengorganisasian

Proses pengorganisasian melibatkan beberapa tahapan, di antaranya:

- a. Identifikasi Tujuan Organisasi Langkah pertama dalam pengorganisasian adalah menentukan tujuan dan misi organisasi atau institusi pendidikan. Hal ini akan membantu dalam menentukan arah dan strategi yang akan diambil dalam pengorganisasian.
- b. Menentukan Struktur Organisasi Setelah tujuan dan misi organisasi atau institusi pendidikan ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan struktur organisasi. Struktur organisasi mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, hierarki kekuasaan, dan alur komunikasi dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik dapat memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan di dalam institusi pendidikan.
- c. Menentukan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Setelah struktur organisasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan sumber daya manusia, seperti guru, staf administrasi,

dan karyawan lainnya. Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, kurikulum, dan aktivitas lainnya dalam menentukan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang dibutuhkan.

- d. Mengalokasikan Sumber Daya Setelah kebutuhan sumber daya manusia ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, seperti dana, fasilitas, dan peralatan. Penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan aktivitas lainnya.
- e. Menentukan Kebutuhan Kurikulum Langkah selanjutnya adalah menentukan kebutuhan kurikulum. Kurikulum harus disesuaikan dengan tujuan dan misi institusi pendidikan serta kebutuhan pendidikan siswa. Kurikulum harus dirancang agar siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dibutuhkan untuk masa depan mereka.
- f. Mengatur Prosedur dan Kebijakan Terakhir, proses pengorganisasian juga melibatkan pengaturan prosedur dan kebijakan. Prosedur dan kebijakan harus disusun secara jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Proses pengorganisasian adalah proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, penting bagi kepala madrasah atau tata usaha madrasah untuk mengikuti proses pengorganisasian yang tepat guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

B. Analisis Data Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

1) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan

Proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan melibatkan beberapa tahapan, di antaranya:

- a. Pengumpulan Dana Langkah pertama dalam proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan adalah pengumpulan dana. Dana dapat

dikumpulkan dari sumber-sumber seperti pemerintah, donatur, atau biaya pendidikan dari siswa.

- b. Perencanaan Penggunaan Dana Setelah dana terkumpul, langkah selanjutnya adalah merencanakan penggunaan dana. Hal ini meliputi pembuatan anggaran dan penentuan alokasi dana untuk kegiatan pendidikan seperti pembelian buku, peralatan, atau pembayaran gaji guru.
- c. Pengelolaan Dana Setelah perencanaan penggunaan dana selesai, langkah selanjutnya adalah pengelolaan dana. Pengelolaan dana meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana serta pemantauan anggaran agar pengeluaran tidak melebihi dana yang tersedia.
- d. Penyaluran Dana Setelah dana dikelola dengan baik, langkah selanjutnya adalah penyaluran dana untuk kegiatan pendidikan seperti pembelian buku, peralatan, atau pembayaran gaji guru. Penting untuk memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
- e. Pemantauan dan Evaluasi Setelah dana disalurkan, langkah terakhir dalam proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan adalah pemantauan dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana telah digunakan dengan efektif dan efisien serta memenuhi tujuan pendidikan yang diinginkan. Pemantauan dan evaluasi juga membantu dalam menentukan perbaikan atau penyesuaian dalam proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan di masa yang akan datang.

Proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan merupakan proses yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, kepala madrasah atau tata usaha madrasah harus memastikan bahwa proses ini dilaksanakan dengan baik dan efektif.

2) Prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan

Prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kebijakan masing-masing lembaga

pendidikan, namun secara umum dapat meliputi tahapan-tahapan berikut:

- a. Perencanaan dan Penganggaran Langkah pertama dalam prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan adalah perencanaan dan penganggaran. Tahapan ini meliputi identifikasi kebutuhan dan prioritas pendidikan, pengumpulan data dan informasi terkait sumber daya yang tersedia, serta pembuatan rencana anggaran untuk kegiatan pendidikan.
- b. Pengajuan Proposal Setelah perencanaan dan penganggaran selesai, langkah selanjutnya adalah pengajuan proposal pembiayaan kepada sumber dana yang dimaksudkan. Proposal ini berisi rincian kegiatan, biaya yang dibutuhkan, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
- c. Evaluasi Proposal Setelah proposal diajukan, tahap selanjutnya adalah evaluasi proposal oleh pihak yang bertanggung jawab. Evaluasi ini meliputi penilaian kelayakan proposal, kesesuaian dengan prioritas pendidikan, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan.
- d. Penentuan Dana Setelah proposal dinilai layak, langkah selanjutnya adalah penentuan jumlah dana yang akan disalurkan. Hal ini melibatkan perhitungan kebutuhan dan alokasi dana sesuai dengan prioritas dan tujuan pendidikan.
- e. Pelaksanaan Kegiatan Setelah dana ditentukan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disetujui.
- f. Monitoring dan Evaluasi Tahapan terakhir dalam prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan adalah monitoring dan evaluasi. Tahapan ini meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penggunaan dana, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan dan penyesuaian di masa yang akan datang.

Demikianlah beberapa tahapan umum dalam prosedur

pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Penting untuk diingat bahwa prosedur ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan pendidikan yang berlaku.

3) Peningkatan mutu

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan mutu pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Pembiayaan yang memadai dapat meningkatkan mutu pendidikan, sementara kurangnya pembiayaan dapat berdampak negatif pada mutu pendidikan.

Pembiayaan yang memadai dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Pengembangan sarana dan prasarana yang memadai, seperti gedung sekolah yang layak, peralatan pembelajaran yang memadai, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini akan memudahkan proses belajar mengajar, sehingga siswa dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti guru dan tenaga kependidikan lainnya, melalui pelatihan dan pengembangan profesionalisme. Guru yang berkualitas akan mampu memberikan pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan standar pendidikan.
- c. Pembelian dan pengembangan bahan ajar yang up-to-date dan berkualitas tinggi, sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mendalam.

Namun demikian, meskipun pembiayaan yang memadai dapat meningkatkan mutu pendidikan, faktor-faktor lain seperti manajemen sekolah, kurikulum, dan kebijakan pendidikan juga memainkan peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan.

Sebagai kepala madrasah diniyah Heru Prasetyo S.Pd.I, penting untuk melakukan analisis yang komprehensif tentang hubungan antara pembiayaan pendidikan dan mutu pendidikan. Dalam hal ini, dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang telah dilakukan, serta memperhatikan sejumlah faktor seperti

penggunaan dana secara efektif dan efisien, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.¹²⁵ Dengan melakukan analisis yang tepat, kepala madrasah diniyah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah diniyah yang dipimpinnya.

4) Pemangku kewenangan melaksanakan anggaran pembiayaan

Pemangku kewenangan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah dapat bervariasi tergantung pada negara atau wilayah yang bersangkutan. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa pemangku kewenangan yang terlibat dalam pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah:

- a. Kepala Madrasah Diniyah: Kepala Madrasah Diniyah bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan di madrasah diniyah. Salah satu tugas utama kepala madrasah diniyah adalah merencanakan dan melaksanakan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah.
- b. Pengurus Yayasan atau Badan Hukum Lainnya: Madrasah diniyah biasanya didirikan oleh yayasan atau badan hukum lainnya. Pengurus yayasan atau badan hukum lainnya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan administrasi madrasah diniyah, termasuk pengelolaan dana yang diperoleh dari berbagai sumber.
- c. Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dana untuk mendukung kegiatan pendidikan di madrasah diniyah. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program pendidikan di wilayahnya.
- d. Masyarakat: Masyarakat dapat memberikan sumbangan atau bantuan dana untuk mendukung kegiatan pendidikan di madrasah diniyah.

Dalam prakteknya, kepala tata usaha madrasah diniyah juga turut terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah. Dalam bekerja sama dengan pemangku kewenangan yang

¹²⁵ Ibid.

terlibat, kepala madrasah diniyah dan kepala tata usaha madrasah diniyah perlu memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan dengan tepat dan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah diniyah.

5) Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran

Waka sarpras Nurhadi S.H. mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah ditujukan kepada beberapa pihak, tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing wilayah. Beberapa pihak yang dapat menjadi penerima pertanggungjawaban antara lain:¹²⁶

- a. Kepala Madrasah Diniyah: Kepala Madrasah Diniyah bertanggung jawab atas penggunaan dana yang digunakan untuk kegiatan pendidikan di madrasah diniyah, termasuk dana yang diperoleh dari pemerintah daerah atau sumber lainnya.
- b. Pengurus Yayasan atau Badan Hukum Lainnya: Pengurus yayasan atau badan hukum lainnya bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan administrasi madrasah diniyah, termasuk pengelolaan dana yang diperoleh dari berbagai sumber.
- c. Auditor Internal dan Eksternal: Auditor internal dan eksternal bertanggung jawab untuk memeriksa penggunaan dana dan memberikan laporan keuangan yang akurat kepada pihak yang berwenang.
- d. Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi penggunaan dana yang diberikan kepada madrasah diniyah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat dan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pada umumnya, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana, dan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjaga integritas dan kepercayaan

¹²⁶ Wawancara, Nurhadi, Manajemen Pembiayaan Madin.

publik.

6) Pembiayaan tidak terduga

Sebagai kepala madrasah diniyah, perencanaan dan pengelolaan anggaran merupakan tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan pendidikan di madrasah. Namun, kadangkala terdapat situasi yang tidak terduga seperti kejadian darurat, bencana alam, atau kebutuhan mendesak lainnya yang membutuhkan pembiayaan tambahan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, sebagai kepala madrasah diniyah Heru Prasetyo S.Pd.I analisis saya terhadap kebutuhan dana tambahan dan mencari sumber pembiayaan yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:¹²⁷

- a. Mencari sumber dana tambahan: Saya akan mencari sumber dana tambahan yang tersedia, baik dari lembaga pemerintah, yayasan, maupun donatur lain yang dapat memberikan dukungan keuangan.
- b. Membuat proposal: Saya akan membuat proposal yang jelas dan terperinci tentang kebutuhan dana tambahan serta tujuan penggunaannya. Proposal ini akan menjadi dasar untuk meminta dukungan keuangan dari pihak-pihak yang bersedia memberikan bantuan.
- c. Menjaga transparansi: Saya akan menjaga transparansi dalam pengelolaan dana tambahan tersebut dan menginformasikan penggunaannya kepada seluruh pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.
- d. Mengoptimalkan penggunaan dana: Saya akan berupaya mengoptimalkan penggunaan dana tambahan tersebut dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak dan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Dalam situasi yang tidak terduga seperti ini, peran kepala

¹²⁷ Wawancara, Heru Prasetyo, Manajemen Pembiayaan Madin.

madrasah diniyah sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tambahan dilakukan dengan baik dan efektif sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi keberlangsungan pendidikan di madrasah.

C. Analisis Data Pengawasan Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian pengawasan

Pengawasan pembiayaan madrasah diniyah merupakan proses untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana pendidikan di madrasah diniyah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan sesuai dengan perencanaan, tidak ada penyalahgunaan, dan hasil dari penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Pengawasan pembiayaan madrasah diniyah dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana pendidikan, antara lain:

- a. Kepala madrasah diniyah, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana pendidikan di madrasah diniyah.
- b. Bendahara madrasah diniyah, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan dana pendidikan serta pelaporan keuangan di madrasah diniyah.
- c. Pengawas madrasah diniyah, yang bertanggung jawab atas pengawasan dan monitoring pengelolaan dana pendidikan di madrasah diniyah.
- d. Inspektorat, yang bertanggung jawab atas pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan dana pendidikan di semua lembaga pendidikan, termasuk madrasah diniyah.
- e. Masyarakat, yang berperan sebagai pengawas sosial untuk memantau dan memberikan masukan atas pengelolaan dana pendidikan di madrasah diniyah.

Dalam melakukan pengawasan, pihak-pihak terkait tersebut harus melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan

profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.

2. Mekanisme pengawasan dan ketersesuaian pembiayaan dengan perencanaan

Untuk memastikan bahwa mekanisme pembiayaan pendidikan sesuai dengan perencanaan, beberapa hal dapat dilakukan, antara lain:

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala: Kepala madrasah dan staf tata usaha perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perencanaan pembiayaan pendidikan. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi, dapat diidentifikasi apakah terdapat penyimpangan atau tidak sesuai dengan perencanaan. Jika ditemukan penyimpangan, maka dapat segera dilakukan tindakan korektif untuk mengatasi masalah tersebut.
- b. Transparansi dan akuntabilitas: Pelaksanaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang penggunaan dana pendidikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, staf tata usaha harus memiliki dokumentasi dan bukti yang jelas tentang setiap transaksi pengeluaran dana pendidikan.
- c. Pelibatan semua pihak yang terkait: Untuk memastikan bahwa mekanisme pembiayaan pendidikan sesuai dengan perencanaan, semua pihak yang terkait harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Kepala madrasah dan staf tata usaha harus bekerja sama dengan guru, orang tua siswa, dan masyarakat dalam memastikan bahwa pembiayaan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan.
- d. Pengawasan eksternal: Pihak-pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan kementerian agama juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah. Pengawasan eksternal ini dapat membantu memastikan bahwa

mekanisme pembiayaan pendidikan berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak terdapat penyimpangan yang merugikan.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, proses mekanisme pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah dapat diharapkan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

3. Mengukur keberhasilan pembiayaan pendidikan

Terdapat beberapa tolak ukur keberhasilan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah, di antaranya:

- a. Ketersediaan anggaran yang memadai: Keberhasilan pembiayaan pendidikan dapat diukur dari ketersediaan anggaran yang memadai untuk menunjang seluruh kegiatan pendidikan di madrasah diniyah. Dengan adanya anggaran yang memadai, madrasah diniyah dapat menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- b. Peningkatan kualitas pendidikan: Keberhasilan pembiayaan pendidikan juga dapat diukur dari peningkatan kualitas pendidikan yang dihasilkan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, seperti peningkatan hasil ujian, jumlah siswa yang lulus dengan nilai baik, dan peningkatan kemampuan guru dan tenaga kependidikan.
- c. Efektivitas penggunaan anggaran: Keberhasilan pembiayaan pendidikan juga dapat diukur dari efektivitas penggunaan anggaran. Pihak madrasah diniyah harus dapat memastikan bahwa anggaran yang telah disediakan digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dalam hal ini, dapat dilihat dari besaran anggaran yang digunakan, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan, dan adanya perbaikan infrastruktur pendidikan.
- d. Partisipasi masyarakat: Keberhasilan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah juga dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam membiayai pendidikan. Semakin besar partisipasi

masyarakat dalam membiayai pendidikan, maka semakin baik pula keberhasilan pembiayaan pendidikan tersebut.

- e. Terpenuhinya kebutuhan siswa: Keberhasilan pembiayaan pendidikan juga dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa yang dimaksud meliputi fasilitas pendidikan, bahan ajar, dan kebutuhan lainnya yang memungkinkan siswa untuk belajar secara optimal. Jika semua kebutuhan siswa telah terpenuhi dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah telah berhasil.

4. Bentuk pengawasan

Pengawasan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain:

- a. Pengawasan internal: Dilakukan oleh pihak madrasah diniyah sendiri, yaitu oleh kepala madrasah diniyah, bendahara, dan staf tata usaha. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan madrasah diniyah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
- b. Pengawasan eksternal: Dilakukan oleh pihak dari luar madrasah diniyah, seperti auditor independen atau lembaga pengawas keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa madrasah diniyah menjalankan pengelolaan keuangan dengan transparan dan akuntabel.
- c. Pengawasan oleh masyarakat: Dilakukan oleh masyarakat atau komite sekolah yang dibentuk oleh orang tua murid dan masyarakat sekitar madrasah diniyah. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa keuangan madrasah diniyah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Melalui pengawasan yang baik, diharapkan pengelolaan keuangan di madrasah diniyah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau

penyimpangan dalam penggunaan dana pendidikan.

5. Hasil pengawasan dan pihak yang melakukan pengawasan

Hasil pengawasan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing madrasah diniyah dan sistem pengawasan yang diterapkan. Namun, secara umum, hasil pengawasan pembiayaan pendidikan di madrasah diniyah dapat dilihat dari efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana.

Efektivitas penggunaan dana dapat dilihat dari sejauh mana penggunaan dana telah memenuhi tujuan dan target yang telah ditetapkan, seperti peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan fasilitas madrasah. Efisiensi penggunaan dana dapat dilihat dari seberapa efisien penggunaan dana tersebut, seperti apakah dana telah digunakan dengan tepat dan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan akuntabilitas penggunaan dana dapat dilihat dari seberapa baik madrasah diniyah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, seperti melalui laporan keuangan atau audit.

Untuk mengawasi penggunaan dana di madrasah diniyah, biasanya ada beberapa pihak yang berwenang seperti kepala madrasah, pengawas madrasah, dan instansi pemerintah yang terkait. Selain itu, masyarakat juga dapat turut mengawasi penggunaan dana di madrasah diniyah melalui mekanisme pengawasan yang telah ditetapkan.

D. Analisa Data Mutu Layanan Pendidikan

1) Pengertian kualitas pelayanan

Kualitas layanan pendidikan sangat mempengaruhi mutu pendidikan karena layanan pendidikan yang berkualitas akan membantu meningkatkan mutu pendidikan. Layanan pendidikan yang berkualitas mencakup berbagai aspek seperti fasilitas fisik yang memadai, tenaga pengajar yang berkualitas, kurikulum yang sesuai, metode pembelajaran yang inovatif, dan juga penggunaan teknologi dalam pembelajaran.

Fasilitas fisik yang memadai seperti ruang kelas yang bersih, nyaman, dan dilengkapi dengan peralatan pembelajaran yang memadai akan memberikan pengaruh yang baik terhadap motivasi dan minat belajar siswa. Tenaga pengajar yang berkualitas akan mampu

memberikan pengajaran yang efektif dan efisien, dan juga dapat membantu mengembangkan potensi siswa dengan baik. Kurikulum yang sesuai dan metode pembelajaran yang inovatif juga akan membantu siswa untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran.

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga dapat membantu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Teknologi dapat memudahkan siswa dalam mengakses materi pembelajaran dan juga membantu pengajar dalam menyajikan materi pembelajaran secara lebih interaktif dan menarik.

Dalam mengukur kualitas layanan pendidikan, dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti survei kepuasan siswa dan orang tua siswa, evaluasi kinerja tenaga pengajar, serta evaluasi program pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, dapat diidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari layanan pendidikan yang disediakan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

2) Karakteristik mutu pendidikan

Karakteristik mutu layanan pendidikan dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa aspek, antara lain:

- a. Kesesuaian: Layanan pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan tujuan peserta didik serta masyarakat. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan fasilitas, kurikulum, metode pembelajaran, dan pengelolaan.
- b. Relevansi: Layanan pendidikan harus relevan dengan tuntutan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berkaitan dengan penyusunan kurikulum, penguatan kompetensi guru, dan fasilitas pendukung pembelajaran.
- c. Efektivitas: Layanan pendidikan harus efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat diukur dari pencapaian prestasi peserta didik dan hasil evaluasi pembelajaran.
- d. Efisiensi: Layanan pendidikan harus efisien dalam menggunakan sumber daya yang tersedia, seperti tenaga pengajar, dana, dan

- fasilitas. Hal ini berkaitan dengan manajemen keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan aset.
- e. Keadilan: Layanan pendidikan harus adil dalam memberikan kesempatan belajar kepada semua peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan agama. Hal ini dapat diukur dari aksesibilitas dan keterjangkauan layanan pendidikan.
 - f. Keamanan: Layanan pendidikan harus aman dari segi fisik, psikologis, dan sosial. Hal ini berkaitan dengan pengamanan gedung, fasilitas, dan perlindungan peserta didik dari tindak kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi.

Dengan memperhatikan karakteristik mutu layanan pendidikan tersebut, diharapkan layanan pendidikan dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik dan masyarakat secara keseluruhan.

3) Standar pelayanan mutu minimal

Standar pelayanan mutu minimal (SPMM) adalah seperangkat kriteria yang ditetapkan untuk menjamin kualitas layanan pendidikan. Adapun beberapa contoh SPMM untuk pendidikan di Indonesia antara lain:

- a. Fasilitas dan sarana pendidikan: Menyangkut ketersediaan fasilitas dan sarana seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan toilet yang layak dan memadai.
- b. Kurikulum dan pembelajaran: Menyangkut kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan pembelajaran yang efektif dan efisien.
- c. Kompetensi guru dan tenaga kependidikan: Menyangkut kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga pengajar dan kependidikan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.
- d. Evaluasi dan pengembangan mutu: Menyangkut penilaian dan evaluasi terhadap kualitas layanan pendidikan, serta upaya pengembangan mutu yang berkelanjutan.

- e. Kesejahteraan peserta didik: Menyangkut perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan peserta didik dalam lingkungan pendidikan.
- f. Partisipasi masyarakat: Menyangkut keterlibatan masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi kualitas layanan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, SPMM harus terus diawasi dan dievaluasi untuk menjamin kualitas layanan pendidikan yang optimal. Setiap lembaga pendidikan harus melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan pendidikannya telah mencapai SPMM dan upaya apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitasnya.

4) Implikasi TQM sebagai kualitas layanan pendidikan

TQM (*Total Quality Management*) merupakan suatu filosofi manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi organisasi melalui partisipasi semua anggota organisasi dalam usaha perbaikan secara terus-menerus. Dalam konteks layanan pendidikan, implementasi TQM dapat membawa implikasi positif terhadap kualitas layanan pendidikan, antara lain:

- a. Fokus pada kepuasan pelanggan: TQM menekankan pada pentingnya memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam konteks layanan pendidikan, hal ini berarti memperhatikan kebutuhan siswa dan orang tua siswa untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
- b. Peningkatan efisiensi dan produktivitas: TQM mendorong adopsi metode dan teknik yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Dalam konteks layanan pendidikan, hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan sistem manajemen yang lebih baik.
- c. Perbaikan terus-menerus: TQM mendorong organisasi untuk melakukan perbaikan terus-menerus dalam semua aspek kegiatan organisasi. Dalam konteks layanan pendidikan, hal ini berarti

melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap kualitas layanan pendidikan yang diberikan.

- d. Peningkatan keterlibatan dan partisipasi anggota organisasi: TQM menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan semua anggota organisasi dalam usaha perbaikan. Dalam konteks layanan pendidikan, hal ini berarti memperkuat kerjasama antara guru, staf, siswa, dan orang tua siswa dalam memperbaiki kualitas layanan pendidikan.

Dengan mengimplementasikan TQM, organisasi layanan pendidikan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan, memperoleh kepercayaan pelanggan, dan meningkatkan reputasi organisasi.

E. TEMUAN

1. Realitas

Perencanaan dilakukan dengan menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, yang didahului menyusun RKAM, dengan menginventarisir, menganalisis, dan merumuskan daftar kebutuhan oleh tim perencanaan. Selanjutnya tim bekerja membuat rencana anggaran biaya, rencana pendanaan, dan menyelaraskan rencana biaya dengan pendanaan, kemudian dihitung beban biaya tersebut dengan merujuk PP. Agar RAPBM disusun dengan metode *costing* (pembebiayaan) berdasar keefektifan biaya.

2. Temuan

Perencanaan yang ideal dilakukan dengan menetapkan rencana yang menjadi prioritas, mengacu peraturan pemerintah, perhitungannya cermat, mengoptimalkan sumber daya dan diformulasikan dengan jelas agar kelak dikemudian hari tidak muncul pembiayaan tidak terduga.

Pendistribusiannya mengakomodir kebutuhan siswa, dan memaksimalkan fungsi manajemen perencanaan

Pengorganisasian dilakukan dengan memerinci pekerjaan, pembagian kerja, penyatuan pekerjaan, koordinasi pekerjaan dan

monitoring. Pemerincian pekerjaan dilakukan dengan memerinci pekerjaan, yang terdiri dari 8 standar nasional pendidikan yaitu menentukan tugas-tugas apa yang dilakukan Tim penyusun (RAPBM) untuk memerinci 8 standar tersebut, kedua membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau Tim penyusun, dengan membagi 8 standar tersebut kepada Tim (Waka-Waka madrasah, Bendahara dan guru penanggung jawab kegiatan) dalam menjabarkan 8 komponen SNP tersebut, Waka sarpras membidangi standar sarana dan prasarana, Waka Kurikulum membidangi standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian. Waka Humas membidangi standar pengelolaan, Waka Kesiswaan membidangi standar proses, dan Bendahara Madrasah membidangi standar pendidik dan tenaga kependidikan, Bendahara madrasah membidangi standar pembiayaan, guru guru senior membidangi standar Isi. Ketiga menggabungkan pekerjaan para tim penyusun program dengan rasional dan efisien untuk memudahkan dalam alokasi pembiayaannya. Keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan harmonis sehingga tujuan madrasah mudah dicapai dengan pembiayaan yang tersedia, bentuk pengoordinasiannya dilakukan dengan rapat koordinasi, dimana semua tim memaparkan hasil pemerincian kebutuhan madrasah, kemudian plenokan dan disepakati bersama tim, untuk disusun menjadi dokumen APBM. Kelima, melakukan *monitoring* dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Pengorganisasian yang ideal menurut peneliti ada pembagian tugas yang jelas sesuai keahlian tim agar tidak tumpang tindih, memprioritaskan kebutuhan, ada kerja sama tim, dan mengetahui tujuan pengorganisasian yang hendak dicapai

Pelaksanaan *actuating* di mulai mengacu perencanaan dan pengorganisasian, pada awal bulan Juli, pelaksana/tim mengajukan proposal kegiatan ke Kamad, setelah diteliti, ada kesesuaian dengan perencanaan, disetujui, bendahara mencairkan anggaran dengan

rekomendasi Kamad untuk membelanjakan barang maupun jasa, seperti pembayaran gaji guru, dan belanja barang keperluan pembelajaran. Pelaksananya adalah tim belanja barang dan jasa, melalui koordinasi Kepala Madrasah dan Waka sarpras agar belanja barang dapat sebagai inventarisasi barang. Sebelum melaksanakan kegiatan *actuating* di dahului langkah strategis, agar pelaksanaan berjalan maksimal dengan hasil optimal. Aktualiatas pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti pengoptimalan besaran anggaran pembiayaan, hingga mencapai 100% , mengacu perencanaan yang ada, terjaganya mutu madrasah dan tertanamnya rasa keikhlasan pada tim belanja barang/jasa, mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengoptimalan anggaran yang tersedia. Setiap pelaksanaan kegiatan disertai pelaporan dalam bentuk SPJ kegiatan.

Controlling dilakukan secara periodik tiap tri wulan dan tahunan, semua pengeluaran dan penerimaan dicatat dalam buku kas. Oleh Kasi Pendidikan madrasah dan Irjen Kemenag Pusat (pengawasan *extern*), dan pengawasan intern dari Kepala Madrasah dan yayasan kepada para tim pelaksana program kegiatan. *Controlling* yang ideal menurut peneliti apabila hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat dinilai, dibandingkan, dan dievaluasi, untuk direkomendasikan guna perbaikan proses di masa mendatang *Controlling* yang ideal apabila produknya dapat diaplikasikan untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan mutu madrasah. *Controlling* yang ideal adalah pengawasan vertikal dan horisontal, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Mutu pendidikan Islam dalam kenyataannya masih selalu dan selalu dibanahi menurut pedoman SPM yang ada. Seringkali madrasah, komite dan yayasan menjadi sasaran pertama dan utama masyarakat atau pihak pelanggan karena mungkin terlambatnya pelayanan atau ketidakmampuan madrasah untuk memenuhi sarana penunjang pendidikan yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam.

Mutu pendidikan Islam yang ideal menurut penulis adalah

merupakan akumulasi dari cerminan semua mutu jasa pelayanan yang ada di lembaga pendidikan Islam yang diterima oleh para pelanggannya. Layanan pendidikan Islam adalah suatu proses yang panjang, dan sistem yang berjalan secara padu. Bila semua kegiatan dilakukan dengan baik, maka hasil akhir layanan pendidikan tersebut akan mencapai hasil yang baik, berupa mutu terpadu



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perencanaan pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti dilakukan dengan menetapkan rencana yang menjadi prioritas, mengacu Peraturan pemerintah, perhitungannya cermat, mengoptimalkan sumber daya dan diformulasikan dengan jelas agar kelak tidak muncul pembiayaan tidak terduga. Pendistribusiannya mengakomodir kebutuhan siswa, dan memaksimalkan fungsi manajemen perencanaan. Tim perencana terdiri dari Kepala Madrasah, Waka Sarpras, Waka Humas, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, satu guru senior, dan Bendahara Madrasah. Pengorganisasian pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas sesuai keahlian tim penyusun, Waka Sarpras membidangi standar sarana dan prasarana, Waka kurikulum memegang kendali standar kompetensi lulusan dan standar penilaian, waka Humas membidangi standar pengelolaan, waka kesiswaan membidangi standar proses, dan Bendahara Madrasah membidangi standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar pembiayaan, dan salah satu guru senior membidangi standar Isi. Pembagian tersebut agar tidak tumpang tindih, dapat memprioritaskan kebutuhan, ada kerjasama tim, dan mengetahui tujuan pengorganisasian yang hendak dicapai

Actuating/aktualisasi pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti dilakukan dengan mengoptimalkan besarnya anggaran pembiayaan, hingga mencapai 100% atau mendekatinya, mengacu perencanaan yang ada, terjaganya mutu madrasah dan tertanamnya rasa keihlasan pada tim belanja barang/jasa (semua wakil masing-masing bagian dan Bendahara), mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengoptimalan anggaran yang tersedia .Setiap pelaksanaan realisasi selalu disertai pelaporan kegiatan dalam bentuk SPJ kegiatan.

Controlling/pengawasan pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti apabila hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat dinilai, dibandingkan, dan dievaluasi, untuk direkomendasikan guna

perbaikan proses di masa mendatang. *Controlling* yang ideal apabila produknya dapat diaplikasikan untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan mutu madrasah. *Controlling* yang ideal adalah pengawasan vertikal dan horisontal, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

Mutu pendidikan Islam dalam kenyataannya masih selalu dibenahi menurut pedoman SPM yang ada. Seringkali madrasah, komite dan yayasan menjadi sasaran pertama dan utama masyarakat atau pihak pelanggan karena mungkin terlambatnya pelayanan atau ketidakmampuan madrasah untuk memenuhi sarana penunjang pendidikan yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam.

B. Saran

Setelah peneliti membahas data teori dan menganalisis data penelitian maka peneliti memberikan saran bagi madrasah dalam melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya, untuk memperoleh desain pembiayaan pendidikan yang ideal yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan kelak di kemudian hari :

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

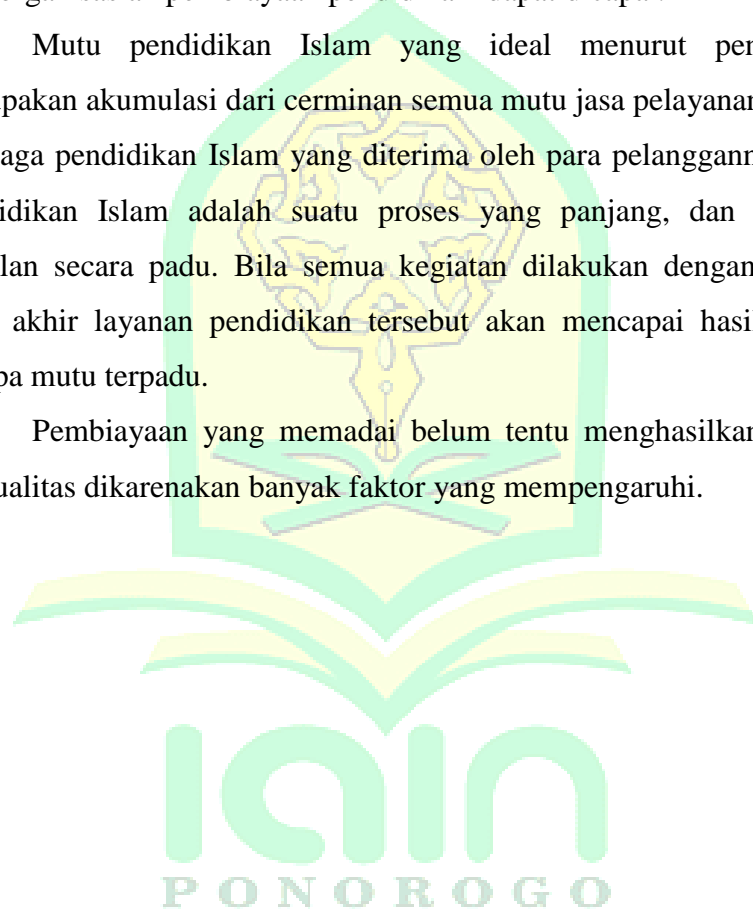
1. Memfokuskan pada 8 komponen standar pendidikan nasional, dan mempertimbangkan prioritas skala kebutuhan siswa, dengan memaksimalkan semua sumber-sumber pendanaan madrasah, kelebihan dan kekurangannya. Akan lebih lengkap jika melibatkan perwakilan siswa dalam merumuskan perencanaan pembiayaan pendidikan agar dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan para siswa.
2. Mengakomodir berbagai masukan dari stekaholder madrasah, dan membagi pekerjaan sesuai keahlian tim penyusun yang disertai tanggungjawab menyusun pengorganisasian pembiayaan pendidikan.
3. Menyesuaikan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan menghindari program yang tidak teranggarkan, perlunya menggali sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang lebih luas yang tidak memberatkan masyarakat, guru, dan siswa.

4.berprinsip pada kehati-hatian dan mengedepankan keterbukaan, dengan mekanisme tanggung jawab yang telah ditetapkan, memikul tanggung jawab dengan keihlasan, dan segera membuat laporan pertanggungjawaban di akhir kegiatan dalam bentuk SPJ.

5.Dapat mengukur pelaksanaan/*actuating* terhadap standar yang ada agar kekurangan/kelemahan dalam mentasarufkan pembiayaan pendidikan dapat diperbaiki dan memberikan keyakinan bahwa tujuan pengorganisasian pembiayaan pendidikan dapat dicapai.

Mutu pendidikan Islam yang ideal menurut penulis adalah merupakan akumulasi dari cerminan semua mutu jasa pelayanan yang ada di lembaga pendidikan Islam yang diterima oleh para pelanggannya. Layanan pendidikan Islam adalah suatu proses yang panjang, dan sistem yang berjalan secara padu. Bila semua kegiatan dilakukan dengan baik, maka hasil akhir layanan pendidikan tersebut akan mencapai hasil yang baik, berupa mutu terpadu.

Pembiayaan yang memadai belum tentu menghasilkan mutu yang berkualitas dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi.



DAFTAR PUSTAKA

- Akdon, et.al. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mufron, Ali. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013.
- Armida, "Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Media Akademika*, Fakultas Adab IAIN Sulthan Thaha, Vol.26, No.1, (2011).
- Armida. *Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Media Akademika Fakultas Adab : IAIN Sulthan Thaha, Vol.26, No.1, 2011.
- Edward, Salis. *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: IRCioD, 2008.
- Eko, Susilo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Airlangga, 2010.
- Fandy, Tjiptono. *Total Quality Management*. (Edisi Pertama. Andi Ofset.Yogyakarta. 2003.
- Fatah, Nanang. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2000.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2012.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Fattah, Nanang. *Pembiayaan Pendidikan Landasan Teori dan Studi Empiris*, Jurnal Pendidikan Dasar UPI, No. 9, 2008.
- Hari, Suderadjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*. Bandung : Cipta Lekas Garafika, 2005.
- Husaini, Usman. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 97.
- Jahari, Jaja dan Amirullah Syarbini. *Manajemen Madrasah Teori, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Jupri, M. *Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Menuju SBI Di SMP N 2 Rembang*, Journal of Economic Education, Vol, 1, 2012.

Kisbiyanto. *Pengefektifan Manajemen Pembiayaan*. Elementary: Vol 2 No 1, 2014.

Kisbiyanto. *Pengefektifan Manajemen Pendidikan, Elementary*, Vol 2, No 1, 2014.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Luneto, Buhari. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah*. Jurnal Tadbir : IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol 3 No. 2, 2015.

Mufron, Ali. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013. Mujib,

Abdul dan Yusuf Mudzakir. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: kencana, 2008.

Mulyasa. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia grup, 2006. Mursalim, *Paradigma Baru Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan dalam Perspektif Total Quality Management*.

Philip, Kotler. *Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. (Salemba Empat. Jakarta, 2003), 83

Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Airlangga, 2007.

Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Salis, Edward. 2006. *Total Quality Management in Education*. ([terj]. Yogyakarta: IRCiSoD)

Salis, Edward. *Total Quality Management in Education*. Yogyakarta, 2006.

Seafullah, U, KH. *Manajemen Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Suderadjat, Hari, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK*.

Soegito, *Pergeseran Paradigmatik Manajemen Pendidikan*. Semarang: Widya Karya, 2013. : Cipta Lekas Garafika, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif , Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT RinekaCipta, Jakarta, 2010.

Sumardi. *Madrasah Unggul Berkarakter Berbasis Budaya Kerja*. Artikel, Pendidikan Berkarakter, 2016.

Thorik Guna dan Utus Hardiono Sudibyo. *Marketing Muhammad*. Bandung: Madani Prima 2007.

Tim Penyusun EDM. *Evaluasi Diri MI Tahfidz Ash Habul Kahfi Ngawi Tahun Pelajaran 2016/2017*. Ngawi: MIT Ash Habul Kahfi, 2016.

Tjiptono, Fandy. 2003. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Edisi Pertama. Andi Ofset, 2003.

Trianto, *Pengantar Penelitian bagi pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga kependidikan*. Jakarta: Kencana, 2011.

Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Aneka Ilmu, 2003.

Usman, Husaini. *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Winarno, Surachmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 97.

Yatim, Riyanto. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC, 2010